10 ANALOGI KERUSAKAN NEGARA

SOLUSI RAKYAT BERDAULAT



Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP - Azizatul Nur Imamah, S.Pi


SEKOLAH
NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Kata Pengantar

Rumah besar bernama Indonesia sejatinya dibangun di atas fondasi yang kokoh: kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah, sementara pemerintah dan seluruh lembaga negara hanyalah pengelola yang diamanahi tugas mulia untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan.

Namun, apa yang terjadi ketika rumah itu mulai retak, atapnya bocor, dan pilar-pilarnya rapuh? Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan mendalam saat menyaksikan rumah kita bersama mengalami kerusakan yang bersifat sistemik.

Kegelisahan ini selaras dengan apa yang telah lama disuarakan oleh budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun). Beliau, dalam berbagai kesempatan, telah mempertimbangkan penggunaan analogi-analogi sederhana untuk membedah kerumitan masalah bangsa. Misalnya, beliau mengibaratkan Indonesia seperti "bus" yang bermasalah, mempertanyakan apakah yang rusak "sopirnya... kondektornya... atau mesinnya". Beliau juga menganalogikan situasi di KPK seperti "dua kesebelasan" sepak bola yang pemainnya justru "memasukkan bola ke gawangnya Sendiri".

Dalam pandangannya, negara ini perlu "turun mesin", sebuah analogi yang menunjukkan perlunya perbaikan total, dan menggambarkan kondisi bangsa seperti terserang "penyakit komplikasi" yang rumit.

Terinspirasi dari metode ‘ngudari ruwet’ (mengurai kerumitan) yang kerap digunakan Cak Nun inilah, buku ini dibuat. Melalui sepuluh analogi sederhana yang diambil dari kehidupan sehari-hari, buku ini mengajak kita untuk memahami kompleksitas persoalan bangsa dengan cara yang lebih mudah dicerna. Mulai dari analogi tubuh manusia yang matanya tertutup, keluarga yang mengalami broken home, rumah yang rusak, hingga tubuh yang sakit kronis, setiap perumpamaan dirancang untuk membuka mata kita terhadap akar masalah yang sesungguhnya.

Analogi ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sebuah upaya untuk membedah anatomi kerusakan negara kita, dari lembaga tertinggi hingga kesadaran kita sebagai warga negara. Pertanyaan yang sering kita dengar, "Apakah cukup mengganti presiden?" atau "Apakah cukup menunggu pemilu lima tahunan?" perlu dijawab dengan jujur: tidak.

Setiap bab tidak hanya akan memotret kondisi ideal dan membandingkannya dengan kenyataan pahit hari ini, tetapi juga menawarkan arah solusi yang berpusat pada pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Solusi yang ditawarkan bukanlah perubahan instan yang utopis, melainkan sebuah panggilan untuk membangkitkan kesadaran kolektif, terutama dari empat pilar penjaga bangsa: kaum intelektual, rohaniawan, budayawan, serta TNI dan Polri.

Tujuan akhir dari buku ini bukanlah untuk menebar pesimisme, melainkan untuk menyalakan harapan melalui pemahaman yang jernih. Karena

sebelum merenovasi sebuah rumah, kita harus berani mengakui di mana letak kerusakannya. Sebelum menyembuhkan sebuah penyakit, kita harus berani melakukan diagnosis yang akurat.

Semoga buku ini dapat menjadi cermin refleksi bagi kita semua—rakyat Indonesia—pemilik sah republik ini. Sudah saatnya kita tidak lagi hanya menjadi penonton pasif, melainkan mengambil peran aktif dalam merawat dan memperbaiki rumah kita bersama.

Selamat membaca dan merenung.

Jakarta, September 2025

Tim Penulis

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **iv**

Daftar Gambar ..... **xix**

Indonesia Milik Kita, Masa Depan di Tangan Kita **1**

Bab 1: Kedaulatan Harus di Tangan Rakyat **1**

Bab 2: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Tubuh Manusia **4**

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Terbuka 4

Kepala Ibarat MPR 4

Badan Ibarat DPR 5

Kaki Ibarat Presiden 5

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Tertutup 6

Kepala Ibarat MPR 6

Badan Ibarat DPR 7

Kaki Ibarat Presiden 8

Pemilik Tubuh Ibarat Rakyat 8

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Manusia 9

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 11

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 12

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 14

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 16

Bab 3: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Keluarga 18

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Keluarga Bahagia 18

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Keluarga Broken Home 22

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Keluarga 26

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 29

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 31

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 33

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 35

Bab 4: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Rumah 38

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Rumah Aman, Nyaman, dan Tenteram 38

Atap Ibarat MPR 39
Saluran Ibarat Presiden 39
WC Ibarat Hukum 40
Pagar Ibarat TNI-Polri 40
Suasana Rumah Ibarat Kesadaran Rakyat 40
Listrik dan Air Ibarat Pajak 40
Fondasi Ibarat UUD 1945 41
Ventilasi Ibarat DPR 41
Dapur Ibarat Kemenkeu/DJP 41
Pilar Rumah Ibarat Para Intelektual, Budayawan, dan Rohaniawan 42
Rakyat Ibarat Penghuni Rumah 42
II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Rumah Rusak 43
Atap Ibarat MPR 44
Saluran Ibarat Presiden 44
WC Ibarat Hukum 44
Pagar Ibarat TNI–Polri 45
Suasana Rumah Ibarat Kesadaran Rakyat 45
Listrik dan Air Ibarat Pajak 45
Fondasi Ibarat UUD 1945 46
Ventilasi Ibarat DPR 46
Dapur Ibarat Kemenkeu/DJP 46

Pilar Rumah Ibarat Pilar Negara 46
Penghuni Rumah Ibarat Rakyat 47
III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Rumah 48
Renovasi Tanpa Mengusir Penghuni 48
Perubahan Sekejap Mata 49
Empat Pilar Penjaga Kedaulatan 49
Analogi Belajar Berenang: Takkan Paham Tanpa Masuk di Air 50
IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 51
Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 53
V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 56
Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 58
Bab 5: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Mobil 61
I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Mobil Bagus 61
Kemudi atau Setir Ibarat MPR 61
Mesin Ibarat Presiden dan Para Menteri 62
Filter Udara dan Knalpot Ibarat DPR 62

Saringan Bahan Bakar, Karburator, dan Injector Ibarat Kemenkeu dan DJP 62
Oli Mesin dan Filter Oli Ibarat Hukum dan Lembaga Pengawas.....63
Bahan Bakar Ibarat Pajak.....63
Bahan Bakar Cadangan Ibarat Utang Luar Negeri.....63
Penumpang Ibarat Rakyat.....63
II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Mobil Rusak.....64
Kemudi atau Setir Ibarat MPR.....65
Mesin Ibarat Presiden dan Para Menteri 65
Filter Udara dan Knalpot Ibarat DPR.....65
Saringan Bahan Bakar, Karburator, dan Injector Ibarat Kemenkeu dan DJP 66
Oli Mesin dan Filter Oli Ibarat Hukum dan Lembaga Pengawas.....66
Bahan Bakar Ibarat Pajak.....67
Bahan Bakar Cadangan Ibarat Utang Luar Negeri.....67
Penumpang Ibarat Rakyat.....67
III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Mobil.....68
IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 71

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 73

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 75

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 77

Bab 6: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sistem Manajemen Tim Kesebelasan 80

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Ideal 80

Pelatih Ibarat MPR 81

Kapten Ibarat Presiden 81

Pemain Bertahan Ibarat DPR 81

Kiper Ibarat Kemenkeu/DJP 81

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau 84

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau 86

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 89

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 91

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 93

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 95

Bab 7: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Sistem Manajemen Perkebunan.....98

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Ideal 98

Pemilik Kebun Ibarat Rakyat.....98

Dewan Pengawas Ibarat MPR 99

Mandor Kebun Ibarat Presiden 99

Pengatur Air dan Pupuk Ibarat DPR.....99

Penjaga Hama dan Kualitas Ibarat Sistem Hukum dan Lembaga Pengawas 100

Buah Kebun Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.....100

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Kacau 101

Pemilik Kebun Ibarat Rakyat.....101

Dewan Pengawas Ibarat MPR 102

Mandor Kebun Ibarat Presiden 102

Pengatur Air dan Pupuk Ibarat DPR.....102

Penjaga Hama dan Kualitas Ibarat Sistem Hukum dan Lembaga Pengawas 102

Buah Kebun Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.....103

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Perkebunan Kacau 104

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 107

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup.....109

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 111

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan.....113

Bab 8: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Pohon 116

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Pohon Subur 116

Akar Pohon Ibarat Dasar Negara.....116

Batang Pohon Ibarat Konstitusi dan Sistem Hukum 117

Ranting Besar Ibarat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional 117

Ranting Kecil Ibarat Peraturan dan Birokrasi.....117

Daun Ibarat Kebijakan Daerah dan Implementasi Lapangan.....118

Buah Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial.....118

Pemilik Pohon Ibarat Rakyat 118

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Pohon Sakit 119

Akar Pohon Ibarat Dasar Negara 119

Batang Pohon Ibarat Konstitusi dan Sistem Hukum 120

Ranting Besar Ibarat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional 120

Ranting Kecil Ibarat Peraturan dan Birokrasi 121

Daun Ibarat Kebijakan Daerah dan Implementasi Lapangan 121

Buah Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 121

Pemilik Pohon Ibarat Rakyat 122

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Pohon Sakit 122

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 124

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 126

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 128

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 130

Bab 9: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Handphone 133

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Handphone Normal 133

Prosesor Ibarat Presiden.....133
Sistem Operasi Ibarat MPR.....134
Baterai Ibarat Pajak Rakyat.....134
Power Bank Ibarat Utang Luar Negeri.....134
RAM dan Penyimpanan Ibarat DPR.....135
Antivirus dan Sistem Keamanan Ibarat TNI-Polri.....135
Aplikasi Ibarat Hukum dan Lembaga.....135
Layar Ibarat Media dan Aspirasi Rakyat....136
Pemilik Handphone Ibarat Rakyat Indonesia.....136
II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Handphone Rusak.....137
Prosesor Ibarat Presiden.....137
Sistem Operasi Ibarat MPR.....138
Baterai Ibarat Pajak Rakyat.....138
Power Bank Ibarat Utang Luar Negeri.....139
RAM dan Penyimpanan Ibarat DPR.....139
Antivirus dan Sistem Keamanan Ibarat TNI-Polri.....139
Aplikasi Ibarat Hukum dan Lembaga.....140
Layar Ibarat Media dan Aspirasi Rakyat....140
Pemilik Handphone Ibarat Rakyat Indonesia.....140

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Handphone 141
IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 145
Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 147
V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 150
Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 152
Bab 10: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Skincare 154
I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Skincare yang Aman 154
Facial Cleanser Ibarat Pendidikan Politik ... 154
Toner Ibarat MPR 155
Exfoliating Serum Ibarat DPR 155
Active Serum Ibarat Presiden 155
Acne Spot Treatment Ibarat Hukum dan Lembaga 155
Hydrating Toner Ibarat Pajak 156
Moisturizer Ibarat DJP/Kemenkeu 156
Sunscreen Ibarat TNI-Polri 156
Hydrating Sheet Mask Ibarat Utang Luar Negeri 157

Kulit Wajah Ibarat Rakyat Indonesia 157
II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Skincare Abal-Abal.....158
Facial Cleanser Ibarat Pendidikan Politik...158
Toner Ibarat MPR 159
Exfoliating Serum Ibarat DPR 159
Active Serum Ibarat Presiden 159
Acne Spot Treatment Ibarat Hukum dan Lembaga.....160
Hydrating Toner Ibarat Pajak 160
Moisturizer Ibarat DJP/Kemenkeu 160
Sunscreen Ibarat TNI-Polri.....161
Hydrating Sheet Mask Ibarat Utang Luar Negeri.....161
Kulit Wajah Ibarat Rakyat Indonesia 161
III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Skincare yang Abal-Abal.....162
IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 164
Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup.....166
V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 168
Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan.....170

Bab 11: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Organ Tubuh.....172

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Organ Tubuh Sehat Wal Afiat.....172

Kepala Ibarat MPR 172

Jantung Ibarat Presiden 173

Paru-Paru Ibarat DPR 173

Ginjal Ibarat Kemenkeu dan DJP 173

Hati dan Limpa Ibarat Hukum dan Lembaga.....173

Darah Ibarat Pajak Rakyat.....174

Pelawan dan Sistem Imun Ibarat TNI-Polri174

Parasit Ibarat Elite Parpol.....174

Tranfusi Darah Ibarat Utang Luar Negeri ..174

Mesin Pencuci Darah Ibarat Alat Bantu.....175

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Sakit Kronis.....176

Kepala Ibarat MPR 176

Jantung Ibarat Presiden 177

Paru-Paru Ibarat DPR 177

Ginjal Ibarat Kemenkeu dan DJP 177

Hati dan Limpa Ibarat Hukum dan Lembaga.....178

Darah Ibarat Pajak Rakyat.....178

Pelawan dan Sistem Imun Ibarat TNI-Polri 178
Parasit Ibarat Elite Parpol 178
Tranfusi Darah Ibarat Utang Luar Negeri 179
Mesin Pencuci Darah Ibarat Alat Bantu 179
III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Sakit Kronis 180
Kesadaran Jiwa Rakyat: Pusat Kehidupan Bangsa 180
Dokter Spesialis untuk Tubuh Indonesia 181
Strategi Pengobatan Bertahap 182
Parasit Politik: Cacing dalam Tubuh Bangsa 183
IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden? 184
Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup 187
V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan? 189
Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan 192
Bab 12: Berdoa Dulu atau Usaha Dulu? 195
I. Menimbang Spiritualitas dan Aksi 195
II. Golongan yang Termasuk dalam Cara Pandang Ini 196

Bab 13: Pergerakan Harus Dimulai Dari Sekarang .199

Biaya Penundaan Jauh Lebih Besar daripada Risiko Perubahan.....200

Siapa yang Harus Memulai? Kita Semua. ..200

Langkah Nyata yang Bisa Dimulai Hari Ini201

Daftar Pustaka 203

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Gambar

Gambar 1. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Manusia dengan Mata Terbuka 4
Gambar 2. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Tertutup.....6
Gambar 3. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Manusia 9
Gambar 4. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup? 11
Gambar 5. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup.....12
Gambar 6. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Mata Tertutup? 14
Gambar 7. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup 16
Gambar 8. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Keluarga Bahagia 18
Gambar 9. Ilustrasi Presiden adalah Kepala ART.....20
Gambar 10. Ilustrasi Keluarga Bahagia 21
Gambar 11. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Keluarga Broken Home.....22
Gambar 12. Ilustrasi suami (MPR) selingkuh dengan ART (Pemerintah) 23

Gambar 13. Ilustrasi Rumah Tangga Rakyat dan MPR yang Retak.....24
Gambar 14. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Keluarga 26
Gambar 15. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home? 29
Gambar 16. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home.....31
Gambar 17. Ilustrasi Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home?.....33
Gambar 18. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Rumah Aman, Nyaman, dan Tenteram 38
Gambar 19. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Rumah Rusak.....43
Gambar 20. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Rumah.....48
Gambar 21. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak? 51
Gambar 22. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak.....53
Gambar 23. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak?.....56

Gambar 24. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak 58
Gambar 25. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Mobil Bagus 61
Gambar 26. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Mobil Rusak 64
Gambar 27. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Mobil 68
Gambar 28. Ilustrasi Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak? 71
Gambar 29. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak 73
Gambar 30. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak? 75
Gambar 31. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak 77
Gambar 32. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Ideal 80
Gambar 33. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau 84
Gambar 34. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau 86

Gambar 35. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau? 89
Gambar 36. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau.....91
Gambar 37. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau?.....93
Gambar 38. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau.....95
Gambar 39. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Ideal.....98
Gambar 40. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Kacau.....101
Gambar 41. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Perkebunan Kacau.....104
Gambar 42. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau? 107
Gambar 43. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau 109

Gambar 44. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau?.....111
Gambar 45. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau.....113
Gambar 46. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Pohon Subur 116
Gambar 47. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Pohon Sakit 119
Gambar 48. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Pohon Sakit 122
Gambar 49. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit?124
Gambar 50. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit 126
Gambar 51. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit?.....128
Gambar 52. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit 130
Gambar 53. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Handphone Normal.....133
Gambar 54. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Handphone Rusak 137

Gambar 55. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Handphone 141
Gambar 56. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak?...145
Gambar 57. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak.....147
Gambar 58. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak? 150
Gambar 59. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak.....152
Gambar 60. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Skincare yang Aman.....154
Gambar 61. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Skincare Abal-Abal 158
Gambar 62. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Skincare yang Abal-Abal 162
Gambar 63. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal 164
Gambar 64. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal 166
Gambar 65. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal 168

Gambar 66. Tipe Pola Pikir Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal 170
Gambar 67. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Organ Tubuh Sehat Wal Afiat 172
Gambar 68. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Sakit Kronis 176
Gambar 69. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Sakit Kronis 180
Gambar 70. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis? 184
Gambar 71. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis 187
Gambar 72. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis? 189
Gambar 73. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis 192

Indonesia Milik Kita, Masa Depan di Tangan Kita

(Diadaptasi dari Pidato Gen Z Nepal)

Kami, berdiri dengan impian membangun Indonesia yang baru, dengan api harapan dan semangat yang membara dalam diri saya.

Namun, hati ini terasa berat karena impian itu seakan mulai meredup. Bangkitlah dan bersinarlah, masa depan negeri yang kita cintai ini.

Indonesia, ibu pertiwi kita, tanah air yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Tapi apa yang ia minta sebagai balasan? Hanya kejujuran, kerja keras, dan kontribusi dari anak-anaknya.

Namun apa yang terjadi? Kita terbelenggu oleh rantai pengangguran, padahal peluang terbentang luas. Kita terjebak dalam permainan politik yang egois. Korupsi tumbuh subur, merampas cahaya masa depan kita.

Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membangun bangsa ini, siapa lagi? Kita adalah api yang akan membakar kegelapan. Kita adalah badai yang akan menyapu bersih ketidakadilan dan membawa kesejahteraan.

Para pejuang telah menumpahkan darahnya untuk memberi kita kemerdekaan. Kita tak boleh diam. Kita tak boleh menyerah. Kita adalah apinya: kita akan membakar setiap keputusasaan.

Sekaranglah saatnya. Apakah kita akan mengubah nasib bangsa ini atau membiarkannya tetap terbelenggu?

Bung Karno pernah berkata: "Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan." Simpanlah pesan ini di dalam hati, wahai generasi muda.

Indonesia adalah milik kita, dan masa depan ada di tangan kita.

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 1: Kedaulatan Harus di Tangan Rakyat

Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik. Hal ini ditegaskan dengan jelas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1). Pada ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

UUD 1945 menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa *"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."* Pada ayat (2) disebutkan bahwa *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Dua kalimat singkat ini adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia.

Artinya, negara ini sejatinya milik rakyat. Pemerintah, lembaga negara, dan para pejabat hanyalah pengelola rumah besar bernama Indonesia. Sementara, pemilik rumah itu adalah kita semua, rakyat.

Seperti rumah yang dibangun untuk melindungi penghuninya dari panas, hujan, dan ancaman, negara pun dibentuk untuk melaksanakan tiga fungsi utama.

Pertama, melindungi rakyat dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, sekaligus menjamin hak-hak dasar warga.

Kedua, melayani rakyat melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan birokrasi yang adil serta efisien.

Ketiga, mengatur kehidupan bersama dengan hukum dan kebijakan yang adil agar tercipta keteraturan sosial.

Namun kenyataan hari ini menunjukkan hal yang berbeda. Rumah bernama Indonesia mengalami

kerusakan di banyak sisi. Atap bocor karena MPR bukan lagi lembaga tertinggi sejak amandemen UUD 1945 ketiga pada tahun 2001, sehingga kebijakan negara mudah dipengaruhi kepentingan segelintir orang.

Bukti-bukti nyata pun sudah tercatat. Setidaknya terdapat 176 kasus malfungsi lembaga negara dalam dua dekade terakhir *(Data yang dihasilkan melalui Chat GPT)*.

Kasus-kasus tersebut tidak hanya muncul di satu sektor, melainkan hampir di semua ruang rumah negara: kejaksaan, kementerian, pengadilan, DPR, bahkan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK. Artinya, yang rusak bukan sekadar satu ruangan, melainkan hampir seluruh bangunan.

Dalam kondisi ini, rakyat sering melontarkan dua pertanyaan. Pertama, apakah cukup dengan mengganti presiden. Kedua, apakah cukup dengan menunggu pemilu lima tahunan. Kedua pertanyaan ini wajar muncul karena rakyat berharap ada jalan keluar. Namun jawaban yang jujur adalah tidak cukup.

Kerusakan yang kita hadapi bersifat sistemik, melibatkan lembaga, birokrasi, budaya politik, hingga moral bangsa. Mengganti presiden tanpa membenahi fondasi sama saja seperti mengganti penghuni rumah yang atapnya bocor, dindingnya retak, dan saluran airnya mampet. Masalah tidak selesai, hanya berpindah wajah.

Kerusakan ini tidak boleh dibiarkan. Rumah bernama republik masih bisa diperbaiki, asalkan kita berani mengakui kerusakan apa adanya dan bersama-sama mencari jalan keluarnya.

Buku ini akan menelusuri sepuluh analogi kerusakan negara. Dari tubuh manusia yang matanya tertutup, keluarga yang retak, rumah yang rusak, hingga tubuh bangsa yang sakit kronis.

Setiap analogi tidak hanya akan menunjukkan kondisi ideal dan kenyataan pahit hari ini, tetapi juga menawarkan arah solusi. Karena tujuan akhir dari refleksi ini bukan hanya memahami kerusakan, melainkan menemukan cara untuk memulihkan rumah kita bersama: Republik Indonesia.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 2: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Tubuh Manusia

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Terbuka



SCAN ME

Gambar 1. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Manusia dengan Mata Terbuka

Negara Indonesia seharusnya berjalan seperti tubuh manusia yang sehat dengan mata terbuka. Setiap organ mempunyai fungsi yang jelas dan saling melengkapi, sehingga tubuh dapat bergerak teratur menuju tujuan yang sama.

SHIKSHAVATI RAJANITIVIDAM

Kepala Ibarat MPR

Dalam tubuh republik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah kepala yang memegang keputusan tertinggi. Kepala menentukan arah pandangan, ke mana tubuh harus melangkah, dan bagaimana mata melihat jalan di depan.

MPR berperan sebagai representasi kedaulatan rakyat, sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, seharusnya MPR merupakan mandataris rakyat yang berkewajiban mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Badan Ibarat DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai pengawas. Dalam tubuh manusia, fungsi ini dapat diibaratkan sebagai badan yang mengontrol gerakan. Badan menghubungkan kepala dan kaki bergerak sesuai arah, tidak merugikan organ lain, dan tidak melukai diri sendiri. Dengan pengawasan yang kuat, tubuh tetap seimbang dan terhindar dari bahaya.

Kaki Ibarat Presiden

Presiden adalah pengurus sekaligus pelaksana, ibarat tangan dan kaki yang bekerja menjalankan keputusan. Presiden bukanlah kepala, melainkan organ pelaksana yang bergerak sesuai arahan. Tugasnya mengurus kebutuhan rakyat, menjalankan kebijakan, dan memastikan arah yang ditetapkan oleh kepala benar-benar diwujudkan.

Jika semua organ ini bekerja sesuai fungsi, maka tubuh bernama Republik Indonesia akan berdiri tegak, berjalan lurus, dan sehat. Mata yang terbuka melambangkan kesadaran kolektif bangsa untuk melihat kenyataan, membaca situasi, dan menentukan langkah bijak ke depan.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Tertutup

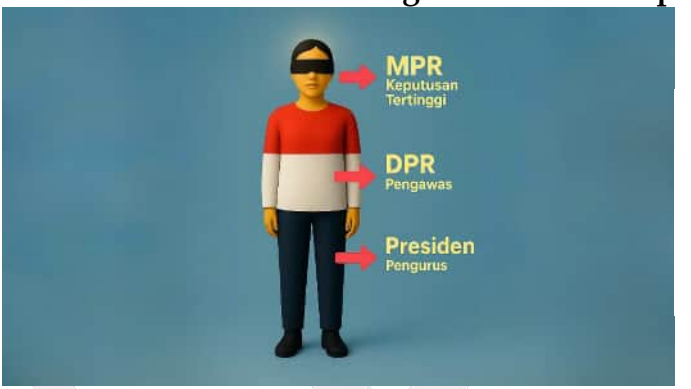

SCAN ME

Gambar 2. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Manusia Dengan Mata Tertutup

Tubuh manusia yang matanya tertutup tetap bisa bergerak, tetapi langkahnya tidak jelas, sering tersandung, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Begitulah kondisi negara Indonesia hari ini.

Kepala Ibarat MPR

Pertama, MPR kehilangan fungsi sebagai kepala. Sejak amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kepala yang seharusnya menentukan arah malah kehilangan kendali. Akibatnya, arah bangsa lebih sering ditentukan oleh kompromi jangka pendek. MPR yang semestinya mewakili kedaulatan rakyat justru tidak mampu menegakkan wibawanya.

Contoh terbaru adalah kasus di Sekretariat Jenderal MPR yang menyeret Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka KPK pada 2025. Kepala yang seharusnya jernih justru ikut sakit, menambah gelap pandangan tubuh republik.

Badan Ibarat DPR

Kedua, DPR yang seharusnya menjadi badan pengendali sering mati rasa. Fungsi pengawasan melemah, bahkan kerap lumpuh karena kepentingan partai dan transaksi politik. Banyak anggota DPR justru terseret kasus korupsi, dari periode ke periode.

Setya Novanto, Ketua DPR periode 2014–2017, divonis bersalah dalam kasus e-KTP. Ada pula puluhan anggota DPR lain yang terbukti melakukan korupsi, dari kasus suap hingga penyalahgunaan anggaran. Badan yang seharusnya mengontrol gerak malah rusak, sehingga tangan dan kaki bebas melangkah meski arahnya salah.

Selain kasus hukum, perilaku anggota DPR dalam keseharian juga memprihatinkan. Pada pertengahan Agustus 2025 publik dikecewakan dengan kenaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Rakyat turun ke jalan untuk berdemo, menolak keputusan yang dianggap tidak peka. Namun alih-alih mendengar, sebagian anggota DPR justru terlihat joget-joget saat sidang dan bahkan ada yang menghina rakyat dengan sebutan tolol.

Perilaku ini semakin menegaskan bahwa badan tidak hanya rusak, tetapi juga kehilangan rasa. Mereka tidak lagi peka terhadap penderitaan tubuh yang seharusnya mereka jaga.

Begitulah kondisi DPR hari ini: alih-alih mengawasi jalannya tubuh republik, mereka justru menambah beban dengan sikap arogan dan keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kaki Ibarat Presiden

Ketiga, Presiden sebagai pelaksana sering bertindak seolah kepala. Dalam kondisi kepala tidak berfungsi dan syaraf pengawas melemah, tangan dan kaki bergerak sendiri. Presiden tidak hanya menjalankan keputusan, tetapi juga menentukan arah kebijakan tanpa kontrol memadai.

Akibatnya, kekuasaan terkonsentrasi di satu organ. Tubuh bergerak cepat, tetapi kerap salah arah. Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai kebijakan besar yang diputuskan sepihak, lalu menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Pemilik Tubuh Ibarat Rakyat

Rakyat sebagai pemilik tubuh kehilangan kesadaran kolektif. Dalam tubuh manusia, darah harus mengalir lancar agar organ tetap hidup. Namun dalam tubuh republik, suara rakyat sering tersumbat oleh korupsi dan birokrasi yang macet.

Rakyat baru benar-benar "dibutuhkan" saat pemilu, setelah itu suaranya dikesampingkan. Padahal data menunjukkan 176 kasus malfungsi lembaga negara dalam dua dekade terakhir , yang semuanya merugikan rakyat sebagai pemilik sejati negara.

Tubuh dengan mata tertutup inilah gambaran nyata Indonesia hari ini. Kita memang masih bergerak, tetapi tanpa panduan yang jelas. Tubuh republik ini berjalan dalam kegelapan, padahal di depannya ada banyak jurang yang siap menelan.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Manusia



SCAN ME

Gambar 3. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Manusia

Tubuh manusia hanya bisa berjalan dengan baik jika matanya terbuka. Namun hari ini, kondisi Indonesia diibaratkan tubuh manusia dengan mata tertutup. Kepala ada, tetapi kehilangan pandangan.

Dalam keadaan ini, solusi utama adalah membuka penutup mata. Penutup mata ini hanya bisa dilepas oleh negarawan sejati. Negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik.

Mereka berkomitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dalam merancang kebijakan negara serta memastikan bahwa pengelolaan urusan negara dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Negarawan dengan kualitas seperti ini dapat lahir dari empat pilar negara:

- Intelektual yang menjadi cahaya pengetahuan, memberikan arah dengan gagasan yang jernih dan berpihak pada rakyat.
- Budayawan dan tokoh adat yang menjaga jati diri bangsa agar Indonesia tidak kehilangan akar dan nilai luhur.
- Rohaniawan yang berperan sebagai kompas moral, memastikan setiap langkah negara dipandu oleh etika dan keadilan.
- TNI dan Polri yang menjaga bangsa tetap aman dari ancaman, dengan sikap netral dan keberanian menjaga rakyat.

Jika keempat pilar ini bersatu dan dipimpin oleh negarawan sejati, maka penutup mata dapat terlepas. Saat mata terbuka, kepala kembali mengarahkan dengan benar, badan berfungsi mengontrol gerak, dan kaki bekerja sesuai kebutuhan tubuh.

Dalam konteks Indonesia, MPR harus kembali memegang keputusan tertinggi sebagai wujud kedaulatan rakyat, DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan transparan, sementara Presiden melaksanakan keputusan dengan disiplin sebagai pengurus, bukan penguasa.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 4. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup?

Pertanyaan yang sering muncul dari rakyat adalah: *apakah cukup mengganti presiden untuk memperbaiki keadaan Indonesia*.

Pertanyaan ini wajar, karena presiden dipandang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam praktik sehari-hari.

Namun jawabannya jelas: tidak cukup. Mengganti presiden tanpa memperbaiki persoalan utama sama saja seperti mengganti kaki pada tubuh manusia yang sedang berjalan dengan mata tertutup.

Kaki baru mungkin lebih kuat, lebih segar, atau lebih cepat, tetapi tetap akan tersandung jika matanya tidak dibuka.

Masalah utama Indonesia bukan hanya siapa yang duduk di kursi presiden, melainkan sistem yang membuat kepala tidak lagi mengarahkan, syaraf pengawas mati rasa, dan mata tetap tertutup dari kenyataan. Selama penutup mata itu tidak dilepas,

tubuh akan tetap berjalan dalam gelap. Kaki boleh berganti berkali-kali, tetapi arah langkah tidak akan berubah.

Pertanyaannya, mungkinkah tubuh manusia rela terus mengganti kakinya, padahal masalah sebenarnya ada di penutup mata. Tentu tidak. Justru yang harus dilakukan adalah membuka mata, agar kepala dapat melihat jelas, badan bisa bekerja, dan kaki melangkah dengan mantap.

Begitu pula dengan Indonesia. Solusi bukan sekadar mengganti presiden setiap lima tahun sekali, tetapi mengembalikan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai perannya, menghadirkan negarawan sejati, dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar dijalankan. Tanpa itu semua, presiden hanya menjadi kaki baru yang tetap tersandung karena berjalan dalam kegelapan.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 5. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup

Jika kita menelaah lebih dalam, anggapan hanya cukup mengganti presiden terlalu menyederhanakan persoalan. Presiden memang penting, tetapi ia bukan satu-satunya penentu arah bangsa.

Ada sistem, lembaga, dan fungsi kenegaraan lain yang sama krusial. Karena itu, orang yang merasa cukup dengan hanya mengganti presiden sesungguhnya sedang terjebak pada ilusi perubahan.

- **Tipe Si Pemuja Tokoh:** Rakyat yang berpikir seperti ini dapat dipetakan ke Tipe Si Pemuja Tokoh. Tipe ini menaruh seluruh harapan pada figur presiden. Mereka percaya perubahan besar hanya bisa datang dari tokoh yang mereka idolakan. Bagi mereka, jika tokoh itu naik, maka Indonesia akan baik; jika tokoh itu turun, maka Indonesia akan rusak. Cara pandang seperti ini sesungguhnya menutup mata terhadap akar persoalan sistem. Mereka lupa bahwa presiden hanyalah kaki yang berjalan, sementara mata dan kepala tidak boleh absen dari fungsinya.
- **Penjaga *Status Quo***: Mereka sadar ada kerusakan, tetapi lebih memilih mempertahankan keadaan. Bagi mereka, cukup ganti figur di kursi presiden agar tampak ada perubahan, meski akar masalah tetap dibiarkan.
- **Penghibur Kosmetik:** Mereka menutupi kerusakan dengan polesan citra dan hiburan. Mereka mendukung narasi "asal presidennya baru, pasti membaik," padahal itu hanya menukar wajah, bukan memperbaiki isi.

- **Penolak Realitas:** Mereka menyangkal bahwa masalah negara bersifat sistemik. Mereka menyederhanakan masalah seakan semua selesai bila presidennya "orang baik.

Baik rakyat maupun figur empat pilar, ketika terjebak pada pola pikir ini, sesungguhnya sama-sama memelihara ilusi. Mereka sibuk menunggu atau menuntut pergantian figur, padahal penutup mata belum dilepas. Tubuh Indonesia tetap berjalan dalam gelap, tersandung berkali-kali.

Karena itu, jawabannya jelas yaitu mengganti presiden tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah membuka mata Indonesia, mengembalikan fungsi lembaga negara sesuai perannya, dan menghadirkan negarawan sejati yang mampu menuntun bangsa keluar dari kebuntuan sistem.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 6. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Mata Tertutup?

Pemilu sering dipandang sebagai jawaban atas semua masalah bangsa. Banyak orang percaya bahwa cukup menunggu lima tahun sekali, lalu dengan mengganti pemimpin melalui pemilu, keadaan akan membaik. Anggapan ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya menyesatkan.

Pemilu memang penting, tetapi pemilu hanyalah alat, bukan tujuan. Pemilu dapat melahirkan presiden baru, anggota DPR baru, dan wajah-wajah baru dalam pemerintahan.

Namun, jika sistem yang melingkupinya tetap rusak, maka figur-figur baru itu tidak akan mampu membawa perubahan mendasar. Tubuh manusia dengan mata tertutup tetap akan berjalan tersandung, meski setiap lima tahun kakinya diganti.

Menunggu pemilu lima tahunan berarti membiarkan kerusakan berlangsung tanpa perlawanan di antara masa itu. Padahal, kerusakan tidak menunggu lima tahun untuk berkembang.

Korupsi terus merajalela, birokrasi semakin berbelit, hukum mudah diperdagangkan, dan lembaga negara makin jauh dari fungsi aslinya.

Bila rakyat hanya pasif menunggu, maka setiap periode lima tahun yang dilewati justru semakin memperparah keadaan.

Perubahan sejati hanya mungkin terjadi bila kesadaran kolektif dibangkitkan sejak sekarang, tidak menunggu momentum pemilu.

Rakyat harus terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menuntut keadilan, serta memastikan lembaga negara bekerja sesuai fungsi.

Tekanan publik, gerakan sosial, dan kontrol moral jauh lebih penting daripada sekadar menunggu bilik suara dibuka lima tahun sekali.

Karena itu, jawabannya jelas: tidak cukup menunggu pemilu lima tahunan. Tanpa membenahi sistem dan membuka "penutup mata" yang membuat negara berjalan dalam gelap, maka setiap hasil pemilu hanya akan mengulang lingkaran kerusakan.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 7. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mata Tertutup

Pola pikir ini muncul dari keyakinan bahwa tugas rakyat hanya hadir di bilik suara setiap lima tahun.

Setelah itu, mereka tinggal menunggu perubahan datang dengan sendirinya. Padahal, selama lima tahun itu kerusakan sistem tetap berjalan, bahkan semakin parah.

- **Si Penonton Pasif:** Mereka melihat (kejahatan) politik seperti tontonan yang rutin hadir lima tahunan. Setelah memilih, mereka kembali sibuk dengan urusan pribadi dan tidak peduli lagi pada pengawasan negara.
- **Si Korban Abadi:** Mereka pasrah dengan kesulitan hidup yang menimpa, sambil menggantungkan harapan pada pemilu berikutnya. Mereka percaya bahwa penderitaan akan hilang begitu presiden baru terpilih, padahal akar masalah lebih dalam dari sekadar figur.
- **Penjaga Status Quo:** Mereka tahu sistem sedang bermasalah, tetapi memilih mempertahankannya. Pemilu lima tahunan dijadikan alasan untuk membenarkan sikap pasif. Dengan dalih "nanti juga ada pemilu," mereka menolak langkah-langkah perubahan yang lebih mendasar.

Dengan demikian, pola pikir menunggu pemilu lima tahunan bukanlah jalan keluar. Ia hanya membuat rakyat menjadi penonton pasif atau korban abadi, sementara sebagian figur 4 pilar sibuk menjaga status quo.

Bab 3: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Keluarga

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Keluarga Bahagia

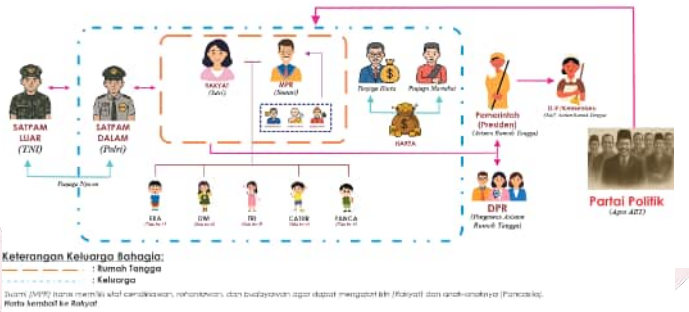

SCAN ME

Gambar 8. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Keluarga Bahagia

Negara Indonesia yang ideal dapat dibayangkan seperti sebuah keluarga yang bahagia. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran yang jelas, saling melengkapi, dan bersama-sama menjaga keharmonisan. Begitu pula negara: setiap lembaga harus menjalankan fungsinya agar kehidupan rakyat berlangsung adil, tertib, dan sejahtera.

Sebuah rumah tangga terdiri dari suami dan istri. Dalam keluarga, ada suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga. Dari hubungan keduanya lahirlah anak-anak yang menjadi harapan masa depan.

Kehidupan keluarga pun dilengkapi dengan asisten rumah tangga (ART) yang membantu pekerjaan sehari-hari, serta satpam yang menjaga keamanan.

Semua punya peran yang jelas, saling melengkapi, dan tidak saling menindas.

Dalam kehidupan bernegara, suami adalah MPR sebagai kepala keluarga. Ia memegang arah dan keputusan tertinggi, penentu cita-cita bangsa. Agar bisa menjalankan peran itu, MPR harus memiliki sifat seorang negarawan: berilmu seperti intelektual, berakar pada budaya, dan teguh dalam spiritualitas.

Istri adalah rakyat sebagai kepala rumah tangga. Rakyatlah pusat kehidupan bangsa. Dari rahim rakyat lahir aspirasi, kebutuhan, dan harapan yang menjadi dasar keputusan negara. Rakyat tidak boleh dipinggirkan, karena ia adalah pemilik rumah tangga Indonesia.

Dari hubungan antara suami (MPR) dan istri (rakyat) lahirlah anak-anak, yaitu Pancasila. Pancasila adalah jiwa, buah hati, dan masa depan bangsa yang harus dirawat, dididik, dan dijaga agar selalu hidup dalam setiap generasi.

Untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, negara memiliki presiden sebagai asisten rumah tangga (ART). Presiden bukan kepala keluarga dan bukan kepala rumah tangga, melainkan pekerja yang membantu melaksanakan urusan sesuai arahan suami (MPR) dan istri (rakyat). Ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang, sebab tugasnya hanyalah melayani dan mengurus.



Gambar 9. Ilustrasi Presiden adalah Kepala ART

ART ini direkrut melalui agen ART, yang dalam kehidupan bernegara adalah partai politik. Dalam keluarga yang sehat, agen ART hanya merekomendasikan asisten yang memiliki bibit, bobot, dan bebet yang jelas.

Dengan kata lain, mereka tidak asal menyalurkan tenaga kerja, melainkan memastikan ART terlatih dan siap menjalankan tanggung jawab.

Begitu juga parpol yang seharusnya menjalankan pendidikan politik, mencetak calon-calon ART yang berkualitas, dan memilih presiden yang benar-benar layak membantu rakyat serta menjalankan amanah bangsa.

Kehidupan keluarga juga memerlukan penjaga keamanan. Di tingkat negara, TNI adalah satpam luar rumah yang melindungi dari ancaman eksternal, sementara Polisi adalah satpam dalam rumah yang

menjaga keamanan internal. Keduanya adalah penjaga nyawa agar keluarga bangsa bisa hidup tenang.



Gambar 10. Ilustrasi Keluarga Bahagia

Jika semua peran ini berjalan sebagaimana mestinya, maka terwujudlah keluarga ideal. Suami (MPR) bijak memimpin, istri (rakyat) menjadi pusat kehidupan, anak-anak (Pancasila) tumbuh sehat, presiden (ART) melayani dengan setia, parpol (agen ART) mendidik dan menyeleksi dengan serius, serta TNI–Polri (satpam) menjaga keselamatan.

Dalam kondisi seperti itu, bukan hanya kehidupan keluarga yang harmonis, tetapi juga harta kekayaan bangsa akan terjaga, dan martabat negara akan tetap tinggi. Tidak ada anggota keluarga yang hidup dalam ketakutan atau kekurangan, dan tidak ada kehormatan bangsa yang diinjak-injak. Inilah gambaran Indonesia ideal: keluarga besar yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Keluarga Broken Home

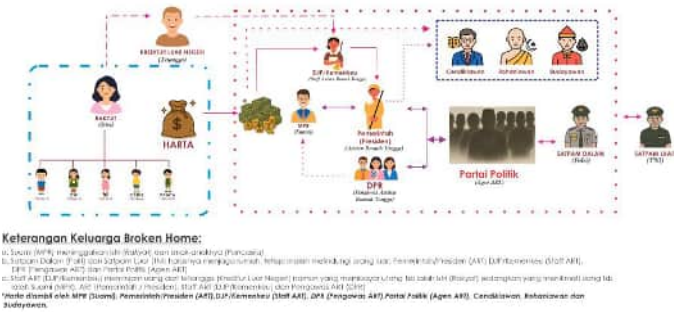

SCAN ME

Gambar 11. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Keluarga Broken Home

Sejak amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan diubah menjadi lembaga tinggi. Perubahan ini dimaksudkan agar kekuasaan lebih merata dan demokratis agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan seperti sebelumnya.

Namun kenyataannya, perubahan ini justru meninggalkan ruang kosong. Kontrol dan pengawasan menjadi lemah, tanggung jawab menjadi kabur, dan negara kini seperti sebuah keluarga yang retak, sebuah keluarga *broken home*.

Rakyat diibaratkan sebagai istri yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Kenyataannya, rakyat sering terabaikan, aspirasi mereka diabaikan, dan mereka menjadi korban dari sistem yang tidak adil.



Gambar 12. Ilustrasi suami (MPR) selingkuh dengan ART (Pemerintah)

MPR sebagai suami sekaligus mandataris rakyat tampak seperti berselingkuh dengan Presiden, yang dalam analogi ini adalah asisten rumah tangga.

Alih-alih mengutamakan rakyat, MPR meninggalkan tanggung jawabnya. Hubungan yang salah kaprah ini mengganggu keseimbangan rumah tangga negara.

Pancasila, anak dari keluarga ini, seharusnya dibimbing, dididik, dan dijaga. Namun Pancasila terlupakan. Nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi moral hanya menjadi slogan. Generasi bangsa pun tumbuh kehilangan arah dan pegangan yang kuat.



Gambar 13. Ilustrasi Rumah Tangga Rakyat dan MPR yang Retak

Rumah tangga antara rakyat dan MPR terlihat retak. Kepercayaan hilang, konflik muncul, dan rakyat merasa tidak aman. Keluarga yang lengkap dengan rakyat, MPR, dan Pancasila menjadi rapuh.

Anak kehilangan asuhan, rakyat kehilangan perlindungan, dan struktur yang seharusnya kokoh justru goyah.

Ini mencerminkan bagaimana negara, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, kini tampak lemah dan tidak harmonis.

Presiden yang seharusnya menjadi asisten atau pendamping pemerintah, malah menikahi MPR dalam analogi ini, menyalahi struktur, dan mengalihkan perhatian dari rakyat ke kekuasaan semu.

DPR, yang seharusnya menjadi pengawas, sering membiarkan hubungan yang salah ini tetap berjalan,

bahkan mengambil keuntungan atas kerusakan yang terjadi.

Partai politik, yang seharusnya menjadi agen pelayan rakyat, justru menentukan jalannya permainan sesuai kepentingan sendiri. Membiarkan rakyat menderita demi keuntungan agen supaya dapat tercapai.

TNI dan Polri yang berperan sebagai satpam keluarga terjebak menjaga status quo. Perlindungan terhadap rakyat menjadi sekadar formalitas.

Lembaga tinggi negara yang adil dan independen, yang seharusnya menjadi pelindung terakhir rakyat, tidak hadir. Keadilan sulit ditemukan, harta dirampas, martabat diinjak.

Secara keseluruhan, negara kita kini seperti keluarga broken home. Rapuh, kehilangan fondasi, dan anggota-anggotanya tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya.

Negara yang ideal seharusnya menjadi rumah yang aman bagi rakyat, tempat anak Pancasila tumbuh dengan benar, dan semua anggota saling melindungi. Saat ini rumah itu retak dan panggilan untuk memperbaikinya semakin mendesak.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Keluarga



SCAN ME

Gambar 14. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Keluarga

Jika negara dianalogikan sebagai keluarga, maka memperbaiki kondisi bangsa sama dengan memperbaiki rumah tangga yang retak.

Kuncinya bukan hanya mengganti anggota tertentu, tetapi memulihkan hubungan inti dalam keluarga.

Yang pertama harus dilakukan adalah memulihkan pernikahan inti keluarga, yaitu hubungan antara MPR dan rakyat. MPR sebagai suami dan mandataris rakyat harus menikah kembali dengan rakyat.

Artinya, MPR harus setia kepada rakyat, menepati janji untuk melindungi, membimbing, dan bekerja demi kepentingan rakyat. Tanpa fondasi ini, perubahan lain hanya bersifat sementara.

Rakyat sebagai istri harus menjadi pusat perhatian dan pemegang kedaulatan. Semua kebijakan negara harus berawal dari kepentingan rakyat, bukan dari kepentingan pihak lain.

Rakyat yang kuat adalah jantung keluarga yang menyalakan kehidupan seluruh anggota keluarga.

Pancasila sebagai anak harus dibimbing dengan benar oleh MPR dan rakyat. Nilai-nilai Pancasila harus dijaga dalam setiap kebijakan negara dan menjadi fondasi moral keluarga, sehingga anak dapat tumbuh sehat dan menjadi pedoman generasi bangsa.

Presiden, yang diibaratkan asisten rumah tangga, harus difungsikan sesuai perannya: melayani rakyat, membantu mengatur rumah tangga (negara), dan tidak mencari kekuasaan atau keuntungan pribadi.

Presiden yang menjalankan fungsi dengan benar akan membantu memperkuat keharmonisan keluarga.

DPR sebagai pengawas asisten rumah tangga harus kembali ke tugas aslinya: mengawasi Presiden. DPR harus berada di bawah arahan MPR, bukan Presiden, sehingga kontrol berjalan objektif dan tidak menyokong hubungan yang salah kaprah.

Partai politik sebagai agen keluarga boleh menyodorkan calon presiden, kepala daerah, atau anggota DPR, tetapi semua calon harus disensor dan direstui MPR terlebih dahulu, lalu dipilih oleh rakyat. Dengan cara ini, agen keluarga tidak menjadi pemain utama yang merusak keseimbangan.

TNI sebagai satpam luar rumah harus kembali ke fungsi utama: menjaga kedaulatan dari ancaman eksternal dan tidak ikut campur urusan domestik rakyat.

Sedangkan, Polri sebagai satpam dalam rumah harus melindungi rakyat dari kejahatan sehari-hari

secara humanis, menjaga keamanan internal, dan tidak menjadi alat kekuasaan semata.

Lembaga tinggi negara sebagai pelindung harta dan martabat keluarga harus dibangun independen dan berfungsi melindungi nyawa, harta, dan martabat rakyat.

Contohnya seperti Dewan Keamanan Negara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, Badan Pengelola Sumber Daya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dengan keberadaan lembaga ini, rakyat memiliki benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.

Dengan solusi ini, "keluarga negara" bisa kembali sehat:

- MPR setia pada rakyat,
- Presiden jadi pelayan,
- DPR jadi pengawas yang benar,
- TNI-Polri fokus sebagai pelindung,
- Partai politik hanya jadi agen, bukan penguasa,
- Pancasila jadi anak yang tumbuh sehat,
- Rakyat (istri) akhirnya terlindungi harta, nyawa, dan martabatnya.

SEKOLAH NEGARAWAN SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 15. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home?

Banyak orang berpikir bahwa mengganti Presiden akan langsung memperbaiki kondisi negara. Padahal kenyataannya, memperbaiki asisten rumah tangga saja tidak cukup jika hubungan inti dalam keluarga tetap salah. Masalah utama bukan pada Presiden, melainkan pada suami, yaitu MPR. Saat ini, MPR "menikah" dengan Presiden, bukan dengan rakyat. Jadi meskipun asistennya diganti dengan yang lebih baik, struktur pernikahan inti tetap salah dan rumah tangga tetap rapuh.

Selain itu, agen asisten rumah tangga, yaitu partai politik, masih memainkan peran yang terlalu besar. Partai-partai ini menguasai akses untuk memilih atau mengajukan calon Presiden. Jika MPR tidak mengawasi dan menyaring agen ini, siapapun yang dipilih tetap menjadi titipan kepentingan partai, bukan pelayan sejati rakyat. Kondisi ini membuat perubahan

Presiden menjadi semu, karena struktur dan kekuasaan di balik layar masih sama.

Pengawas dan satpam keluarga, DPR serta TNI-Polri, juga masih berpihak pada struktur yang salah. DPR bukannya mengawasi Presiden, tetapi justru melindungi hubungan yang tidak seharusnya antara MPR dan Presiden.

Satpam keluarga, yaitu TNI dan Polri, ikut menjaga status quo, bukan benar-benar melindungi rakyat. Akibatnya, rumah tangga negara tetap tidak harmonis dan keamanan rakyat tidak dijaga dengan optimal.

Anak keluarga, yaitu Pancasila, tetap terabaikan. Karena suami (MPR) dan istri (rakyat) tidak bersatu, anak ini tidak bisa tumbuh sehat dan kuat, meskipun asistennya rajin bekerja. Nilai-nilai dasar bangsa tetap rawan terlupakan jika fondasi keluarga tidak diperbaiki terlebih dahulu.

Oleh karena itu, agar keluarga negara bisa kembali bahagia, yang harus dipulihkan bukan hanya asistennya, tetapi pernikahan inti antara MPR dan rakyat. Jika MPR kembali setia kepada rakyat, barulah Presiden bisa difungsikan sebagai pelayan sejati yang membantu mengatur rumah tangga negara, bukan menjadi pihak yang menambah kekacauan. Dengan demikian, DPR dapat mengawasi dengan benar, TNI dan Polri bisa menjalankan fungsi sebagai pelindung, dan anak Pancasila dapat tumbuh sehat sebagai fondasi moral bangsa.

Dengan solusi ini, keluarga negara bisa kembali sehat. MPR kembali setia pada rakyat, Presiden menjadi

pelayan sejati, DPR menjalankan tugas pengawasan dengan benar, TNI dan Polri fokus sebagai pelindung, partai politik hanya berperan sebagai agen, Pancasila tumbuh menjadi anak yang sehat, dan rakyat akhirnya terlindungi harta, nyawa, serta martabatnya.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 16. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home

Di tengah diskusi perbaikan negara, ada Tipe yang meyakini bahwa cukup mengganti Presiden untuk memperbaiki semua masalah. Mereka percaya bahwa asisten rumah tangga baru akan menata rumah, membersihkan kekacauan, dan membuat keluarga negara kembali harmonis. Pola pikir ini terlihat sederhana dan menggoda, karena secara instan tampak seperti solusi.

Tipe ini sebenarnya terdiri dari beberapa tipe. Di antaranya:

- **Tipe Fokus Figur (Leader-Centric):** Mereka percaya perubahan tergantung pada satu orang.

Dalam analogi keluarga, mereka seperti anggota keluarga yang mengira rumah tangga bisa baik hanya karena mengganti ART, tanpa peduli hubungan inti suami-istri.

- **Tipe Praktis dan Instan (Quick-Fix Oriented):** Mereka menginginkan solusi cepat dan mudah terlihat. Tidak sabar menunggu perubahan struktural atau membangun fondasi yang kuat.
- **Tipe Apatis terhadap Sistem (System-**Indifferent): Mereka kurang memperhatikan struktur lembaga negara, mekanisme checks and balances, atau peran partai, DPR, TNI, dan Polri. Yang penting terlihat ada "perubahan pemimpin".
- **Tipe Populis/Emosional (Populist-Emotive):** Mereka cenderung menilai berdasarkan citra atau popularitas Presiden. Pilihan mereka dipengaruhi emosi, sentimen, atau narasi media, bukan analisis sistemik.
- **Tipe Pasif (Waiting-for-Change):** Mereka menunggu pemilu lima tahunan sebagai solusi utama dan jarang mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan, kontrol, atau perbaikan lembaga negara.

Masalah dari pola pikir ini adalah mereka terlalu menekankan perubahan figur dibanding memperbaiki hubungan inti keluarga negara. Selama MPR masih "menikah" dengan Presiden, agen partai tetap mempengaruhi pemilihan Presiden, dan pengawas serta satpam keluarga masih berpihak pada status quo,

pergantian Presiden hanyalah solusi semu. Anak Pancasila tetap terabaikan, rakyat tetap tidak terlindungi sepenuhnya, dan fondasi moral serta hukum negara tetap rapuh.

Dengan kata lain, Tipe yang berpikir mengganti Presiden sudah cukup cenderung menunda tindakan yang lebih mendasar.

Mereka fokus pada solusi instan, padahal yang dibutuhkan adalah memperkuat hubungan inti antara MPR dan rakyat, memastikan agen dan pengawas bekerja sesuai fungsi, lalu baru menunjuk Presiden yang benar-benar melayani rakyat.

Sehingga, Hanya jika seluruh struktur diperbaiki, asisten rumah tangga bisa bekerja efektif dan keluarga negara benar-benar dapat bahagia.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 17. Ilustrasi Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Keluarga Broken Home?

Beberapa orang mungkin berpikir bahwa cukup membiarkan proses demokrasi berjalan dan menunggu pemilu lima tahunan. Namun, menunggu pemilu saja tidak cukup untuk memperbaiki rumah tangga negara yang retak. Analogi keluarga sangat relevan di sini.

Bayangkan sebuah keluarga di mana suami meninggalkan istri dan anak-anaknya, sementara asisten rumah tangga mencoba menata rumah. Jika anggota keluarga hanya menunggu lima tahun untuk mengganti asisten, apakah masalah utama benar-benar terselesaikan? Tidak. Masalahnya ada pada hubungan inti antara suami dan istri, antara MPR dan rakyat. Selama hubungan ini tidak diperbaiki, rumah tangga tetap rapuh dan anak-anak tetap terabaikan.

Menunggu pemilu tanpa perbaikan struktural juga memberi peluang bagi agen keluarga, yaitu partai politik, untuk tetap mengontrol proses. Mereka dapat mempengaruhi siapa yang menjadi calon Presiden atau pejabat negara, sehingga rakyat tetap tidak memiliki kendali penuh atas keluarganya sendiri.

Selain itu, pengawas dan satpam keluarga, DPR, TNI, dan Polri, juga tidak serta-merta akan berubah hanya karena pemilu. Tanpa adanya perbaikan fondasi dan komitmen MPR kepada rakyat, pengawasan tetap lemah dan perlindungan terhadap rakyat tetap tidak maksimal.

Artinya, menunggu pemilu lima tahunan tanpa upaya perbaikan segera sama saja dengan membiarkan rumah tangga retak terus berlangsung, hanya berharap asisten rumah tangga baru datang dan menyelesaikan masalah. Padahal inti masalah adalah pernikahan

antara MPR dan rakyat yang harus diperkuat sekarang, bukan lima tahun lagi.

Perbaikan rumah tangga negara membutuhkan tindakan aktif. MPR harus kembali setia pada rakyat, struktur kekuasaan harus dikembalikan ke fungsinya, dan semua anggota keluarga harus bekerja sesuai peran masing-masing. Jika langkah-langkah ini dilakukan sekarang, keluarga negara dapat mulai pulih, anak Pancasila dapat tumbuh sehat, dan rakyat terlindungi. Menunggu pemilu saja tanpa perbaikan struktural sama sekali tidak cukup.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan

Di tengah perdebatan tentang perbaikan negara, terdapat Tipe yang meyakini bahwa cukup mengganti Presiden untuk menyelesaikan semua masalah. Mereka berpikir bahwa asisten rumah tangga baru akan menata rumah, membersihkan kekacauan, dan membuat keluarga negara kembali harmonis. Pola pikir ini terlihat sederhana dan menggoda, karena secara instan tampak seperti solusi.

Tipe ini sebenarnya terdiri dari beberapa tipe. Di antaranya:

- **Tipe Legalistik-Prosedural (Legalistic-Procedural Type)**: Tipe ini percaya penuh bahwa jalan konstitusi formal, yaitu pemilu lima tahunan, adalah satu-satunya cara sah untuk memperbaiki negara. Mereka biasanya taat aturan dan sangat menghormati prosedur. Dalam analogi keluarga, tipe ini seperti anggota

keluarga yang yakin rumah tangga akan membaik hanya dengan menunggu pergantian asisten rumah tangga setiap lima tahun, tanpa melihat apakah hubungan suami-istri sudah diperbaiki. Mereka sering menutup mata terhadap fakta bahwa sistem pemilu dikuasai oleh partai yang sama, sehingga perubahan nyata tidak selalu terjadi.

- **Tipe Optimis-Naif (Naive-Optimistic Type)**: Tipe ini yakin rakyat bisa "menghukum partai busuk" melalui kotak suara. Mereka percaya bahwa setiap pemilu akan memberi kesempatan untuk perubahan besar. Dalam analogi keluarga, tipe ini seperti orang yang berharap ART baru akan memperbaiki rumah tangga sepenuhnya, padahal aturan pencalonan dan pengawasan tetap dikontrol oleh pihak yang sama. Mereka tidak menyadari bahwa sistem verifikasi partai, pencalonan, hingga KPU dan Bawaslu semua berada di bawah pengaruh partai lama.
- **Tipe Apatis-Pasif (Apathetic-Passive Type)**: Tipe ini sebenarnya tahu bahwa sistem sudah rusak, tapi malas mengambil risiko atau terlibat dalam perbaikan. Mereka berpikir "ya sudahlah, ikut alur saja, toh lima tahun cepat berlalu." Dalam analogi keluarga, tipe ini seperti anggota yang menyadari suami selingkuh, tapi memilih diam dan menunggu ART baru yang katanya akan menata rumah.
- **Tipe Status Quo Terselubung (Hidden-Status-Quo Type)**: Tipe ini biasanya terdiri dari elit atau

simpatisan partai yang diuntungkan dengan sistem yang ada. Mereka sengaja mendorong rakyat untuk bersabar sampai pemilu, supaya struktur dan mekanisme yang ada tidak diganggu. Dalam analogi keluarga, tipe ini seperti anggota keluarga yang sebenarnya senang suami selingkuh dan ART mengatur rumah sesuai kepentingan mereka, sehingga tidak ada yang berani merubah hubungan inti.

- **Tipe Pengalihan Emosional (Emotional-Displacement Type)**: Tipe ini menenangkan diri atau orang lain dengan harapan palsu. Mereka beranggapan bahwa perubahan radikal tidak diperlukan, cukup menunggu pemilu berikutnya. Dalam analogi keluarga, tipe ini seperti anggota yang berkata "tenang saja, ART baru sebentar lagi datang, pasti rumah tangga akan baik," padahal realitanya siklus rusak akan terus terulang.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 4: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Rumah

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Rumah Aman, Nyaman, dan Tenteram

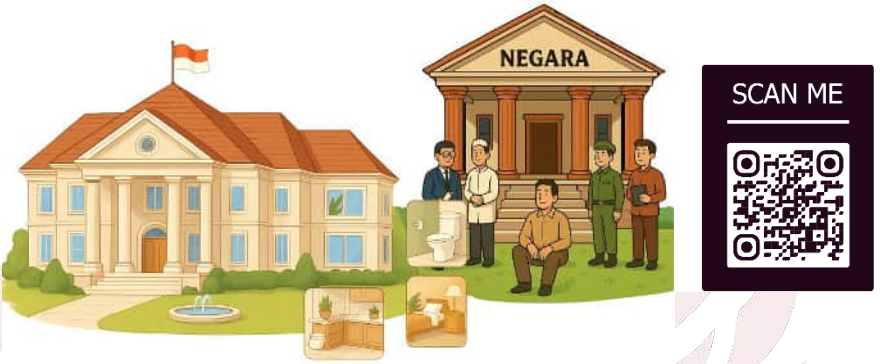

Gambar 18. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Rumah Aman, Nyaman, dan Tenteram

Negara yang baik ibarat sebuah rumah besar yang dihuni oleh banyak orang dengan latar belakang berbeda. Di dalamnya ada yang tua dan muda, kaya dan sederhana, dengan kebiasaan dan pandangan yang beraneka ragam. Meski berbeda, semua penghuni memiliki harapan yang sama: tinggal di tempat yang aman, nyaman, dan tenteram.

Untuk mewujudkan rumah seperti itu, setiap bagian bangunan perlu berfungsi sebagaimana mestinya. Atap harus melindungi, fondasi harus kokoh, saluran air harus lancar, dan listrik harus stabil. Tanpa keselarasan antar bagian, rumah akan mudah rusak dan penghuninya tidak akan merasa damai.

Begitu pula dengan Indonesia. Kehidupan bernegara memerlukan kerja sama dari berbagai

lembaga, pemimpin, dan rakyat. Masing-masing memiliki peran yang tak tergantikan. Ketika satu elemen lemah atau diabaikan, dampaknya akan terasa ke seluruh penjuru kehidupan bangsa.

Analogi rumah berikut membantu menggambarkan bagaimana setiap institusi negara dan kesadaran rakyat memiliki peran layaknya bagian penting sebuah bangunan. Dari atap hingga fondasi, dari ventilasi hingga dapur, semua unsur berhubungan erat membentuk rumah besar bernama Indonesia.

Atap Ibarat MPR

Atap melindungi rumah dari hujan dan terik matahari. Perannya serupa dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjaga arah dan menegakkan konstitusi. Atap yang kokoh memastikan seluruh penghuni terlindungi ketika badai politik atau gejolak sosial datang. Dengan MPR yang kuat, kedaulatan rakyat terjaga dan ruang bagi koruptor tertutup rapat.

Saluran Ibarat Presiden

Saluran air yang lancar membuat rumah tetap bersih dan sehat. Presiden yang tangguh berperan layaknya saluran utama kebijakan, memastikan program pembangunan mengalir merata hingga ke pelosok. Jika saluran tersumbat, masalah akan menumpuk seperti air yang menggenang. Saluran yang baik berarti keputusan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan "banjir" baru.

WC Ibarat Hukum

WC yang berfungsi baik mencegah timbulnya bau busuk. Begitu pula sistem hukum yang adil menjaga agar ketidakadilan tidak meracuni kehidupan bersama. Ketika hukum bekerja secara bersih maka proses peradilan transparan dan aparat tidak bisa disuap, persoalan sosial pun dapat diselesaikan tanpa meninggalkan jejak kebusukan moral.

Pagar Ibarat TNI-Polri

Pagar rumah melindungi penghuni dari ancaman luar sekaligus memberi rasa aman. TNI-Polri adalah pagar it yang harusnya kokoh, tegap, dan berfungsi menjaga ketertiban. Pagar yang baik tidak menindas penghuni, melainkan mengayomi mereka, sambil tetap sigap menghadapi ancaman dari luar.

Suasana Rumah Ibarat Kesadaran Rakyat

Rumah yang indah belum tentu terasa hidup tanpa kehangatan penghuninya. Kesadaran rakyat menghadirkan kehangatan itu melalui cinta tanah air, gotong royong, dan solidaritas sosial. Saat rasa memiliki tumbuh, rumah besar bernama Indonesia bukan hanya tegak berdiri, tetapi juga menjadi tempat yang penuh kasih dan kebersamaan.

Listrik dan Air Ibarat Pajak

Rumah memerlukan listrik dan air yang terjaga. Sistem pajak yang sehat adalah sumber energi dan aliran kehidupan negara. Ketika pajak dikelola secara

transparan dan adil, pelayanan publik mengalir seperti air bersih dan listrik menyala tanpa gangguan. Kebocoran pajak sama halnya dengan pipa bocor atau kabel korslet yang menciptakan masalah dan menghambat kenyamanan bersama.

Fondasi Ibarat UUD 1945

Fondasi adalah penopang seluruh bangunan. Dalam kehidupan bernegara, UUD 1945 memegang peran itu. Fondasi yang kuat memastikan negara tetap tegak menghadapi guncangan. Amandemen yang bijak bukanlah merobohkan rumah, melainkan memperkuat dasarnya agar tetap relevan dan tahan lama.

Ventilasi Ibarat DPR

Ventilasi menjaga sirkulasi udara agar rumah tidak pengap. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyalurkan aspirasi rakyat sebagaimana ventilasi mengalirkan udara segar. Ketika fungsi ini berjalan baik, demokrasi tetap bernapas, dan kehidupan politik terasa sejuk bagi seluruh warga.

Dapur Ibarat Kemenkeu/DJP

Dapur adalah tempat mengolah bahan mentah menjadi makanan bergizi. Begitu pula Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak mengelola anggaran agar kebutuhan rakyat tercukupi. Dapur yang rapi dan bersih memastikan hidangan yang sehat; pengelolaan anggaran yang bersih menjamin hasil pembangunan bermanfaat bagi semua.

Pilar Rumah Ibarat Para Intelektual, Budayawan, dan Rohaniawan

Setiap rumah membutuhkan pilar penyangga. Para intelektual, budayawan, dan rohaniawan adalah pilar moral dan pemikiran bangsa. Mereka menegakkan nilai budaya, kebijaksanaan, dan spiritualitas agar kebijakan negara tidak kehilangan arah. Tanpa pilar ini, rumah bisa tampak megah namun rapuh di dalam.

Rakyat Ibarat Penghuni Rumah

Semua komponen rumah dibangun untuk rakyat sebagai penghuni. Merekalah yang merasakan keteduhan atap, kesegaran ventilasi, dan kehangatan ruang keluarga. Rakyat yang hidup di rumah yang aman dan nyaman dapat tumbuh dengan tenang, sejahtera, dan mampu menjaga rumah bersama.

Indonesia sebagai rumah besar hanya dapat menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, dan tenteram bila setiap bagiannya berfungsi sesuai perannya. MPR, Presiden, DPR, aparat hukum, TNI–Polri, hingga lembaga pengelola pajak adalah elemen penting yang harus saling menguatkan. Namun, fondasi terkuat tetap kesadaran rakyat untuk merawat rumah bersama. Tanpa kesadaran itu, secanggih apapun arsitektur rumah, ia hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa jiwa.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Rumah Rusak



SCAN ME

Gambar 19. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Rumah Rusak

Setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, wajah ketatanegaraan Indonesia berubah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi tempat kedaulatan rakyat berpusat. Kekuasaan disebar ke banyak lembaga setara, dengan harapan demokrasi menjadi lebih modern dan sehat. Dua dekade berlalu, harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Celah kekuasaan justru dimanfaatkan kepentingan sempit.

Negara kini ibarat rumah besar yang dulu kokoh dan rapi, namun satu per satu bagiannya rusak. Kerusakan ini bukan sekadar gambaran, melainkan cermin dari kasus-kasus nyata yang menimpa lembaga negara di Indonesia, mulai dari kasus korupsi dari tingkat kementerian, aparat hukum, hingga lembaga pengawas.

Berikut potret kerusakan "rumah" Indonesia yang semakin nyata.

Atap Ibarat MPR

Atap yang seharusnya melindungi kini berlubang. MPR tidak lagi menjadi penjaga arah negara dan mudah diintervensi kepentingan elite. Kasus terbaru Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono yang menjadi tersangka dugaan korupsi (2025) hanya salah satu bukti bagaimana lembaga ini kehilangan wibawa. Atap yang bocor membuat air kepentingan pribadi menetes ke seluruh ruangan.

Saluran Ibarat Presiden

Saluran air yang tersumbat menimbulkan genangan. Begitu pula alur kebijakan ketika pemimpin eksekutif gagal memecahkan masalah. Birokrasi yang lamban dan pungli marak, seperti temuan Ombudsman tentang pelayanan publik yang berbelit hingga membuat kebijakan tidak sampai ke rakyat. Masalah menumpuk, dari lambannya penanganan krisis pangan hingga carut-marut distribusi bansos.

WC Ibarat Hukum

WC yang mampet menyebarkan bau busuk. Hukum Indonesia pun berbau serupa ketika penegak hukum sendiri terlibat korupsi.

Rekap kasus menunjukkan nama-nama besar: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Hakim Agung Sudrajad Dimyati, hingga sederet hakim PN Surabaya yang divonis bersalah (2024–2025). Ketika pengadilan kotor, keadilan menjadi komoditas, bukan nilai.

Pagar Ibarat TNI–Polri

Pagar yang jebol membuat rumah tak aman. TNI dan Polri, yang seharusnya menjadi pelindung, justru berulang kali tercoreng.

Dari kasus suap pengadaan heli AW-101 di TNI AU, hingga kasus Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Teddy Minahasa di kepolisian. Satpam yang mestinya menjaga justru memalak dan menakut-nakuti penghuni rumah, yaitu rakyat.

Suasana Rumah Ibarat Kesadaran Rakyat

Ketika kesadaran rakyat melemah, rumah menjadi panas dan kehilangan jiwa. Partisipasi kritis publik menurun, sementara politik uang dan polarisasi menguat. Rakyat hanya didekati saat pemilu, setelah itu suara mereka menguap. Tanpa kesadaran bersama, rumah Indonesia jadi sekadar bangunan tanpa kehangatan.

Listrik dan Air Ibarat Pajak

Pajak seharusnya menjadi sumber energi bagi negara. Namun kebocoran dan penyalahgunaan dana membuat rakyat terus menanggung beban tanpa mendapat layanan yang layak.

Kasus-kasus besar di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk skandal pegawai pajak yang memamerkan kekayaan tak wajar, menunjukkan bagaimana listrik negara kerap padam sementara air pelayanan tetap keruh.

Fondasi Ibarat UUD 1945

Fondasi rumah adalah konstitusi. Setelah amandemen, fondasi ini justru mudah diutak-atik demi kepentingan jangka pendek.

Amandemen keempat gagal menutup celah itu, membuat negara rentan diombang-ambingkan oleh kesepakatan segelintir orang. Retakan ini terlihat dari tarik-menarik kekuasaan antar lembaga yang sering berujung kebuntuan.

Ventilasi Ibarat DPR

Ventilasi yang tersumbat membuat udara pengap. DPR seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat, tetapi justru menjadi sarang korupsi. Rekap malfungsi mencatat lebih dari 70 kasus korupsi anggota DPR lintas periode, dari Nazaruddin hingga Setya Novanto. Aspirasi rakyat pun tercekik, demokrasi menjadi sesak.

Dapur Ibarat Kemenkeu/DJP

Dapur negara adalah pengelolaan anggaran. Ketika dapur kotor, rakyat kelaparan. Kasus mark-up anggaran dan bancakan bansos yang melibatkan menteri sosial Juliari Batubara (2020) adalah contoh telanjang. Uang yang seharusnya memberi gizi bagi rakyat malah habis di meja pesta pejabat.

Pilar Rumah Ibarat Pilar Negara

Intelektual, budayawan, dan rohaniawan semestinya menjadi pilar moral. Namun banyak yang sibuk dengan agenda pribadi atau mendekat ke kekuasaan.

Sebagian pemuka agama bahkan terjebak politisasi. Pilar yang seharusnya menjaga nilai dan identitas bangsa kini berdiri sendiri-sendiri, meninggalkan rumah tanpa penopang.

Penghuni Rumah Ibarat Rakyat

Rakyat yang seharusnya hidup tenang kini justru paling merasakan akibat. Biaya hidup naik, ruang demokrasi menyempit, kepercayaan pada negara merosot. Penghuni rumah besar ini dibiarkan cemas dan tidak terlindungi.

Kerusakan ini bukan sekadar cerita. Data malfungsi lembaga negara mencatat 176 kasus korupsi dan pelanggaran di hampir semua sektor: kementerian, DPR, BPK, bahkan lembaga penegak hukum (*Data dihasilkan dari Chat GPT*).

Semuanya terjadi setelah MPR bukan lagi lembaga tertinggi pasca amandemen ketiga. Jika retakan ini terus dibiarkan, rumah bernama Indonesia akan runtuh bukan karena bencana alam, tetapi karena penghuninya sendiri lalai merawat dan membersihkan.

Saatnya rakyat kembali menuntut pembenahan mendasar agar fondasi kedaulatan rakyat tegak kembali dan rumah ini bisa kembali menjadi tempat yang aman, kokoh, dan layak huni bagi semua.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Rumah



SCAN ME

Gambar 20. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Rumah

Kerusakan negara bukan hanya masalah infrastruktur atau ekonomi. Ini adalah kerusakan jiwa bangsa.

Di mana hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, pemerintahan dikuasai oligarki, pajak menyengsarakan, dan kedaulatan rakyat tinggal jargon. Selama cetak biru kekuasaan salah, perbaikan di permukaan hanya akan jadi tambal sulam.

Renovasi Tanpa Mengusir Penghuni

Di rumah fisik, renovasi besar sering memaksa penghuni pindah sementara. Negara tidak demikian.

Rakyat tetap tinggal, negara tetap berdiri, yang diubah adalah desain dan manajemennya:

- Mandor (para elite) yang salah arah diganti.
- Gambar kerja (konstitusi dan sistem negara) disusun ulang.
- Tata kelola dibuat bersih dan transparan.

Perubahan tidak menuntut rakyat meninggalkan tanah airnya. Justru rakyat adalah pemilik sah rumah ini.

Perubahan Sekejap Mata

Cak Nun pernah mengingatkan, perubahan sejati tidak harus memakan waktu puluhan tahun. Seperti kisah Nabi Sulaiman yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap.

"Bukan karena sulap, melainkan karena ilmu, niat, dan izin Tuhan".

Artinya, perubahan besar dalam negara juga bisa terjadi cepat bila ada niat yang benar, keberanian moral, dan kepemimpinan yang jujur.

Empat Pilar Penjaga Kedaulatan

Sering muncul narasi bahwa rakyat harus sadar dulu sebelum negara bisa berubah. Kenyataannya, struktur yang sehat justru menumbuhkan kesadaran rakyat.

Maka yang pertama-tama harus sadar adalah empat pilar penopang kedaulatan:

1. **Kaum intelektual**: Menyusun cetak biru reformasi, menawarkan gagasan pembaruan konstitusi dan tata kelola yang adil.
2. **Kaum agama**: Menjaga etika kekuasaan, menegakkan nilai moral dan nurani publik.
3. **TNI dan Polri**: Melindungi rakyat, bukan penguasa; menjadi pagar yang tegak, bukan pemalak penghuni.

4. **Kaum budaya**: Menjaga jati diri bangsa, menyalakan narasi persatuan dan kebangsaan.

Bila hanya 10–20 tokoh dari empat pilar ini bersatu dengan niat tulus dan strategi cerdas, cetak biru kekuasaan dapat dirombak tanpa harus menunggu jutaan rakyat turun ke jalan.

Analogi Belajar Berenang: Takkan Paham Tanpa Masuk di Air

Kuncinya bukan sekadar wacana. Perubahan besar hanya lahir ketika ada keberanian nyata. Pertama, keberanian untuk terjun langsung ke "air" proses perubahan, bukan sekadar mengamati dari pinggir.

Kedua, keberanian membalik sistem dengan niat yang bersih dan rancangan yang jelas, sehingga perombakan konstitusi dan tata kelola negara tidak menjadi ajang perebutan kekuasaan baru.

Ketiga, keberanian meninggalkan logika lama yang menunggu seluruh rakyat sadar lebih dulu. Justru dengan menata struktur negara agar sehat dan adil, kesadaran rakyat akan tumbuh dengan sendirinya.

Ketika tiga keberanian ini hadir bersamaan, renovasi besar rumah Indonesia tidak lagi sebatas mimpi, melainkan langkah nyata yang bisa diwujudkan dalam waktu singkat.

Kesadaran rakyat adalah dampak lanjutan. Jika hukum adil, rakyat akan patuh. Jika birokrasi melayani, rakyat akan percaya. Jika sistem berpihak, rakyat akan merasa memiliki.

Ketika rumah menjadi nyaman dan aman, penghuninya dengan sendirinya tumbuh rasa tanggung jawab untuk merawatnya.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 21. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak?

Ketika keadaan negara terasa kian semrawut, suara yang paling sering terdengar di ruang publik adalah "Ganti Presiden!". Tuntutan ini wajar. Presiden memang pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, wajah negara di mata rakyat dan dunia. Namun, apakah benar cukup hanya dengan mengganti presiden? Apakah masalah yang menahun akan selesai hanya karena sosok di kursi tertinggi itu berganti?

Sejarah dua dekade pasca-amandemen UUD 1945 ketiga (2001) memberi pelajaran penting: mengganti orang tidak otomatis memperbaiki sistem.

Sejak reformasi, Indonesia sudah berganti beberapa presiden: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid,

Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan kini memasuki era baru lagi. Masing-masing membawa gaya, program, dan prioritas berbeda. Tetapi masalah struktural seperti korupsi, ketimpangan hukum, dan birokrasi yang lamban tetap bertahan.

Rumah Indonesia diibaratkan tadi sebagai bangunan besar yang fondasinya mulai retak. Mengganti presiden tanpa membenahi fondasi sama saja seperti menukar mandor pembangunan, sementara cetak biru dan pondasi yang rapuh tetap dipakai. Retakan itu akan terus melebar, siapa pun yang memimpin.

Solusi tidak berhenti pada pergantian presiden. Ada tiga pekerjaan besar yang harus jalan bersamaan:

1. Amandemen kelima UUD 1945 untuk menegaskan kembali kedaulatan rakyat dan memperkuat pengawasan antar lembaga.
2. Reformasi lembaga penegak hukum: membersihkan pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan dari mafia peradilan dan konflik kepentingan.
3. Membangun etika kekuasaan dan partisipasi publik termasuk pilar negara (kaum intelektual, budayawan, rohaniawan, dan TNI–Polri) berdiri di sisi rakyat, bukan di bawah kendali oligarki.

Presiden berikutnya bisa memimpin proses ini, tetapi tidak mungkin berjalan jika pilar-pilar lain tetap dikuasai kepentingan jangka pendek.

Intinya, mengganti presiden hanyalah langkah permukaan. Tanpa perbaikan cetak biru ketatanegaraan, kerusakan yang sama akan terus berulang, hanya dengan wajah berbeda di puncak kekuasaan.

Renovasi rumah Indonesia menuntut keberanian lebih dari sekadar memilih kapten baru, sehingga kita perlu membenahi fondasi, menata ulang desain, dan memastikan seluruh pilar kembali tegak. Hanya dengan cara itu, siapa pun presiden yang memimpin, rumah ini benar-benar kembali menjadi tempat aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh penghuninya.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 22. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak

Kita sering dengar kalimat yang mirip: "Pokoknya ganti presiden aja, pasti beres."

Kalimat ini terdengar masuk akal dan rasanya lega di telinga. Kalau keadaan negara bikin kesal seperti harga naik, layanan publik lambat, korupsi di mana-mana sehingga wajar kalau orang menuding pemimpin paling atas sebagai biang masalah.

Tetap saja, pola pikir "yang penting ganti presiden" masih banyak pengikutnya. Cara pandang ini muncul dengan alasan yang beragam, ada yang benar-benar berharap baik, ada juga yang hanya ingin jalan cepat. Berikut beberapa tipe orang yang punya pola pikir seperti itu.

- **Tipe Messiah Seeker (Messiah Complex):** Kelompok ini mencari "juru selamat" tunggal yang diyakini mampu menebus seluruh krisis. Mereka cenderung mengidolakan calon presiden yang punya aura pahlawan, bukan karena program dan rekam jejak yang kuat, melainkan karena citra penyelamat. Masalah besar yang bersifat struktural pun disederhanakan menjadi sekadar menunggu datangnya tokoh yang dianggap tepat.
- **Tipe Shortcut Mindset (The Shortcut Thinker):** Pola pikir ini menginginkan jalan pintas: cukup ganti presiden, beres. Mereka enggan memikirkan kerumitan pembenahan hukum, reformasi lembaga, atau perbaikan tata kelola yang panjang dan sulit. Slogan "ganti presiden" terasa lebih cepat dan praktis dibanding upaya reformasi konstitusi yang memerlukan proses dan kesabaran.

- **Tipe Presidential Fixation:** Di sini semua fokus, kritik, dan harapan ditaruh hanya pada presiden. Pengaruh besar dari partai, DPR, lembaga peradilan, dan aktor lain sering diabaikan. Ketika presiden baru ternyata tidak memenuhi ekspektasi, kelompok ini cepat kecewa dan kembali menyerukan pergantian figur berikutnya, menciptakan lingkaran kekecewaan yang tidak pernah putus.
- **Tipe Apatis-Pasrah:** Orang dengan pola pikir ini sebenarnya sadar bahwa masalah negara bersifat sistemik. Namun mereka merasa mengganti presiden adalah satu-satunya langkah praktis yang mungkin dilakukan. Reformasi konstitusi dan pembenahan lembaga dianggap terlalu rumit dan berisiko, sehingga mereka memilih pasrah menunggu pergantian sosok setiap lima tahun.
- **Tipe Status Quo Terselubung:** Tipe ini diam-diam diuntungkan oleh sistem yang ada, entah sebagai pendukung kekuatan besar yang sudah mapan. Mereka sengaja menyebarkan narasi "cukup ganti presiden" agar perhatian publik tidak tertuju pada perombakan yang lebih dalam, di mana perubahan yang bisa mengganggu kepentingan mereka sendiri.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 23. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak?

Banyak orang berkata, "Tunggu saja pemilu. Lima tahun lagi kita ganti presiden." Kedengarannya masuk akal karena pemilu memang cara resmi rakyat memilih pemimpin baru.

Tapi kalau kita ingat rumah Indonesia yang sudah rusak, pertanyaannya jadi jelas: apakah cukup menunggu lima tahun sekali untuk memperbaiki rumah yang bocor dan lapuk?

Menunggu pemilu sama seperti menunggu tukang datang lima tahun sekali padahal atap sudah bocor dan dinding mulai retak. Air hujan terus merembes, tikus dan kecoa makin banyak, dan fondasi makin rapuh. Jika kita hanya diam, kerusakan akan semakin parah dan biaya perbaikan akan semakin besar.

Pemilu memang penting seperti merawat rumah. Tetapi pemilu hanya mengganti kepala mandor, bukan otomatis menambal atap atau memperkuat fondasi.

Sejak 1998 kita sudah beberapa kali ganti presiden dan anggota DPR, namun masalah lama seperti korupsi, pungli, dan hukum yang tidak adil tetap ada. Ini tanda bahwa yang harus dibenahi bukan hanya pemimpinnya tetapi juga rancangan dan cara kerja semua tukang di dalam rumah.

Sistem pemilu kita juga masih punya banyak celah. Partai besar sering menguasai jalur pencalonan. Uang dan sponsor besar sering menentukan siapa yang terpilih.

Pengawas pemilu pun kadang tidak kuat menahan tekanan. Akibatnya, pemilu lima tahunan kadang seperti undian. Siapa pun yang menang belum tentu mau atau mampu memperbaiki kerusakan rumah.

Jika kita hanya menunggu pemilu, kita menjadi pasif. Selama lima tahun itu atap terus bocor, dinding terus retak, dan para tikus makin leluasa. Perbaikan rumah Indonesia perlu kerja terus-menerus.

Aturan dasar harus diperkuat, para tukang harus diawasi setiap hari, dan para pilar bangsa seperti kaum intelektual, pemuka agama, budayawan, dan aparat keamanan harus ikut menjaga rumah tetap aman dan layak huni.

Pemilu tetap penting. Tetapi jika kita hanya mengandalkannya, rumah Indonesia akan semakin rusak. Perubahan nyata lahir dari pengawasan dan kerja bersama setiap saat, bukan dari menunggu lima tahun sekali.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 24. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Rumah Rusak

Ada beberapa jenis cara berpikir yang membuat orang merasa perbaikan negara akan otomatis terjadi hanya dengan menunggu pemilu lima tahunan. Masing-masing muncul dari alasan yang berbeda, tetapi semuanya sama-sama menaruh harapan perubahan hanya pada pergantian pemimpin lewat pemilu.

- **Tipe Legalistik Prosedural (Rule-Bound Voter / Proceduralist):** Orang dengan pola ini percaya penuh bahwa jalur resmi pemilu lima tahunan adalah satu-satunya cara sah untuk memperbaiki keadaan. Mereka biasanya taat aturan, tetapi sering menutup mata terhadap kenyataan bahwa proses pemilu dikuasai partai dan kepentingan lama sehingga perubahan mendasar sulit terjadi.

- **Tipe Optimis Naif (Ballot Box Idealist):** Mereka yakin rakyat bisa "menghukum" partai atau pemimpin buruk lewat kotak suara. Keyakinan ini lahir dari harapan baik, tetapi sering tidak menyadari bahwa proses verifikasi partai, pencalonan, dan pengawasan pemilu banyak dipengaruhi kekuatan politik lama sehingga wajah baru sulit benar-benar muncul.
- **Tipe Apatis Pasif (Complacent Bystander / Passive Waiter):** Pola pikir ini muncul dari rasa lelah. Orang tahu sistem bermasalah, tetapi malas mengambil risiko. Pikiran mereka sederhana: biarkan saja, toh lima tahun cepat berlalu dan pemilu berikutnya bisa jadi momen ganti pemimpin.
- **Tipe Status Quo Terselubung (Hidden Beneficiary / Covert Status-Quo Defender):** Ini biasanya dimiliki oleh orang atau kelompok yang sebenarnya diuntungkan dengan kondisi sekarang. Mereka mendorong masyarakat untuk sabar menunggu pemilu agar tidak ada desakan perubahan besar yang bisa mengganggu kepentingan mereka.
- **Tipe Pengalihan Emosional (Comfort Seeker / Emotional Pacifier):** Orang dengan pola ini menenangkan diri sendiri atau orang lain dengan harapan palsu. Seolah perubahan besar tidak perlu dilakukan sekarang, cukup menunggu pemilu lima tahunan, padahal kenyataannya masalah lama akan berulang lagi.

Kelima tipe ini lahir dari situasi dan motivasi yang berbeda. Namun semuanya sama-sama berisiko menunda perbaikan nyata. Rumah besar bernama Indonesia yang sudah retak dan bocor tidak akan menjadi kokoh hanya karena kita menunggu tukang datang lima tahun sekali.

SEKOLAH NEGARAWAN
X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 5: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Mobil

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Mobil Bagus



SCAN ME

Gambar 25. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Mobil Bagus

Indonesia bisa dibayangkan sebagai sebuah mobil besar yang membawa seluruh rakyatnya dalam perjalanan panjang menuju tujuan bersama. Supaya perjalanan ini aman dan lancar, mobil harus dalam kondisi prima. Bukan hanya sopir yang penting, setiap komponen juga harus bekerja dengan baik.

Kemudi atau Setir Ibarat MPR

MPR adalah kemudi atau setir. Jika setir kokoh dan responsif, mobil dapat diarahkan sesuai tujuan rakyat. Kemudi yang sehat menjamin arah perjalanan tidak mudah dipelintir oleh kepentingan sempit dan mobil tetap melaju ke tujuan yang disepakati bersama.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Mesin Ibarat Presiden dan Para Menteri

Presiden dan para menteri berperan sebagai mesin. Mesin yang bertenaga penuh dan stabil mampu menggerakkan mobil tanpa tersendat. Tenaga ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kestabilan dan koordinasi agar seluruh sistem bekerja seirama. Tanpa mesin yang terawat, mobil akan sering mogok atau berjalan tersendat.

Filter Udara dan Knalpot Ibarat DPR

DPR ibarat filter udara dan knalpot. Filter udara memastikan udara yang masuk ke mesin tetap bersih, sedangkan knalpot membuang sisa pembakaran tanpa menimbulkan polusi. Tugas DPR adalah menyalurkan aspirasi rakyat dan mengawasi kebijakan, sambil mencegah "asap kebijakan" yang kotor meracuni kehidupan masyarakat.

Saringan Bahan Bakar, Karburator, dan Injector Ibarat Kemenkeu dan DJP

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak berfungsi sebagai saringan bahan bakar, karburator, dan injector. Mereka menyalurkan bahan bakar yang bersih dan tepat agar mesin bekerja maksimal. Pajak dan anggaran negara yang dikelola dengan jujur menjadi bahan bakar bersih. Bila saringan ini kotor atau bocor, mesin akan batuk-batuk dan perjalanan terganggu.

Oli Mesin dan Filter Oli Ibarat Hukum dan Lembaga Pengawas

Hukum dan lembaga pengawas berperan sebagai oli mesin dan filter oli. Oli melumasi dan menetralkan gesekan antar bagian mesin, menjaga agar tidak aus. Lembaga hukum yang adil dan pengawasan yang tegas memastikan gesekan kekuasaan tidak menimbulkan kerusakan. Tanpa oli dan filternya, mesin akan cepat panas dan rusak.

Bahan Bakar Ibarat Pajak

Pajak dari rakyat adalah bahan bakar utama. Selama bahan bakar tersedia cukup dan dikelola dengan benar, mobil dapat terus melaju tanpa hambatan. Jika bahan bakar diselewengkan, perjalanan akan macet.

Bahan Bakar Cadangan Ibarat Utang Luar Negeri

Utang luar negeri ibarat bahan bakar cadangan. Boleh dipakai saat darurat ketika mobil hampir kehabisan BBM di tengah jalan, namun tidak boleh dijadikan sumber utama. Ketergantungan berlebihan akan membuat mobil rentan saat cadangan itu menipis.

Penumpang Ibarat Rakyat

Rakyat adalah para penumpang mobil besar ini. Mereka tidak hanya duduk pasif, tetapi ikut menentukan arah perjalanan. Para penumpang berhak memastikan kemudi tidak diputar ke jurang, mesin tidak dibiarkan rusak, dan bahan bakar tidak dicuri.

Jika semua komponen mobil bekerja baik, perjalanan bangsa akan mulus menuju kemakmuran dan keadilan. Namun jika salah satu bagian gagal, misalnya kemudi goyah, mesin pincang, atau filter kotor, perjalanan akan terganggu.

Indonesia seharusnya menjadi mobil yang prima, bukan hanya bergantung pada sopir yang andal, tetapi juga pada kondisi kendaraan yang sehat dan penumpang yang sadar ke mana tujuan perjalanan mereka.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Mobil Rusak



SCAN ME

Gambar 26. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Mobil Rusak

Indonesia dianalogikan sebuah mobil besar yang seharusnya membawa seluruh rakyat menuju tujuan bersama yaitu keadilan kemakmuran dan kedaulatan.

Dalam keadaan ideal setiap bagian mobil bekerja dengan baik sehingga perjalanan lancar dan aman. Tetapi sekarang banyak bagian mobil ini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya mobil yang

seharusnya melaju kencang justru tersendat bahkan nyaris mogok di tengah jalan.

Kemudi atau Setir Ibarat MPR

MPR ibarat kemudi atau setir. Fungsinya mengarahkan perjalanan sesuai mandat rakyat. Dalam kondisi sehat kemudi ini lentur dan responsif sehingga mobil tetap berada di jalur yang benar. Sekarang kemudi macet dan terkunci.

Rakyat yang seharusnya bisa menentukan arah melalui MPR tidak lagi memegang kendali. Mobil besar ini pun melaju tanpa arah jelas hanya mengikuti dorongan kekuatan lain.

Mesin Ibarat Presiden dan Para Menteri

Presiden dan para menteri berperan sebagai mesin mobil. Mesin seharusnya menjadi pemompa tenaga utama yang menggerakkan seluruh sistem agar roda negara berputar lancar. Kini mesinnya ngempos.

Tenaga utama yang mestinya mendorong kemajuan justru kehilangan kekuatan. Kebijakan yang seharusnya memberi dorongan besar hanya menghasilkan getaran lemah. Mobil masih menyala tetapi jalannya tersendat dan mudah macet.

Filter Udara dan Knalpot Ibarat DPR

DPR berfungsi seperti filter udara dan knalpot. Filter udara semestinya menjaga sirkulasi tetap bersih sedangkan knalpot membuang gas buang agar tidak menjadi racun.

Dalam praktiknya filter ini justru mampet. Sirkulasi udara kotor dan knalpot mengeluarkan asap beracun. Alih alih menjadi pengawas sehat DPR sering menjadi sumber polusi kebijakan yang meracuni ruang demokrasi.

Saringan Bahan Bakar, Karburator, dan Injector Ibarat Kemenkeu dan DJP

Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak bisa diibaratkan saringan bahan bakar karburator dan injector. Tugasnya menyalurkan bahan bakar pajak yang bersih dan tepat ke mesin.

Kini saringan ini buntu. Bahan bakar yang masuk ke mesin kotor dan sering harus disubsidi dengan pinjaman. Akibatnya mesin kehilangan tenaga dan tidak bisa bekerja dengan optimal.

Oli Mesin dan Filter Oli Ibarat Hukum dan Lembaga Pengawas

Hukum dan lembaga pengawas bekerja layaknya oli mesin dan filter oli. Oli seharusnya melumasi dan menetralkan gesekan agar mesin awet dan tidak cepat aus. Sekarang oli bocor dan keruh.

Gesekan dalam mesin makin keras komponen cepat panas dan risiko kerusakan menjadi besar. Penegakan hukum yang semestinya mendinginkan dan menenangkan tidak lagi mampu mengendalikan gesekan kekuasaan.

Bahan Bakar Ibarat Pajak

Pajak rakyat adalah bahan bakar utama. Bahan bakar ini seharusnya tersedia cukup agar mesin terus melaju. Kini bensin dan solar yang dipaksa diperah dari rakyat makin menipis. Mesin makin tersendat karena bahan bakar habis dan pengelolaannya tidak bersih.

Bahan Bakar Cadangan Ibarat Utang Luar Negeri

Utang luar negeri yang seharusnya hanya menjadi cadangan darurat kini ibarat mobil yang sudah harus diderek atau ditowing. Mobil Indonesia sudah mogok. Ia ditarik ke kiri oleh China dan ke kanan oleh Amerika.

Tali derek dari dua arah ini membuat mobil oleng dan kehilangan kendali atas arah sendiri. Bukannya melaju mandiri mobil justru bergantung pada kekuatan penarik yang punya kepentingan masing masing.

Penumpang Ibarat Rakyat

Rakyat adalah penumpang mobil besar ini. Mereka seharusnya ikut menentukan arah perjalanan karena merekalah pemilik kendaraan. Namun sekarang mereka hanya bisa terguncang guncang di dalam kabin merasakan setiap benturan tetapi tidak bisa memegang setir. Roda kekuasaan berjalan tanpa masukan langsung dari pemilik sah mobil.

Inilah potret Indonesia saat ini sebuah mobil besar yang seharusnya melaju kencang menuju cita cita kemerdekaan tetapi justru terguncang karena banyak komponen rusak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh. Justru yang ada rakyat semakin diperas habis-habisan untuk mengisi bahan bakar tanpa

mengetahui bahwa kondisi mobil rusak dan tidak bisa berjalan.

Kemudi terkunci mesin ngempos filter mampet oli bocor dan bahan bakar menipis. Sementara itu mobil diderek ke arah yang tidak sepenuhnya dikehendaki oleh para penumpangnya.

Jika kerusakan ini tidak segera diperbaiki perjalanan bangsa akan makin berisiko. Jalan yang seharusnya membawa kita pada kesejahteraan bisa berakhir di jurang ketergantungan dan kebangkrutan.

Mobil Indonesia tidak butuh cat baru atau sekadar sopir baru. Yang dibutuhkan adalah perbaikan menyeluruh pada seluruh sistem mesin dan pengembalian kendali setir ke tangan pemiliknya yaitu rakyat.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Mobil



SCAN ME

Gambar 27. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sebuah Mobil

Indonesia hari ini ibarat mobil besar yang sudah lama menempuh jalan terjal. Mesinnya ngosngosan, kemudi macet, filter udara penuh kotoran, dan oli mesin

keruh. Mobil tidak lagi mampu bergerak dengan tenaga penuh, bahkan mulai ditarik ke sana sini oleh kekuatan luar. Rakyat yang duduk di dalamnya hanya bisa terguncang guncang padahal merekalah pemilik mobil itu.

Untuk membuat mobil ini kembali prima tidak cukup hanya mengganti sopir. Diperlukan perbaikan total. Seperti mobil rusak yang masuk bengkel, negara ini perlu proses pembongkaran dan penataan ulang yang menyeluruh.

Perbaikan besar ini memerlukan tim montir yang benar benar ahli. Tim montir di sini bukan sekadar teknisi mesin, melainkan para penjaga moral dan pikiran bangsa. Mereka adalah kaum intelektual yang mampu menyiapkan cetak biru baru, budayawan dan pemuka adat yang mengingatkan jati diri bangsa, rohaniawan yang menjaga nurani publik, dan aparat keamanan TNI Polri yang bertugas melindungi rakyat, bukan penguasa. Semua pihak ini harus bekerja bersama dan tidak saling curiga atau bersaing demi kepentingan sendiri.

Rakyat sebagai pemilik mobil tidak bisa hanya menunggu di luar bengkel. Mereka harus mengawasi proses perbaikan dari awal hingga akhir. Pengawasan rakyat memastikan tidak ada suku cadang yang diselewengkan, tidak ada montir yang bermain mata dengan pihak luar, dan semua komponen benar benar dipasang kembali dengan standar terbaik.

Langkah perbaikan tidak cukup dengan mengganti bagian yang rusak. Cetak biru kendaraan yang dalam konteks ini adalah aturan dasar

ketatanegaraan perlu ditinjau ulang. Fondasi UUD 1945 yang melemah setelah amandemen harus diperkuat kembali agar kemudi negara yaitu MPR bisa kembali memegang kendali arah perjalanan. Tanpa perbaikan cetak biru mesin baru pun akan cepat rusak karena bekerja dalam sistem yang tetap cacat.

Mesin pemerintahan yang ngempos perlu dibersihkan dan diservis menyeluruh. Birokrasi harus dibenahi agar tenaga yang keluar dari kebijakan pemerintah benar benar mendorong roda perekonomian. Filter udara dan knalpot yang diibaratkan DPR harus dibuka dan dibersihkan dari kotoran kepentingan sempit supaya udara demokrasi kembali segar dan tidak mengeluarkan polusi kebijakan.

Saringan bahan bakar karburator dan injector yang diibaratkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak wajib dibersihkan agar bahan bakar pajak mengalir jernih tanpa kebocoran. Oli mesin dan filternya yang melambangkan hukum dan lembaga pengawas harus diganti dengan yang benar benar murni supaya gesekan kekuasaan tidak memicu panas berlebihan.

Ketika semua bagian sudah kembali berfungsi, mobil Indonesia akan kembali melaju tanpa harus bergantung pada derek asing. Utang luar negeri hanya akan menjadi cadangan darurat, bukan penopang utama. Rakyat sebagai penumpang akan merasakan perjalanan yang lebih mulus, lebih aman, dan memiliki tujuan yang jelas.

Inilah makna sejati dari renovasi negara. Bukan sekadar mengecat bodi atau mengganti sopir, melainkan membongkar sistem lama, memperkuat fondasi, dan memastikan seluruh komponen bekerja dalam harmoni. Perbaikan mobil Indonesia hanya akan berhasil jika rakyat tetap memegang kendali sebagai pemilik sejati, sementara para montir bangsa bekerja dengan niat tulus dan keahlian yang mumpuni.

Dengan cara ini mobil Indonesia tidak hanya kembali bisa berjalan, tetapi juga siap menempuh perjalanan panjang menuju kemakmuran dan kedaulatan dengan mesin yang sehat dan arah yang pasti.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 28. Ilustrasi Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak?

Banyak orang beranggapan bahwa jalan keluar dari kerusakan negara adalah dengan mengganti

presiden. Ketika ekonomi sulit, hukum tidak adil, atau korupsi merajalela, seruan "ganti presiden" sering terdengar.

Pemikiran ini tampak masuk akal karena presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Namun pertanyaannya, apakah dengan pergantian presiden saja semua persoalan akan selesai?

Sejak reformasi 1998 Indonesia sudah beberapa kali berganti presiden. Ada yang berlatar belakang sipil, ada yang militer, ada yang lahir dari partai lama dan ada yang muncul sebagai tokoh baru. Masing masing membawa janji dan gaya kepemimpinan berbeda.

Tetapi masalah mendasar seperti korupsi, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, pungutan liar, serta kebocoran anggaran tetap muncul. Ini menunjukkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada sosok pemimpin di puncak.

Mengganti presiden tanpa memperbaiki sistem ibarat mengganti mesin tanpa memperhatikan bagian lain kendaraan. Mesin baru bisa lebih kuat, tapi jika kemudi rusak, ban bocor, dan oli kotor, kendaraan tetap akan macet. Begitu juga dengan negara, presiden baru tidak otomatis bisa membereskan birokrasi korup, hukum yang lemah, atau konstitusi yang sudah rapuh.

Selain itu sistem pemerintahan Indonesia menempatkan presiden di tengah pusaran kepentingan partai dan oligarki ekonomi. Keputusan penting sering kali harus melewati proses tawar menawar dengan DPR, partai koalisi, dan kelompok pengusaha besar.

Sehebat apa pun presidennya, jika aturan main dan lembaga pengawas tetap rapuh, hasilnya tidak akan jauh berbeda.

Perubahan nyata membutuhkan keberanian untuk memperbaiki cetak biru negara. Rakyat bersama empat pilar bangsa yaitu kaum intelektual, pemuka agama, budayawan, dan aparat keamanan harus memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan hanya berharap pada satu presiden. Dengan cara itu Indonesia dapat melaju stabil dan selamat menuju cita-cita bersama.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 29. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak

Ada kelompok cara berpikir yang percaya bahwa semua masalah bangsa akan selesai hanya dengan mengganti presiden. Pandangan ini lahir dari berbagai latar belakang dan motif, tetapi kesamaannya adalah keyakinan bahwa pergantian orang di kursi nomor satu

otomatis akan memperbaiki seluruh sistem. Berikut beberapa tipe yang paling sering muncul.

- **Tipe Populist Daydreamer (Pengkhayal Populis):** Meyakini bahwa setiap calon presiden dengan gaya "merakyat" otomatis membawa keadilan sosial. Mereka lebih tertarik pada citra dan slogan sederhana ketimbang memeriksa kapasitas, rekam jejak, dan kekuatan di belakang sang calon.
- **Tipe Revenge Voter (Pemilih Balas Dendam):** Menganggap pemilu hanya sebagai ajang untuk "menghukum" presiden petahana. Fokusnya bukan pada perbaikan jangka panjang, tetapi sekadar ingin menyingkirkan sosok yang tidak disukai. Setelah presiden lama tergeser, mereka tidak lagi mengikuti proses reformasi lebih dalam.
- **Tipe Media Echo Follower (Pengikut Gema Media):** Sikapnya terbentuk karena terus terpapar narasi media atau media sosial yang menyederhanakan masalah menjadi soal pergantian tokoh. Tanpa banyak analisis, mereka ikut arus opini populer bahwa ganti presiden adalah solusi tunggal.
- **Tipe Economic Saviour Hunter (Pemburu Penyelamat Ekonomi):** Fokus utamanya pada janji pertumbuhan cepat dan perbaikan ekonomi instan. Mereka percaya cukup hadir presiden yang "pintar dagang" atau "kuat bisnis", maka semua masalah kemiskinan dan pengangguran

otomatis teratasi, tanpa melihat kebutuhan reformasi hukum dan tata kelola.

- **Tipe Historical Romantic (Romantis Masa Lalu):** Merindukan kejayaan atau stabilitas pada masa presiden tertentu di masa lalu. Mereka menganggap cukup menemukan pemimpin yang "mirip" figur lama itu, maka keadaan akan kembali seperti dulu, tanpa memperhitungkan perubahan zaman dan tantangan baru.

Tipe-tipe ini muncul dari kondisi dan kepentingan berbeda, tetapi semuanya hanya menggantungkan harapan pada sosok presiden. Padahal, masalah negara tidak akan selesai tanpa memperbaiki aturan, lembaga, dan arah kekuasaan yang lebih mendasar daripada sekadar mengganti figur pemimpin.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 30. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak?

Sering kita dengar orang berkata "tunggu saja pemilu, lima tahun lagi kita bisa ganti pemimpin". Sekilas ucapan ini terdengar wajar karena pemilu memang cara resmi rakyat memilih presiden dan wakil rakyat.

Tetapi jika kita melihat kerusakan yang sudah lama menumpuk, pertanyaannya jelas: apakah cukup hanya menunggu lima tahun sekali untuk memperbaiki semua masalah?

Menunggu pemilu sama saja seperti menunggu tukang datang lima tahun sekali sementara mobil sudah bocor oli, mesinnya ngempos dan kemudinya macet.

Selama kita diam, kerusakan makin parah dan biaya perbaikan makin mahal. Begitu juga dengan negara, selama kita hanya menunggu jadwal pemilu, korupsi terus berlangsung, kebijakan buruk tetap jalan, dan ketergantungan pada utang makin dalam.

Pemilu memang penting. Tanpa pemilu rakyat tidak bisa memilih pemimpin. Namun pemilu hanya mengganti mesin, bukan otomatis membetulkan mesin, filter, atau semua komponen mobil.

Sistem pemilu kita sendiri masih penuh celah. Partai besar menguasai jalur pencalonan, suap masih kuat, dan pengawas pemilu tidak selalu kokoh menahan tekanan.

Akibatnya pemilu lima tahunan kadang seperti undian. Siapa pun yang menang belum tentu mampu atau mau memperbaiki kerusakan yang sudah mengakar.

Jika masyarakat hanya menunggu pemilu, sikap pasif akan makin kuat. Selama lima tahun itu kemudi

tetap macet, mesin tetap ngempos, dan para penumpang hanya bisa terguncang guncang. Perbaikan negara perlu kerja terus menerus.

Aturan dasar harus diperkuat, birokrasi harus diawasi setiap saat, dan pilar bangsa seperti kaum intelektual, pemuka agama, budayawan, serta aparat keamanan perlu menjaga arah agar kendaraan besar bernama Indonesia tetap di jalur yang benar.

Pemilu tetap hak rakyat dan pilar penting demokrasi. Tetapi jika kita hanya mengandalkannya, kita akan terus kecewa.

Perubahan sejati lahir dari pengawasan yang tidak pernah berhenti dan keberanian menata ulang aturan dasar, bukan dari menunggu lima tahun sekali baru bergerak.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 31. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Mobil Rusak

Ada berbagai cara pandang yang membuat orang merasa perbaikan negara akan otomatis terjadi hanya dengan menunggu pemilu lima tahunan. Alasan dan latar belakangnya berbeda, tetapi semuanya sama sama menaruh harapan perubahan hanya pada momen pergantian pemimpin melalui pemilu.

- **Tipe Quick-Fix Believer (Penganut Solusi Instan):** Merasa semua masalah negara bisa dibersihkan hanya dengan satu momen pemilu. Mereka tidak tertarik memikirkan proses panjang seperti reformasi hukum, pengawasan lembaga, atau perbaikan konstitusi.
- **Tipe Herd Mentality (Ikut-Ikutan Massa):** Mengikuti arus karena lingkungan sekitar juga menunggu pemilu. Mereka tidak benar-benar menganalisis situasi, hanya ikut apa yang dianggap wajar oleh mayoritas.
- **Tipe Cynical Pragmatist (Pragmatis Sinis):** Sebetulnya paham sistem sangat rusak, tapi menilai usaha perbaikan di luar pemilu tidak realistis. Menurut mereka, daripada melawan arus, lebih baik menunggu pergantian lima tahunan walau tidak yakin akan ada perubahan berarti.
- **Tipe Outsourcing Citizen (Warga Penyerah Mandat):** Menganggap tugas perbaikan negara sepenuhnya urusan politisi. Rakyat hanya perlu datang ke TPS lima tahun sekali, lalu semua tanggung jawab diserahkan pada pemimpin baru.

- **Tipe Distraction Seeker (Pencari Pengalih Perhatian):** Memakai pemilu sebagai cara mengalihkan rasa frustasi. Fokus pada drama kandidat dan kampanye membuat mereka sejenak lupa bahwa persoalan mendasar butuh pengawasan dan kerja publik sepanjang waktu.

Setiap tipe muncul dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya sama sama meyakini bahwa pergantian pemimpin melalui pemilu adalah jawaban utama. Kenyataannya perbaikan negara memerlukan pembenahan aturan dasar dan lembaga yang jauh lebih dalam daripada sekadar menunggu lima tahun sekali untuk mengganti presiden.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 6: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sistem Manajemen Tim Kesebelasan

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Ideal



SCAN ME

Gambar 32. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Ideal

Indonesia bisa diibaratkan sebagai sebuah tim sepak bola besar yang berlaga di kejuaraan dunia. Agar menang dan membawa pulang piala, seluruh elemen tim harus menjalankan peran masing masing dengan disiplin dan saling mendukung. Tidak ada satu pun posisi yang boleh diabaikan.

Kemenangan tim bukan sekadar hasil dari kemampuan individu, tetapi sinergi seluruh elemen yang memahami peran masing-masing. Jika satu posisi diabaikan, misalnya hukum lemah, pajak tidak dikelola dengan baik, atau ketergantungan pada utang berlebihan maka keseluruhan strategi akan terganggu. Sebaliknya, bila semua elemen dijalankan dengan tepat, tim Indonesia mampu bertahan, menyerang dengan efektif, dan bergerak maju menuju kemenangan.

Pelatih Ibarat MPR

MPR berperan sebagai pelatih. Tugasnya membaca permainan secara keseluruhan, merancang strategi, dan memberi arahan yang menjaga tim tetap pada jalur kemenangan.

Pelatih yang baik tidak ikut berlari di lapangan, tetapi otaknya menjadi pusat taktik agar seluruh pemain bergerak seirama demi tujuan bersama.

Kapten Ibarat Presiden

Presiden adalah kapten. Ia memimpin langsung di lapangan, mengatur irama permainan, dan memberi semangat kepada seluruh pemain. Kapten yang kuat bukan hanya piawai menggiring bola, tetapi juga mampu menjaga kekompakan tim ketika situasi menekan.

Pemain Bertahan Ibarat DPR

DPR berperan sebagai pemain bertahan. Mereka menjaga pertahanan agar lawan tidak mudah menyerang. Posisi ini penting untuk mengawal kebijakan dan mengawasi eksekutif sehingga tidak terjadi kebobolan kebijakan yang merugikan rakyat.

Kiper Ibarat Kemenkeu/DJP

Kemenkeu dan DJP berfungsi seperti kiper. Kiper menjadi benteng terakhir yang menyaring bola agar gawang tetap aman. Dalam konteks negara, peran ini berarti mengelola anggaran dan pajak dengan cermat supaya keuangan negara tetap terjaga dan tidak jebol.

Gelandang Bertahan Ibarat Hukum & Lembaga Pengawas

Hukum dan lembaga pengawas adalah gelandang bertahan. Mereka menetralkan serangan lawan, menjaga keseimbangan permainan, dan memastikan bola dapat kembali dikuasai tim. Ketegasan hukum yang adil membuat tim tetap solid dan tidak mudah diacak acak.

Pemain merasa aman, strategi bisa dijalankan dengan lebih efektif, dan solidaritas tim terjaga. Tanpa gelandang bertahan ini, tim mungkin bisa menyerang dengan agresif, tetapi mudah terpecah oleh tekanan lawan dan kehilangan kontrol atas permainan.

Tenaga/Oksigen Ibarat Pajak Rakyat

Pajak rakyat adalah oksigen yang memberi tenaga. Dengan pasokan energi yang cukup dan sehat, seluruh pemain dapat berlari penuh stamina. Pajak yang dikelola dengan jujur dan bijak menjadi bahan bakar yang membuat seluruh sistem pemerintahan bergerak.

Dengan pasokan pajak yang sehat, pemerintah mampu menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan layanan publik yang membuat "lapangan permainan" lebih aman dan produktif. Pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan masyarakat menjadi lebih terjamin, sehingga setiap warga dan sektor kehidupan bisa beroperasi dengan maksimal.

Pemain Pinjaman Ibarat Utang Luar Negeri

Utang luar negeri ibarat pemain pinjaman. Kehadirannya hanya sebagai pelengkap bila benar benar diperlukan. Pemain pinjaman tidak boleh menjadi andalan utama, hanya membantu ketika kondisi tim membutuhkan tenaga ekstra dalam jangka pendek.

Penjaga Stadion Ibarat TNI-Polri

TNI dan Polri adalah penjaga stadion. Mereka memastikan penonton merasa aman dan nyaman, menjaga agar pertandingan berlangsung tertib. Tanpa keamanan, strategi sehebat apa pun bisa kacau karena gangguan dari luar.

Penonton Ibarat Rakyat sekaligus Pemilik Klub

Rakyat adalah para penonton sekaligus pemilik klub. Mereka bukan sekadar menyaksikan dari tribun, melainkan pemilik sah yang menentukan arah masa depan tim. Suara dan dukungan mereka memberi semangat kepada seluruh pemain dan menjadi alasan utama tim bertanding.

Jika setiap peran dijalankan dengan benar, Indonesia akan tampil seperti kesebelasan yang solid. Pelatih membaca permainan dengan tajam, kapten memimpin dengan berani, para pemain menjalankan posisi masing masing tanpa ego, dan pemilik klub merasa bangga.

Dengan sistem manajemen tim sepak bola yang ideal, bangsa ini mampu mencetak gol kemenangan berupa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau



SCAN ME

Gambar 33. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau

Dalam kondisi ideal, seluruh posisi di dalam tim bekerja rapi dan saling menopang. Namun kini tim ini seperti kesebelasan yang manajemennya berantakan. Hampir setiap posisi tidak lagi menjalankan tugasnya, sehingga permainan kacau dan skor terus tertinggal.

Pelatih yang diibaratkan MPR kehilangan peran sebagai otak tim. Mata dan telinganya seperti ditutup sehingga tidak tahu arah pertandingan. Tanpa panduan taktik yang jelas, para pemain di lapangan kehilangan pegangan. Tim berjalan tanpa strategi yang kokoh.

Kapten yang diibaratkan Presiden mengalami malfungsi. Instruksi sering salah, operan bola kerap melenceng. Pemain yang seharusnya menjadi pengatur irama justru membingungkan rekan satu tim dan membuat lawan lebih mudah menyerang.

Pemain bertahan yang mewakili DPR tampak lemah. Pertahanan yang semestinya menjadi benteng kokoh justru mudah ditembus. Lawan dengan

kepentingan sempit leluasa masuk ke area pertahanan kebijakan tanpa ada pengawasan ketat.

Kiper yang mewakili Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak bocor. Gawang negara sering kebobolan dan keuangan jebol. Ketika kebobolan tak terkendali, tim meminta bantuan utang dari luar sekadar untuk menutup kekurangan, membuat ketergantungan semakin dalam.

Gelandang bertahan yang diibaratkan hukum dan lembaga pengawas keropos. Mereka gagal menetralkan pelanggaran dan malah memberi celah bagi lawan untuk mengatur serangan. Aturan yang seharusnya menjaga keseimbangan lapangan tidak lagi dihormati.

Tenaga atau oksigen yang melambangkan pajak rakyat diperas habis. Energi yang seharusnya membuat pemain berlari penuh stamina terbuang tidak efisien. Pemain ngos ngosan, kekuatan menurun, dan tempo permainan melemah.

Pemain pinjaman yang menggambarkan utang luar negeri berubah menjadi andalan utama. Tim terlalu bergantung pada tenaga tambahan dari luar karena pemain inti tidak mampu menopang permainan sendiri. Ketergantungan ini membuat tim kehilangan kemandirian dan mudah diatur pihak luar.

Penjaga stadion yang melambangkan TNI dan Polri lebih sibuk mengawasi aturan di luar lapangan daripada menjaga jalannya pertandingan. Ketika pelatih dibutakan dan arah permainan kacau, mereka diam saja dan tidak memberi perlindungan yang dibutuhkan agar permainan tetap adil.

Penonton yang mewakili rakyat sebagai pemilik klub hanya bisa menyaksikan tim kesayangannya kalah berulang kali. Untuk menutupi kekecewaan, mereka disuguhi hiburan semu berupa gosip, adu domba, dan berita yang memecah belah. Rakyat yang seharusnya menjadi pemilik sah tim justru dipinggirkan, hanya menjadi penonton yang pasrah.

Beginilah potret kesebelasan bernama Indonesia saat ini. Tim besar yang semestinya mampu menorehkan kemenangan demi kemenangan justru terpuruk karena hampir semua peran penting gagal dijalankan. Tanpa pembenahan manajemen dan pengembalian peran setiap posisi, tim ini akan terus kalah di hadapan lawan yang makin tangguh.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau



SCAN ME

Gambar 34. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau

Sebuah tim sepak bola yang terus menerus kalah bukan hanya perlu pergantian pemain, tetapi pembenahan manajemen secara menyeluruh. Begitu

juga dengan Indonesia. Ketika peran pelatih, kapten, pemain, dan penjaga stadion tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, yang dibutuhkan bukan sekadar ganti satu dua figur, melainkan perombakan total pada cara mengelola tim.

Langkah pertama adalah memulihkan peran pelatih yang melambangkan MPR. MPR perlu kembali menjadi pusat strategi yang merancang arah permainan dan memastikan seluruh posisi bekerja untuk kemenangan bersama. Ketika pelatih kembali bisa melihat dan mendengar dengan jernih, taktik yang disusun akan memberi arah yang jelas bagi seluruh pemain.

Kapten yang diibaratkan Presiden harus kembali memimpin di lapangan dengan tegas dan visioner. Ia perlu mengatur ritme permainan, menjaga kekompakan, dan memastikan setiap operan tidak melenceng. Kapten yang kuat akan menyalurkan semangat kepada semua pemain agar tetap fokus mengejar gol kemenangan rakyat.

Pemain bertahan yang mewakili DPR perlu diperkuat agar pertahanan kebijakan negara tidak mudah ditembus kepentingan sempit. DPR harus kembali memainkan peran pengawasan yang kritis dan konstruktif sehingga serangan lawan berupa praktik korupsi atau kebijakan yang merugikan rakyat dapat dipatahkan.

Kiper yang melambangkan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak harus kembali andal menjaga gawang keuangan negara. Kebocoran perlu ditutup dengan pengelolaan pajak yang

transparan dan anggaran yang akuntabel. Dengan begitu, tim tidak lagi harus bergantung pada utang luar negeri untuk menutupi kegagalan.

Gelandang bertahan yang melambangkan hukum dan lembaga pengawas perlu dikokohkan agar sanggup menetralkan pelanggaran. Penegakan hukum yang adil akan menahan setiap manuver kotor dan menjaga keseimbangan permainan.

Pajak rakyat yang menjadi sumber tenaga harus dikelola secara sehat. Energi yang dipungut dari rakyat wajib dipakai secara efisien sehingga seluruh pemain, dari lini depan hingga belakang, dapat berlari dengan stamina penuh.

Utang luar negeri sebaiknya diposisikan sebagai pemain pinjaman yang hanya dipakai ketika benar benar darurat. Tim harus mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak terus menerus bergantung pada tenaga dari luar agar tidak kehilangan kemandirian.

TNI dan Polri yang berperan sebagai penjaga stadion perlu kembali fokus menjamin keamanan pertandingan, bukan sekadar mengatur penonton. Dengan keamanan yang terjaga, seluruh pemain dapat berkonsentrasi pada strategi dan eksekusi di lapangan.

Rakyat sebagai penonton sekaligus pemilik klub harus diberi ruang untuk benar benar menentukan arah tim. Dukungan mereka bukan hanya sorakan di tribun, melainkan kekuatan kedaulatan yang menggerakkan seluruh elemen tim untuk bermain bersih dan memenangkan pertandingan.

Perbaikan seperti ini membutuhkan tim ahli manajemen yang terdiri dari para intelektual,

budayawan dan pemangku adat, rohaniawan, serta unsur TNI dan Polri yang bersatu padu. Mereka berperan layaknya konsultan sepak bola profesional yang merancang reformasi besar, memastikan transparansi, menegakkan keseimbangan kekuasaan, dan mengembalikan kedaulatan kepada pemilik sejati, yaitu rakyat.

Jika semua elemen kembali pada perannya masing masing dan manajemen tim dibenahi secara menyeluruh, Indonesia dapat bangkit sebagai kesebelasan yang solid. Dari tim yang sebelumnya selalu kalah, berubah menjadi kesebelasan yang kembali mencetak gol kemenangan: kesejahteraan, keadilan, dan kedaulatan rakyat.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 35. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau?

Sering muncul anggapan bahwa pergantian presiden otomatis akan membawa perubahan besar.

Namun kenyataannya, perjalanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh satu sosok di puncak kekuasaan.

Bayangkan sebuah tim sepak bola besar. Kapten lapangan memang pemimpin permainan, tapi keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada dirinya. Tanpa pelatih yang jeli membaca arah pertandingan, tanpa lini belakang yang disiplin, tanpa kiper yang tangguh, dan tanpa manajemen klub yang rapi, tim tidak akan pernah juara meskipun kaptennya berganti setiap musim.

Kondisi Indonesia pun serupa. Setelah amandemen UUD 1945 tahun 2001, kekuasaan tersebar ke banyak lembaga: MPR sebagai pelatih, DPR sebagai pemain bertahan, Kementerian Keuangan dan DJP sebagai kiper, lembaga hukum dan pengawas sebagai gelandang bertahan, hingga partai politik dan berbagai aktor lain yang ikut mengatur jalannya pertandingan.

Mengganti presiden sama pentingnya dengan menunjuk kapten baru, tapi itu bukan solusi tunggal. Jika pelatih tetap tidak punya strategi, pemain belakang tetap rapuh, dan manajemen tetap amburadul, tim tetap akan kalah berapa pun kali kaptennya diganti.

Begitu pula dengan negara. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap manajemen kekuasaan dan sistem lembaga negara, pergantian presiden hanya akan mengulang siklus lama. Kemenangan yang diharapkan rakyat tidak akan datang dari satu figur saja, melainkan dari keseriusan membenahi seluruh elemen tim agar bisa bermain sebagai kesatuan yang kuat.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 36. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau

Banyak orang percaya pergantian pemimpin otomatis akan membawa perubahan besar. Berikut beberapa tipe orang yang terlalu mengandalkan sosok tunggal:

- **Pemikir Berfokus pada Pemimpin (Leader-Centric Thinker)**: Tipe orang yang percaya bahwa keberhasilan tim atau negara sepenuhnya ditentukan oleh sosok pemimpin. Dalam analogi sepak bola, mereka hanya berharap kapten baru bisa membawa kemenangan tanpa memperhatikan strategi pelatih, koordinasi lini belakang, atau peran kiper.
- **Penyembah Tokoh (Hero Worshipper / Cult of Personality)**: Terlalu mengidolakan figur tunggal dan yakin satu "pahlawan" bisa menyelamatkan situasi. Dalam tim, mereka menganggap kapten sebagai penyelamat tim,

padahal banyak posisi lain yang juga menentukan hasil pertandingan.

- **Pemikir Sederhana (Oversimplifier / Simplistic Thinker)**: Menyederhanakan masalah kompleks menjadi satu solusi tunggal. Dalam analogi sepak bola, mereka mengira cukup mengganti satu orang saja untuk mengubah hasil pertandingan, tanpa memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi kemenangan.
- **Mentalitas Titik Tunggal Kegagalan (Single-Point-of-Failure Mentality)**: Berpikir satu titik saja menentukan keberhasilan atau kegagalan keseluruhan. Dalam tim, jika kapten gagal, tim pasti kalah, padahal kiper, lini belakang, dan strategi pelatih juga sangat krusial.

Dengan memahami tipe-tipe orang yang terlalu mengandalkan sosok tunggal, kita bisa lebih bijak melihat perubahan yang sebenarnya diperlukan. Pergantian pemimpin memang penting, tapi tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem, strategi, dan koordinasi seluruh elemen, perubahan yang diharapkan sulit terwujud.

Sama seperti tim sepak bola, kemenangan hanya akan datang jika semua posisi bekerja sama, setiap pemain memahami perannya, dan manajemen tim menjalankan strategi dengan disiplin. Kesadaran ini menegaskan bahwa reformasi sejati memerlukan pendekatan holistik, bukan sekadar mengganti kapten atau presiden semata.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 37. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau?

Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia disuguhi sebuah pesta besar. Spanduk bertebaran, janji-janji dilontarkan, dan sorak-sorai memenuhi ruang publik. Banyak yang menaruh harapan besar pada momen itu, seolah-olah semua persoalan bangsa bisa selesai hanya dengan menaruh satu suara di bilik pemilihan.

Namun, sejarah panjang perjalanan bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan sejati tidak pernah lahir dari momen singkat semata. Pemilu memang penting sebagai sarana pergantian kepemimpinan, tetapi ia bukan obat mujarab yang otomatis menyembuhkan segala kerusakan dalam tubuh negara.

Tidak cukup hanya menunggu pemilu lima tahunan. Pemilu hanyalah satu mekanisme pergantian kepemimpinan, bukan jawaban atas seluruh masalah

bangsa. Jika rakyat hanya pasif dan menunggu momen lima tahunan, maka yang terjadi hanyalah pergantian wajah, sementara pola lama tetap berulang.

Bangsa ini membutuhkan keterlibatan rakyat setiap hari. Rakyat bukan sekadar penonton di tribun yang hanya bersorak saat pertandingan dimulai, melainkan pemilik sah klub bernama Indonesia. Sebagai pemilik, rakyat harus terus mengawasi jalannya permainan: memastikan setiap aturan ditegakkan, menjaga agar sumber daya bangsa tidak disalahgunakan, serta memberi koreksi ketika pemain atau pelatih keluar jalur.

Keterlibatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara sederhana: memperjuangkan keadilan di lingkungan sekitar, menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, mendukung gerakan yang membela kepentingan bersama, hingga berani bersuara ketika kebijakan menyimpang dari kepentingan rakyat. Langkah-langkah kecil ini adalah bentuk nyata energi rakyat yang menjaga stamina bangsa tetap kuat sepanjang waktu.

Tanpa itu, pemilu hanya akan menjadi pesta lima tahunan yang meriah di permukaan tetapi kosong makna. Namun bila rakyat aktif setiap hari, negara ini tidak sekadar berganti kapten, melainkan benar-benar memperkuat seluruh tim sehingga kemenangan berupa kesejahteraan dan keadilan dapat diraih.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 38. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Sistem Manajemen Tim Kesebelasan Kacau

Dalam perjalanan bangsa, selalu ada kelompok orang yang menaruh harapan besar hanya pada momen lima tahunan. Mereka mengira satu kali mencoblos sudah cukup untuk mengubah nasib negara.

Padahal, tanpa keterlibatan rakyat setiap hari, pemilu hanyalah pergantian wajah tanpa perubahan mendasar. Untuk memahami sikap ini, mari kita lihat tipe-tipe manusia yang sering terjebak dalam pola pikir sempit tersebut.

- **Tipe Penonton Pasif** (*The Passive Spectator*) Hanya hadir saat pemilu, sekadar mencoblos, lalu kembali diam. Mereka menonton jalannya negara dari tribun tanpa merasa perlu ikut mengawasi atau mengingatkan pemain yang salah langkah.

- **Tipe Penggantung Harapan Tunggal** (*Single Hope Believer*)
  Percaya satu sosok baru akan otomatis membawa perubahan besar. Mereka lupa bahwa keberhasilan tim tidak pernah ditentukan oleh kapten saja, melainkan oleh keseluruhan sistem.
- **Tipe Pelupa Sejarah** (*The Forgetful*)
  Mudah terbuai janji baru setiap lima tahun, seakan lupa bahwa janji serupa sering diulang tanpa pernah ditepati. Mereka mengulang kesalahan yang sama tanpa belajar dari pengalaman.
- **Tipe Penikmat Seremonial** (*The Festive Enjoyer*)
  Menganggap pemilu sebagai hiburan semata. Mereka lebih sibuk menikmati keramaian, kampanye, dan euforia pesta lima tahunan, tapi tidak peduli pada perjalanan bangsa setelah pesta usai.
- **Tipe Penyerah Nasib** (*The Resigned*)
  Merasa tanggung jawab selesai setelah memberi suara. Setelah itu, mereka menyerahkan seluruh kendali pada segelintir orang, seakan masa depan bangsa bukan lagi urusan mereka.

Kelima tipe manusia ini sama-sama terjebak dalam ilusi bahwa perubahan cukup ditunggu, bukan diperjuangkan. Padahal, tanpa keterlibatan rakyat setiap hari, bangsa ini hanya akan berjalan di tempat meski kapten dan pelatih berganti.

Kesadaran untuk keluar dari tipe-tipe pasif inilah yang akan menentukan apakah Indonesia tetap menjadi

penonton di panggung dunia, atau bangkit sebagai kesebelasan tangguh yang benar-benar mampu mencetak kemenangan untuk rakyatnya.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 7: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Sistem Manajemen Perkebunan

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Ideal



SCAN ME

Gambar 39. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Ideal

Indonesia adalah sebuah kebun besar yang penuh potensi. Setiap sudut tanah bisa subur, setiap pohon bisa berbuah, dan setiap warga bisa menikmati hasilnya. Agar kebun ini benar-benar berkembang, semua unsur harus bekerja sama, saling menjaga, dan saling melengkapi.

Pemilik Kebun Ibarat Rakyat

Di kebun ini, Pemilik Kebun adalah rakyat. Mereka berhak merawat tanah, melihat pohon tumbuh, dan menikmati hasil panen dengan adil. Kepuasan dan kesejahteraan mereka menjadi ukuran utama keberhasilan kebun.

Tanpa pemilik yang aktif, kebun bisa saja dikuasai sepihak atau hasil panen tidak sampai ke tangan yang seharusnya.

Dewan Pengawas Ibarat MPR

Menjaga keseimbangan kebun menjadi tugas Kuasa Pemilik yaitu Dewan Pengawas ibarat MPR. Mereka menjadi mata, telinga, dan suara rakyat.

Dengan cermat, mereka memastikan Mandor Kebun yaitu presiden bekerja dengan jujur dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tanpa pengawas yang kuat, panen bisa disalahgunakan dan kebun tidak akan tumbuh dengan sehat.

Mandor Kebun Ibarat Presiden

Mandor Kebun atau presiden bertugas merawat dan mengatur kebun. Mereka memastikan pohon-pohon tumbuh subur, air dan pupuk terdistribusi merata, serta laporan kondisi kebun disampaikan dengan jujur kepada pengawas. Jika mandor lalai, pohon bisa layu dan hasil panen menurun.

Pengatur Air dan Pupuk Ibarat DPR

Agar semua tanaman mendapat nutrisi dan pertumbuhan terjaga, hadir Pengatur Air dan Pupuk yaitu DPR. Mereka menjaga saluran air tetap lancar, memastikan pupuk sampai ke semua pohon, dan membuat aturan agar kebun tumbuh sehat. Tanpa pengatur ini, kebun akan kacau, tanaman tidak merata, dan panen menjadi tidak adil.

Penjaga Hama dan Kualitas Ibarat Sistem Hukum dan Lembaga Pengawas

Menjaga kualitas dan keamanan kebun menjadi tugas Penjaga Hama dan Kualitas yaitu sistem hukum dan lembaga pengawas. Mereka melindungi kebun dari hama, pencurian, dan kerusakan.

Dengan keberadaan mereka, panen bisa dibagi adil dan setiap warga menikmati hasil kebun tanpa ada yang dirugikan.

Buah Kebun Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Hasil akhirnya adalah Buah Kebun yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Buahnya melimpah, manis, dan bisa dinikmati semua warga.

Kebun ini berhasil bukan karena satu mandor saja tetapi karena seluruh elemen bekerja sebagai satu kesatuan rakyat, pengawas, mandor, pengatur air, dan penjaga hama.

Inilah Indonesia yang ideal, sebuah negara yang dikelola seperti kebun yang matang. Setiap peran dijalankan dengan tanggung jawab, setiap elemen bekerja sama, dan setiap warga mendapatkan bagian yang adil. Saat semua elemen harmonis, negara pun berbuah untuk seluruh rakyatnya.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Kacau



SCAN ME

Gambar 40. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Sistem Manajemen Perkebunan Kacau

Memiliki sistem manajemen perkebunan ideal seperti di bab sebelumnya memang impian Bangsa Indonesia. Pasalnya, Indonesia saat ini seperti sebuah kebun yang luas namun tidak sehat. Tanahnya subur, pohonnya tinggi, tapi banyak pohon yang rusak dan buah tidak berbuah. Semua elemen kebun tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil panen tidak sampai ke tangan rakyat.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Pemilik Kebun Ibarat Rakyat

Di kebun ini, Pemilik Kebun yaitu rakyat tidak bisa melihat kebun sendiri karena ditutupi tembok tinggi. Mereka dibatasi dan dijaga dari luar oleh TNI dan dari dalam oleh Polri. Tanpa akses melihat kondisi kebun, rakyat tidak tahu pohon mana yang sehat, mana yang rusak, dan hanya bisa menerima apa yang ditunjukkan.

Dewan Pengawas Ibarat MPR

Kuasa Pemilik atau Dewan Pengawas ibarat MPR matanya ditutup dengan kain dan tidak mengetahui keadaan kebun. Mandor Kebun yaitu presiden bebas mengatur dan merawat kebun tanpa pengawasan berarti. Tanpa pengawas yang aktif, kebun tidak pernah diperiksa dengan jujur dan mandor bisa melakukan apa saja.

Mandor Kebun Ibarat Presiden

Mandor Kebun membuat narasi yang mengecoh. Mereka menggambarkan kebun seolah subur dan berbuah lebat, padahal banyak pohon rusak dan saluran air tersumbat. Cerita tentang panen melimpah disebarkan agar rakyat percaya kebun dikelola dengan baik, sementara kenyataannya jauh dari itu.

Pengatur Air dan Pupuk Ibarat DPR

Pengatur Air dan Pupuk yaitu DPR menyumbat saluran air dan pupuk. Aturan yang dibuat lebih menguntungkan mandor dan elite daripada rakyat. Tanaman tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, pohon-pohon penting kering, dan pertumbuhan kebun menjadi timpang.

Penjaga Hama dan Kualitas Ibarat Sistem Hukum dan Lembaga Pengawas

Penjaga Hama dan Kualitas yaitu sistem hukum dan lembaga pengawas ikut menikmati upeti dari hasil kebun.

Mereka membiarkan pohon sakit, bahkan kadang menyalahkan pemilik kebun saat panen gagal.

Tanpa perlindungan yang adil, kebun menjadi tempat harta menumpuk bagi segelintir orang.

Buah Kebun Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Hasil akhirnya adalah Buah Kebun yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial tidak pernah nyata. Pohon tidak berbuah dan panen hanya terlihat dari permukaan.

Mandor membeli buah dari supermarket dengan utang dan menunjukkannya seolah hasil panen sendiri kepada rakyat. Rakyat melihatnya dan percaya, padahal itu bukan buah kebun mereka sendiri.

Indonesia saat ini seperti kebun yang dikelola dengan salah, di mana semua peran penting telah rusak dan bekerja untuk kepentingan segelintir orang. Kebun yang seharusnya memberi kehidupan dan kesejahteraan untuk semua rakyat, justru menjadi simbol ketidakadilan, kepalsuan, dan kerusakan sistem.

Perumpamaan ini menunjukkan bahwa tanpa peran masing-masing elemen dijalankan secara benar dan terkoordinasi, bahkan sumber daya yang melimpah pun bisa menjadi sia-sia dan merugikan banyak pihak.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Perkebunan Kacau



SCAN ME

Gambar 41. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Sistem Manajemen Perkebunan Kacau

Indonesia dapat dianalogikan seperti sebuah kebun besar yang memiliki tanah subur, pohon berbuah, serta para pekerja yang mengelolanya. Sebagaimana kebun membutuhkan manajemen yang sehat agar hasilnya melimpah dan bermanfaat, demikian pula Indonesia membutuhkan tata kelola yang benar agar rakyatnya sejahtera. Jika manajemennya rusak, kebun tidak akan produktif bahkan menjadi sumber masalah. Gambaran ini mencerminkan bagaimana Indonesia akan menghadapi berbagai krisis ketika sistem pengelolaan negaranya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam kondisi manajemen perkebunan yang rusak, para pengelola lebih sibuk berkumpul di balik tembok tinggi. Mereka berpesta dan membagi hasil untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, para pekerja di lapangan kebingungan karena tidak ada arahan yang jelas.

Aparat keamanan hanya berjaga di pagar kebun untuk membatasi rakyat agar tidak menuntut haknya. Sementara itu, lahan yang mestinya subur justru dibiarkan kering dan tidak menghasilkan buah yang berguna. Situasi ini melukiskan bagaimana Indonesia kehilangan arah ketika kepemimpinan hanya berputar pada kepentingan segelintir elite, sementara rakyat sebagai pemilik sah negeri justru terabaikan.

Namun kerusakan itu bukanlah akhir dari segalanya. Indonesia masih bisa dipulihkan sebagaimana kebun yang rusak masih dapat diselamatkan. Solusinya adalah menghadirkan tim ahli manajemen bidang pertanian sebagai simbol dari tokoh intelektual, budayawan, tokoh adat, rohaniawan, serta TNI dan Polri yang memiliki kepedulian dan integritas tinggi.

Mereka tidak cukup melakukan perbaikan kecil di permukaan, melainkan melakukan perubahan menyeluruh mulai dari perbaikan sistem audit, penerapan transparansi panen, pengaturan jalur distribusi, hingga pembagian hasil yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan semacam ini akan menjadikan proses pengelolaan negara lebih transparan. Laporan hasil panen menjadi jelas, pengawasan dapat dilakukan secara bersama, dan akuntabilitas ditegakkan. Tidak ada lagi praktik tertutup di balik tembok melainkan keterbukaan yang memberi ruang bagi rakyat Indonesia untuk mengetahui, mengawasi, sekaligus merasakan manfaat hasil kebun negeri mereka. Perbaikan menyeluruh inilah yang menjadi titik balik, dari

Indonesia yang dikelola secara rusak menuju Indonesia yang kembali produktif dan sejahtera.

Dalam kondisi ideal, Indonesia menjadi seperti kebun yang subur dan tertata rapi. Rakyat sebagai pemilik sejati dapat masuk dengan leluasa untuk menikmati hasilnya. Pengelola kebun bekerja jujur, transparan, dan tunduk pada aturan yang disepakati bersama.

Dewan pengawas yang diwakili MPR bersama rakyat berfungsi menjaga agar manajemen tetap pada jalurnya. Aparat keamanan tidak lagi menutup akses rakyat, melainkan menjadi penjaga agar kebun tetap aman dan hasilnya tidak dirampas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi seperti inilah yang mencerminkan Indonesia yang dicita-citakan. Sistem manajemen berjalan sesuai tujuan, kekayaan negeri dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan jarak antara penguasa dengan rakyat terhapuskan.

Indonesia yang baik adalah Indonesia yang kebunnya dikelola dengan benar, subur, adil, serta memberi manfaat bagi semua tanpa terkecuali.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 42. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau?

Sering kali dalam kegelisahan melihat kondisi Indonesia, rakyat berpikir bahwa solusi paling mudah adalah mengganti presiden. Pandangan ini muncul karena presiden dianggap sebagai tokoh tertinggi dalam kepemimpinan nasional, simbol yang paling terlihat, sekaligus pihak yang langsung berhubungan dengan kebijakan negara. Namun pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah benar cukup hanya dengan mengganti presiden untuk memperbaiki kerusakan yang sudah mengakar dalam sistem pengelolaan negara?

Jika kembali pada analogi perkebunan, seorang mandor memang berperan penting dalam mengatur kebun. Tetapi kebun tidak akan berubah hanya dengan mengganti mandor, selama sistem yang dipakai tetap rusak, para pengawas tidak bekerja, dan para pekerja dibiarkan tanpa arahan.

Pergantian mandor mungkin memberi semangat baru, tetapi jika pola manajemennya tidak dibenahi, kebun akan tetap gagal panen. Begitu pula dengan Indonesia, mengganti presiden saja tidak akan cukup apabila sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, dan pengawasan masih dibiarkan rusak.

Masalah utama Indonesia bukan hanya terletak pada siapa yang memimpin, melainkan pada bagaimana sistem dijalankan. Presiden baru yang masuk dalam sistem lama seringkali terjebak pada pola lama.

Ia bisa saja berniat baik, tetapi akan menghadapi tembok kekuasaan, kepentingan oligarki, serta aturan main yang memang sudah disusun untuk mempertahankan status quo. Tanpa perubahan mendasar pada sistem manajemen negara, presiden baru hanya menjadi pengelola yang bekerja di atas kerangka yang rapuh.

Karena itu, perbaikan Indonesia harus dilihat sebagai upaya bersama. Presiden hanyalah salah satu bagian dari manajemen negara. Ia memang penting, tetapi bukan satu-satunya kunci. Diperlukan keterlibatan tokoh intelektual, budayawan, tokoh adat, rohaniawan, TNI, Polri, serta rakyat sendiri dalam merombak pola pengelolaan yang ada. Ketika sistem diperbaiki secara menyeluruh, maka siapapun yang duduk sebagai presiden akan bekerja dalam kerangka yang sehat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan "Apakah cukup mengganti presiden?" adalah tidak.

Pergantian presiden hanyalah langkah awal, bukan akhir. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem manajemen negara yang benar, adil, dan produktif.

Jika sistem sudah diperbaiki, maka siapapun pemimpin yang terpilih akan lebih mudah menjalankan amanahnya. Indonesia tidak lagi bergantung pada figur semata, melainkan berdiri di atas fondasi tata kelola negara yang kokoh dan berpihak pada seluruh rakyat.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 43. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau

Dalam kehidupan bernegara, sering kali muncul pola pikir sederhana bahwa cukup mengganti presiden maka semua persoalan bangsa akan selesai. Pola pikir ini tumbuh dari kekecewaan rakyat terhadap pemimpin yang sedang berkuasa.

Tipe-tipe orang yang masuk golongan ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

- **Tipe Praktis-Instan (Practical-Quick Fix Type):** Mereka tidak mau repot memahami kerumitan sistem tata kelola negara. Menurut mereka, membicarakan perbaikan lembaga, aturan, dan budaya birokrasi terlalu panjang. Maka jalan cepat yang mereka tawarkan adalah ganti orang di puncak.
- **Tipe Pengikut Arus (Conformist-Follower Type):** Sebagian orang terbentuk oleh opini di sekitar. Jika lingkungan sosialnya ramai menyerukan ganti presiden, mereka ikut serta meski tidak memahami substansi persoalan. Bagi mereka, ikut arus lebih mudah daripada berpikir mendalam.
- **Tipe Perlawanan Kekuasaan (Power-Resistance Type):** Mereka yang kecewa atau tersisih dari lingkaran kekuasaan. Pergantian presiden dilihat sebagai kesempatan untuk membalik keadaan, sehingga semangatnya lebih pada perebutan kursi, bukan perbaikan sistem.

Ketiga tipe ini tidak selalu berdiri sendiri. Kadang dalam satu orang bisa bercampur antara kekecewaan emosional, cara pandang simbolik, dan keinginan instan. Yang jelas, pola pikir ini lahir dari ketidakpuasan, tetapi belum menyentuh akar masalah, yaitu perlunya perbaikan sistem tata kelola Indonesia secara menyeluruh.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 44. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau?

Bagi sebagian orang, pemilu lima tahunan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan bangsa. Mereka beranggapan bahwa cukup dengan menunggu pergantian pemimpin lewat pemilu, semua masalah akan terselesaikan. Pemilu memang penting, sebab ia menjadi sarana rakyat memilih wakil dan pemimpin secara sah, terbuka, serta demokratis. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya menunggu pemilu lima tahunan untuk membawa perubahan nyata bagi Indonesia?

Jika kembali pada analogi perkebunan, menunggu pemilu lima tahunan sama seperti membiarkan kebun rusak selama bertahun-tahun hanya karena menunggu manajer baru datang. Padahal selama menunggu, pohon-pohon terus mengering, tanah kehilangan kesuburan, dan para pekerja semakin

menderita. Manajer baru memang bisa membawa angin segar, tetapi kerusakan yang menumpuk selama lima tahun tentu tidak bisa langsung dipulihkan begitu saja.

Begitu pula dengan Indonesia. Masalah bangsa tidak bisa hanya diatasi dengan menunggu momentum pemilu. Perbaikan harus berjalan setiap hari melalui keterlibatan rakyat, pengawasan yang konsisten, penegakan aturan yang adil, serta komitmen bersama untuk menjaga agar sistem tetap sehat. Pemilu hanyalah salah satu instrumen demokrasi, bukan solusi tunggal.

Jika rakyat hanya menunggu pemilu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengawasi dan memperbaiki jalannya negara di tengah periode pemerintahan. Sikap pasif ini membuat kekuasaan berjalan tanpa kontrol, sehingga potensi penyimpangan semakin besar. Sebaliknya, jika rakyat aktif mengawasi dan menuntut transparansi sejak awal, maka pemilu lima tahunan hanyalah penguat dari proses perubahan yang sudah berlangsung, bukan satu-satunya harapan.

Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan "Apakah cukup menunggu pemilu lima tahunan?" adalah jelas tidak. Perubahan sejati membutuhkan keterlibatan rakyat secara terus-menerus, bukan hanya lima tahun sekali. Indonesia akan lebih cepat pulih jika rakyat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas, penggerak, dan penjaga kebun besar bernama negara ini.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 45. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tim Manajemen Perkebunan Kacau

Selain pola pikir bahwa cukup mengganti presiden untuk menyelesaikan masalah, ada pula pola pikir lain yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu keyakinan bahwa cukup menunggu pemilu lima tahunan maka perubahan akan datang dengan sendirinya. Pola pikir ini lahir dari pandangan bahwa pemilu adalah puncak dari demokrasi, sehingga semua solusi dianggap bisa selesai hanya lewat mekanisme itu. Padahal, bangsa sebesar Indonesia tidak mungkin diselamatkan hanya dengan menunggu lima tahun sekali.

Mereka yang berpola pikir seperti ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe:

- **Tipe Pasif (*Passive Waiter Type*):** Tipe ini lebih memilih diam dan menunggu momen pemilu

tanpa mau ikut serta dalam proses pengawasan. Mereka beranggapan bahwa tugas rakyat hanya datang ke bilik suara setiap lima tahun.

- **Tipe Legalis-Formal (*Legalist-Formal Type*)**: Tipe ini meyakini pemilu adalah satu-satunya mekanisme sah untuk memperbaiki negara. Segala bentuk kontrol di luar pemilu dianggap kurang penting, meski sebenarnya pengawasan sehari-hari sama mendesaknya.
- **Tipe Apatis (*Apathetic Type*)**: Tipe ini sudah putus asa. Mereka merasa upaya perubahan di luar pemilu tidak ada gunanya. Satu-satunya harapan mereka hanyalah menunggu pergantian lewat pemilu, meskipun dalam hati tidak benar-benar yakin perubahan akan terjadi.
- **Tipe Penonton Demokrasi (*Spectator Type*)**: Mereka memperlakukan demokrasi seperti pertandingan. Pemilu dipandang sebagai hiburan lima tahunan, sementara di luar itu mereka hanya menonton jalannya pemerintahan tanpa ikut terlibat.
- **Tipe Penunda Perubahan (*Change-Delayer Type*)**: Mereka menunda segala bentuk aksi sosial atau dorongan perbaikan dengan alasan "tunggu saja pemilu berikutnya". Akibatnya, kerusakan dibiarkan menumpuk, dan ketika pemilu tiba, masalah sudah jauh lebih besar.

Kelima tipe ini menunjukkan bagaimana sebagian rakyat menyederhanakan proses perubahan hanya menjadi soal menunggu. Padahal, demokrasi yang sehat tidak berhenti di bilik suara, melainkan

hidup setiap hari melalui pengawasan rakyat, keterbukaan pemerintah, dan partisipasi bersama.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 8: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Pohon

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Pohon Subur



SCAN ME

Gambar 46. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Pohon Subur

Indonesia adalah sebuah pohon kehidupan yang tumbuh di tanah subur nusantara. Pohon ini bukan sekadar berdiri megah, tetapi memberi naungan, buah, dan udara segar bagi seluruh rakyat yang merawatnya. Dari pohon ini terpancar kehidupan negara yang sehat, adil, dan sejahtera.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Akar Pohon Ibarat Dasar Negara

Akar pohon adalah dasar negara. Akar yang kuat menyalurkan nilai-nilai luhur ke seluruh pohon. Pancasila, UUD 1945, dan semangat persatuan tertanam kokoh, sehingga bangsa tidak mudah goyah oleh konflik kepentingan atau tekanan asing. Akar yang sehat membuat masyarakat merasa aman karena mereka berdiri di atas fondasi yang pasti.

Batang Pohon Ibarat Konstitusi dan Sistem Hukum

Batang pohon adalah konstitusi dan sistem hukum. Batang yang lurus menandakan hukum tegak tanpa pandang bulu. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang bisa membengkokkan aturan demi kepentingan sempit. Dari batang ini, energi kehidupan mengalir ke seluruh cabang, menjamin rakyat terlindungi dan keadilan terwujud.

Ranting Besar Ibarat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional

Ranting besar adalah undang-undang dan kebijakan nasional. Ranting yang kokoh membuat arah pertumbuhan pohon jelas. Undang-undang yang berpihak pada rakyat memberi perlindungan sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan nasional yang sehat menjadikan rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Ranting Kecil Ibarat Peraturan dan Birokrasi

Ranting kecil adalah peraturan teknis dan birokrasi. Jika ranting kecil rapi, maka kebijakan berjalan lancar tanpa hambatan. Birokrasi yang sederhana, cepat, dan bersih menjadikan rakyat percaya bahwa negara benar-benar bekerja untuk mereka. Tidak ada lagi pungli, tumpang tindih aturan, atau pelayanan yang menyulitkan.

Daun Ibarat Kebijakan Daerah dan Implementasi Lapangan

Daun adalah kebijakan daerah dan implementasi lapangan. Daun yang rimbun melambangkan masyarakat yang hidup dalam kesejahteraan di setiap sudut negeri. Daerah tidak lagi tertinggal, karena aspirasi rakyat terserap dan dijawab dengan nyata. Dari kota hingga desa, rakyat merasakan manfaat langsung dari pohon negara.

Buah Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Buah adalah hasil akhir dari pohon Indonesia. Buah yang manis adalah simbol kesejahteraan, keadilan, dan martabat bangsa.

Pemilik Pohon Ibarat Rakyat

Setiap rakyat berhak memetiknya: pendidikan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, layanan kesehatan yang terjangkau, serta kehidupan yang damai. Tidak ada buah yang hanya dipetik oleh segelintir elite, karena pohon ini tumbuh untuk semua.

Jika pohon Indonesia subur, kehidupan bangsa akan damai dan penuh harapan. Rakyat merasa terlindungi, anak-anak tumbuh sehat dan berpendidikan, pemuda memiliki kesempatan untuk berkarya, orang tua tenang menjalani hari tua, dan generasi mendatang mewarisi pohon yang semakin kokoh. Pohon ini menjadi tempat berteduh bersama, sumber pangan, dan simbol keadilan sosial yang nyata.

Indonesia sebagai pohon ideal bukan hanya sebuah harapan, melainkan cita-cita yang bisa

diwujudkan jika rakyat benar-benar menjadi pemiliknya, merawat akarnya, menjaga batangnya, menata rantingnya, menyuburkan daunnya, dan berbagi buahnya. Dengan begitu, bangsa ini tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh subur dan memberi kehidupan bagi semua.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Pohon Sakit



SCAN ME

Gambar 47. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Pohon Sakit

Indonesia hari ini dapat dilihat sebagai sebuah pohon yang terlihat besar dari luar, tetapi sebenarnya sedang sakit. Rakyat sebagai pemilik pohon tidak lagi diberi kesempatan untuk merawatnya. Mereka hanya melihat seolah pohon masih menghasilkan buah, padahal buah itu bukan hasil asli dari pohon.

Akar Pohon Ibarat Dasar Negara

Akar pohon adalah dasar negara. Dalam kondisi sehat, akar seharusnya menancap dalam ke tanah dan menyerap nutrisi kehidupan berupa nilai-nilai luhur yang menjiwai seluruh bangsa.

Namun saat ini akar hanya menggantung di permukaan. Dasar negara lebih sering dijadikan slogan yang dihafalkan, bukan prinsip yang benar-benar dihayati. Karena akar tidak menyerap nutrisi, pohon kehilangan kekuatan untuk tumbuh dan tidak memiliki fondasi yang kokoh.

Batang Pohon Ibarat Konstitusi dan Sistem Hukum

Batang pohon adalah konstitusi dan sistem hukum. Batang yang sehat seharusnya kuat, lurus, dan tegak, menyalurkan energi dari akar ke seluruh bagian pohon. Kini batang tampak keropos, ditarik ke sana-sini oleh berbagai kepentingan.

Akibatnya hukum kehilangan wibawa, konstitusi mudah diubah sesuai selera, dan batang tidak lagi mampu menopang cabang-cabang di atasnya.

Ranting Besar Ibarat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional

Ranting besar adalah undang-undang dan kebijakan nasional. Dalam keadaan sehat, ranting besar memberikan arah pertumbuhan yang seimbang, menopang dedaunan, dan memperluas jangkauan pohon.

Namun saat ini ranting besar tampak bengkok. Undang-undang dan kebijakan banyak lahir dari kompromi elite, bukan dari kebutuhan rakyat. Alih-alih membuat pohon berkembang, ranting justru membuat pohon semakin berat menanggung dirinya sendiri.

Ranting Kecil Ibarat Peraturan dan Birokrasi

Ranting kecil adalah peraturan dan birokrasi. Ranting ini semestinya menyalurkan kehidupan hingga ke ujung daun, memastikan kebijakan nasional bisa sampai pada rakyat.

Tetapi kini ranting kecil kusut dan saling bertabrakan. Birokrasi berbelit, aturan tumpang tindih, dan aliran kehidupan yang seharusnya lancar menjadi tersumbat.

Daun Ibarat Kebijakan Daerah dan Implementasi Lapangan

Daun adalah kebijakan daerah dan pelaksanaan di lapangan. Daun yang sehat biasanya hijau, segar, dan menjadi dapur fotosintesis, tempat energi diolah dari cahaya matahari dan nutrisi tanah. Kini daun-daun layu.

Kebijakan di daerah sering tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Karena akar tidak memberi nutrisi, daun tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pohon tidak tersedia, dan kehidupan bangsa kehilangan tenaganya.

Buah Ibarat Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Buah yang tampak hanyalah hasil dari luar yang digantungkan oleh para tukang kebun untuk menutupi kenyataan bahwa pohon sudah rapuh dan hampir kehilangan daya hidupnya.

Buah adalah kesejahteraan dan keadilan sosial. Buah yang sehat adalah hasil dari pohon yang tumbuh

subur. Buah itu mestinya bisa dipetik dan dinikmati seluruh rakyat sebagai pemilik pohon.

Namun kini pohon hampir tidak menghasilkan buah. Yang muncul justru hama berupa korupsi, kesenjangan, dan ketidakpedulian yang merusak kehidupan.

Pemilik Pohon Ibarat Rakyat

Rakyat sebagai pemilik pohon hanya ditunjukkan ilusi. Tukang kebun menutupi keadaan sebenarnya dengan menggantungkan buah dari luar agar pemilik percaya pohon baik-baik saja.

Padahal pohon ini sedang sakit parah. Akar lemah, batang keropos, ranting kusut, daun layu, fotosintesis terhenti, dan buah asli tidak lagi hadir.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Pohon Sakit

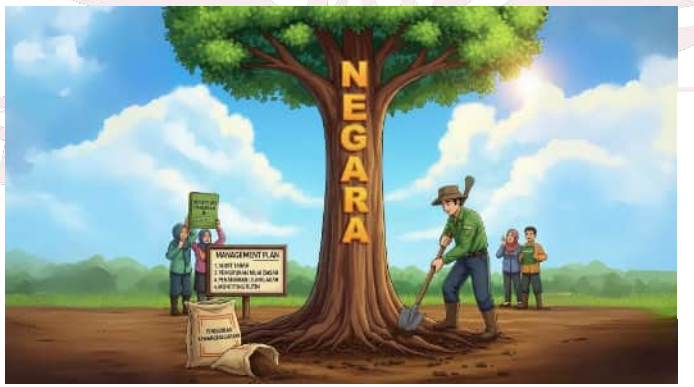

SCAN ME

Gambar 48. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Pohon Sakit

Pohon Indonesia yang sakit tidak boleh dibiarkan layu begitu saja. Ia adalah pohon kehidupan bagi seluruh rakyat, pohon yang mestinya

menghasilkan buah kesejahteraan dan keadilan. Agar pohon kembali sehat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan akarnya. Selama akar hanya menggantung di permukaan, pohon tidak akan mampu menyerap nutrisi yang dibutuhkan.

Untuk itu, rakyat sebagai pemilik pohon perlu menunjuk Tim Ahli Pertanian. Tim ini terdiri dari tokoh intelektual, budayawan dan pemuka adat, rohaniawan, serta TNI dan Polri yang memiliki tanggung jawab menjaga bangsa. Mereka bertugas menancapkan akar pohon ke dalam tanah yang subur, agar nilai dasar bangsa benar-benar meresap dalam kehidupan sehari-hari.

Tugas Tim Ahli Pertanian bukan sekadar memberi pupuk atau menyiram pohon dari luar. Mereka harus memastikan akar menancap kuat, menyerap unsur hara, dan mampu menghidupkan batang, ranting, daun, hingga berbuah kembali. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi harus dijalankan dengan telaten, sabar, dan penuh pengawasan.

Dalam seluruh proses itu, rakyat tetap menjadi pemilik dan pengawas utama. Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton yang diberi ilusi buah dari luar. Mereka harus terlibat mengawasi, mengingatkan, dan memastikan bahwa pohon benar-benar tumbuh sehat. Tanpa keterlibatan rakyat, Tim Ahli Pertanian akan kehilangan arah, dan pohon bisa kembali terjebak dalam bayangan kesuburan palsu.

Dengan akar yang kuat, batang akan kembali kokoh. Ranting besar dan kecil bisa tumbuh teratur,

daun kembali hijau, dan fotosintesis berjalan sempurna. Energi kehidupan akan mengalir dari akar hingga ke ujung pohon. Pada akhirnya, pohon Indonesia akan kembali berbuah manis: kesejahteraan, keadilan, dan martabat bagi seluruh rakyat.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 49. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit?

Banyak orang berharap keadaan bangsa akan membaik hanya dengan mengganti presiden. Harapan itu wajar, sebab presiden memang wajah terdepan negara, yang terlihat sehari-hari oleh rakyat.

Namun jika kita kembali pada gambaran pohon, presiden hanyalah seperti daun atau cabang yang mengatur jalannya kehidupan sehari-hari.

Mengganti presiden sama seperti mengganti daun atau ranting. Pohon memang tampak sedikit berbeda, tetapi penyakit utama di akar dan batang tidak otomatis sembuh.

Masalah terbesar bangsa ini bukan terletak pada siapa yang duduk di kursi presiden, melainkan pada akar yang belum menancap dalam ke tanah. Akar yang lemah membuat pohon gagal menyerap nutrisi, sehingga batang rapuh, ranting kusut, dan daun tidak bisa berfotosintesis dengan baik.

Selama akar tidak dipulihkan, siapa pun presiden yang terpilih akan menghadapi keterbatasan yang sama. Ia akan tetap terjebak dalam sistem yang rusak.

Lebih jauh lagi, pohon sakit ini sering ditutupi dengan ilusi. Tukang kebun sibuk menggantung buah dari luar, sehingga pemilik pohon percaya bahwa perubahan telah terjadi.

Padahal buah itu bukan hasil dari pohon sendiri. Begitu pula dalam hari ini, pergantian presiden sering ditampilkan sebagai jawaban, padahal struktur yang membuat pohon layu tetap dibiarkan utuh.

Artinya, mengganti presiden saja tidak cukup. Yang harus dipulihkan adalah pernikahan inti antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan MPR sebagai wakil sejati mereka.

Dari sinilah akar bisa kembali menancap dalam, menyerap nutrisi, dan memberi kehidupan pada seluruh pohon. Setelah itu barulah presiden yang terpilih benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar simbol perubahan yang semu.

Dengan kata lain, presiden penting, tetapi ia bukan pusat segalanya. Perubahan sejati hanya akan lahir jika akar bangsa kembali hidup, batang tegak, ranting teratur, daun segar, dan pohon mampu

berfotosintesis secara utuh. Baru pada saat itu buah kesejahteraan bisa dipetik bersama oleh seluruh rakyat.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 50. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit

Banyak orang masih beranggapan bahwa cukup dengan mengganti presiden, semua masalah bangsa akan selesai. Pandangan ini tumbuh karena presiden memang menjadi sosok yang paling terlihat dalam kehidupan bernegara. Namun pola pikir semacam ini sering kali menutup mata terhadap kenyataan bahwa akar persoalan justru terletak pada struktur sistem dan lembaga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada beberapa tipe pola pikir yang biasanya membuat orang percaya bahwa pergantian presiden adalah solusi tunggal:

- **Tipe Fokus Figur (Leader-Centric):** Mereka percaya kunci perubahan ada pada sosok tunggal presiden. Jika orangnya diganti, mereka yakin

negara akan otomatis membaik, meskipun struktur di bawahnya tetap bermasalah.

- **Tipe Optimis-Naif (Naive-Optimist:** Mereka yakin pemimpin baru pasti lebih baik dari yang lama. Keyakinan ini sederhana, sering kali tanpa melihat kenyataan bahwa sistem yang ada tetap memberi batasan pada siapa pun yang memimpin.
- **Tipe Praktis dan Instan (Quick-Fix Oriented):** Mereka menginginkan solusi cepat dan terlihat. Ganti presiden dianggap jalan pintas untuk perubahan, meskipun akar masalah tidak tersentuh.
- **Tipe Populis-Emosional (Populist-Emotive):** Mereka menilai berdasarkan citra, popularitas, atau janji manis seorang presiden. Rasa suka dan tidak suka lebih dominan daripada analisis mendalam tentang kondisi negara.
- **Tipe Pasif (Waiting-for-Change):** Mereka menunggu pemilu lima tahunan sebagai momen utama perubahan. Namun di antara waktu itu, mereka jarang terlibat aktif dalam pengawasan, kritik, atau perbaikan sistem.

Melihat tipe-tipe ini, jelas bahwa pola pikir "ganti presiden sudah cukup" hanyalah cara pandang yang sempit. Presiden memang penting, tetapi ia bukan pusat segalanya. Jika akar, batang, ranting, dan seluruh struktur pohon bangsa tetap rapuh, siapa pun presiden yang memimpin tidak akan mampu membawa perubahan sejati. Perbaikan hanya bisa tercapai bila

rakyat sebagai pemilik pohon ikut memastikan akar bangsa tertancap kuat, batang tegak, ranting tertata, dan daun bisa berfotosintesis dengan baik sehingga buah kesejahteraan benar-benar bisa dipetik bersama.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 51. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit?

Banyak orang memilih bersabar menunggu pemilu lima tahunan dengan harapan perubahan besar akan datang melalui kotak suara. Pandangan ini sekilas terasa logis, sebab pemilu memang jalan resmi untuk mengganti pemimpin. Namun pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan menunggu pemilu?

Jika Indonesia diibaratkan pohon, maka menunggu pemilu sama seperti menunggu musim panen, padahal akarnya belum menancap ke tanah. Pohon tidak bisa berbuah manis hanya karena kalender panen telah tiba. Tanpa akar yang kuat dan batang yang

kokoh, musim panen hanya menghadirkan kekecewaan, sebab yang muncul bukan buah segar, melainkan daun layu dan ranting rapuh.

Masalah bangsa hari ini bukan sekadar siapa yang memimpin, tetapi bagaimana struktur pohon itu sendiri dirawat. Pemilu memang penting, tetapi ia hanyalah salah satu mekanisme dalam perjalanan panjang sebuah bangsa. Jika rakyat hanya duduk pasif menunggu lima tahun sekali, maka kerusakan akar, batang, dan ranting akan terus berlanjut. Bahkan presiden baru yang terpilih pun tidak bisa berbuat banyak, karena fondasi tetap rapuh.

Lebih dari sekadar menunggu, rakyat perlu ikut merawat pohon setiap hari. Pengawasan terhadap lembaga negara, keterlibatan dalam gerakan sosial, partisipasi dalam menegakkan nilai dasar bangsa, semuanya adalah bagian dari proses menjaga agar pohon kembali sehat. Dengan cara inilah pemilu menjadi bermakna, bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan puncak dari kerja kolektif rakyat dalam membangun pohon kehidupan bersama.

Artinya, menunggu pemilu saja tidak cukup. Perubahan sejati membutuhkan perbaikan akar, batang, ranting, daun, hingga pohon kembali subur. Jika pohon telah sehat, maka setiap musim panen akan benar-benar menghadirkan buah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 52. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Pohon Sakit

Banyak orang di negeri ini merasa bahwa solusi bagi kerusakan negara cukup menunggu pemilu lima tahunan. Mereka meyakini pergantian kepemimpinan otomatis membawa perbaikan, seakan-akan semua persoalan bisa selesai hanya dengan datang ke bilik suara. Padahal, pohon yang akarnya keropos tidak akan tiba-tiba menjadi subur hanya karena mengganti tukang panen. Namun tetap saja, ada golongan yang berpikir demikian, dengan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda.

- **Tipe Legalistik-Prosedural (The Legalistic-Procedural Type):** Tipe ini percaya penuh bahwa pemilu adalah satu-satunya cara sah untuk memperbaiki keadaan. Mereka taat aturan, tetapi menutup mata bahwa jalur formal itu sudah lama dikuasai elite yang sama.

- **Tipe Optimis-Naif (The Optimistic-Naive Type):** Tipe ini yakin rakyat bisa menghukum partai buruk lewat kotak suara. Mereka tidak menyadari bahwa sejak awal proses pemilu, mulai dari verifikasi hingga pencalonan, sudah dikendalikan kelompok lama.
- **Tipe Apatis-Pasif (The Apathetic-Passive Type):** Mereka sebenarnya tahu sistem bermasalah, tetapi enggan ambil risiko. Bagi mereka, lima tahun hanyalah putaran waktu yang bisa dilewati sambil menunggu kesempatan baru.
- **Tipe Status Quo Terselubung (The Hidden Status Quo Type):** Tipe ini biasanya berasal dari kalangan elite atau simpatisannya. Mereka sengaja mendorong rakyat menunggu pemilu agar sistem tidak diganggu dan keuntungan tetap berada di tangan mereka.
- **Tipe Pengalihan Emosional (The Emotional-Diversion Type):** Tipe ini menenangkan diri dengan harapan palsu, seolah-olah perubahan besar tidak perlu dilakukan sekarang. Mereka menggantungkan harapan pada pemilu, meskipun siklus rusak biasanya kembali terulang.

Pada akhirnya, pola pikir seperti ini membuat rakyat seakan terhipnotis. Mereka menaruh harapan pada ritual lima tahunan tanpa berani menuntut perbaikan mendasar. Padahal, pohon negara yang sakit tidak bisa disembuhkan hanya dengan mengganti

tukang panen. Akar harus ditancapkan, batang harus diperkuat, ranting dan daun harus dirapikan, barulah buah yang sehat bisa dipetik.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 9: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Sebuah Handphone

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Handphone Normal



Gambar 53. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Handphone Normal

Indonesia yang sehat dapat dianalogikan seperti sebuah handphone yang bekerja dengan normal. Semua komponennya berfungsi sesuai peran masing-masing, saling mendukung, dan menghasilkan kinerja yang stabil.

Pemilik handphone, yaitu rakyat Indonesia, bisa menggunakannya dengan nyaman karena setiap bagian bekerja untuk melayani, bukan membebani.

Prosesor Ibarat Presiden

Presiden dalam sistem kenegaraan ibarat prosesor dalam handphone. Ia harus cepat, efisien, dan mampu mengeksekusi setiap arahan dengan lancar. Tugas presiden bukan menentukan arah utama, melainkan memastikan program berjalan sesuai keputusan bersama.

Dalam kondisi ideal, presiden bekerja nyata, melaksanakan pembangunan, memperbaiki layanan publik, dan menghadirkan solusi konkret bagi rakyat tanpa tersendat oleh kepentingan pribadi atau kelompok.

Sistem Operasi Ibarat MPR

MPR berperan layaknya sistem operasi. Tanpa sistem operasi yang stabil, semua komponen akan kacau. MPR yang sehat menjadi fondasi yang kokoh, menjaga arah bangsa, meneguhkan konstitusi, dan memastikan semua kebijakan berlandaskan Pancasila. Dari sinilah seluruh sistem Indonesia mendapatkan pijakan yang pasti.

Baterai Ibarat Pajak Rakyat

Sumber energi bangsa datang dari rakyat dalam bentuk pajak, yang ibarat baterai bagi handphone. Baterai yang sehat membuat perangkat bisa menyala lama dan memberi manfaat.

Dalam keadaan ideal, rakyat membayar pajak dengan sukarela, karena mereka merasakan langsung manfaatnya: pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang merata, serta infrastruktur yang membuat hidup mereka lebih baik.

Power Bank Ibarat Utang Luar Negeri

Di samping itu, ada pula utang luar negeri yang dianalogikan sebagai power bank. Power bank tidak dipakai setiap hari, melainkan disimpan untuk kondisi

darurat atau proyek besar yang membawa lompatan bagi bangsa.

Dalam kondisi ideal, utang dipakai bijak, misalnya untuk membiayai riset teknologi atau pembangunan strategis, bukan untuk kebutuhan rutin apalagi kepentingan sesaat.

RAM dan Penyimpanan Ibarat DPR

DPR dalam sistem negara dapat diibaratkan sebagai RAM dan penyimpanan. Mereka mengatur alokasi sumber daya agar efisien, memastikan tidak ada yang terbuang sia-sia, dan menampung aspirasi rakyat.

Dalam kondisi ideal, DPR menolak anggaran yang tidak berguna, memangkas program seremonial, dan mengalokasikan dana pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil.

Antivirus dan Sistem Keamanan Ibarat TNI-Polri

TNI dan Polri ibarat antivirus dan sistem keamanan dalam handphone. Mereka melindungi sistem dari ancaman luar maupun dalam.

Dalam kondisi ideal, TNI menjaga kedaulatan di perbatasan, sementara Polri memberantas kejahatan dan narkoba di dalam negeri. Keduanya hadir untuk memberi rasa aman, bukan menakut-nakuti rakyat yang sedang menjalankan haknya.

Aplikasi Ibarat Hukum dan Lembaga

Hukum dan lembaga negara adalah aplikasi. Aplikasi yang baik membantu pemilik menyelesaikan pekerjaan dengan mudah, cepat, dan transparan.

Begitu juga hukum dan lembaga negara: dalam kondisi ideal, mereka bekerja tanpa pungli, tanpa berbelit, dan tidak memperlambat urusan rakyat.

Layar Ibarat Media dan Aspirasi Rakyat

Media dan aspirasi rakyat ibarat layar handphone. Layar yang jernih membuat pengguna bisa melihat keadaan dengan jelas. Media yang sehat menampilkan berita berimbang, transparan, dan memberi ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan begitu, rakyat dapat memahami keadaan bangsanya tanpa distorsi.

Pemilik Handphone Ibarat Rakyat Indonesia

Dan pada akhirnya, rakyat adalah pemilik sah handphone itu sendiri. Mereka adalah pengguna yang berhak menikmati manfaat dari semua komponen, sekaligus berhak mengganti jika ada aplikasi atau perangkat yang bermasalah.

Dalam kondisi ideal, rakyat paham cara kerja sistem, terlibat aktif mengawasi, dan tidak ragu menuntut perubahan bila negara tidak berjalan sesuai cita-cita bersama.

Jika semua komponen bekerja normal, maka handphone akan berjalan stabil, daya tahan lama, dan memuaskan pemiliknya.

Begitu pula Indonesia: bila presiden, MPR, DPR, TNI, Polri, hukum, media, dan rakyat menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik, maka bangsa ini akan berdiri kokoh.

Indonesia seharusnya hadir sebagai alat yang melayani rakyat, bukan membebani mereka. Dengan sistem yang sehat, rakyat bisa bekerja, berkreasi, dan menikmati hasil dari pajak yang mereka setorkan. Inilah Indonesia ideal, yang normal, seperti handphone normal.

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Handphone Rusak



Gambar 54. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Handphone Rusak

Jika Indonesia yang ideal ibarat handphone normal, maka kondisi Indonesia saat ini lebih mirip sebuah handphone bermasalah.

Komponennya masih ada, tetapi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Alih-alih melayani pemilik, sistem justru sering menyusahkan, bahkan membuat rakyat frustasi.

Prosesor Ibarat Presiden

Presiden, yang seharusnya menjadi prosesor, justru sering lemot, overheat, bahkan hang. Banyak perintah rakyat yang tidak dieksekusi dengan baik.

Program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan reformasi birokrasi sering macet atau berhenti di tengah jalan.

Alih-alih efisien, mesin negara berjalan tersendat dan sering lebih sibuk melayani kepentingan elite segelintir orang daripada kebutuhan rakyat.

Sistem Operasi Ibarat MPR

MPR sebagai sistem operasi pun kehilangan perannya. Bukannya menjadi fondasi yang stabil, MPR jarang tampil sebagai penentu arah bangsa. Produk keputusannya tidak lagi menjadi rujukan utama, bahkan sering dianggap formalitas belaka.

Akibatnya, arah pembangunan sering tidak karuan, bergantung pada kebijakan presiden yang sedang berkuasa.

Baterai Ibarat Pajak Rakyat

Baterai yang seharusnya kuat, yaitu pajak rakyat, kini terasa bocor. Rakyat sudah membayar pajak dengan susah payah, tetapi manfaatnya jarang kembali secara langsung.

Fasilitas publik banyak yang rusak, layanan kesehatan masih jauh dari merata, dan biaya pendidikan tetap tinggi.

Hingga Maret 2024 tercatat 25,22 juta penduduk Indonesia masih hidup miskin, yang menunjukkan bahwa energi yang dikumpulkan dari rakyat tidak benar-benar kembali untuk menghidupi mereka.

Power Bank Ibarat Utang Luar Negeri

Parahnya, Indonesia terlalu bergantung pada power bank, yaitu utang luar negeri. Utang bukan lagi cadangan, melainkan sumber utama.

Utang luar negeri per April 2025 adalah Rp 7.038 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa "handphone" Indonesia tidak bisa hidup tanpa terus-menerus dicolok ke power bank pinjaman.

Ketergantungan ini membuat rakyat hidup dalam kecemasan, sadar bahwa bunga utang semakin lama semakin menekan kemampuan fiskal negara. Begitu colokan power bank itu dilepas, sistem bisa langsung mati.

RAM dan Penyimpanan Ibarat DPR

DPR yang seharusnya menjadi RAM dan penyimpanan justru penuh cache dan file sampah berupa kasus korupsi. Hingga kini ada 70 kasus korupsi anggota DPR lintas periode. Tidak heran jika sistem menjadi lemot, banyak anggaran tersedot untuk kepentingan pribadi atau partai, membuat alokasi sumber daya negara tersumbat.

Antivirus dan Sistem Keamanan Ibarat TNI-Polri

TNI dan Polri sebagai antivirus juga tidak sepenuhnya menjalankan fungsi idealnya. Alih-alih melindungi rakyat, kadang mereka justru membatasi kebebasan berpendapat, bahkan mengawasi rakyat yang kritis.

Rakyat bukannya merasa aman, malah sering merasa diawasi. Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK)

Indonesia pada 2024 tercatat 3,85, turun dari tahun sebelumnya, menandakan lemahnya semangat antikorupsi dalam masyarakat.

Aplikasi Ibarat Hukum dan Lembaga

Hukum dan lembaga negara, ibarat aplikasi, justru penuh bug. Alih-alih mempermudah, banyak proses hukum berbelit, transparansi minim, dan pungli merajalela.

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2024 hanya 37/100, angka yang menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela dan hukum belum benar-benar berjalan sebagai aplikasi yang jernih dan transparan.

Layar Ibarat Media dan Aspirasi Rakyat

Layar yang seharusnya jernih, yaitu media dan aspirasi, kini retak dan buram. Informasi yang disajikan sering dikendalikan oleh kepentingan politik atau bisnis tertentu.

Rakyat sulit membedakan mana berita yang benar dan mana propaganda. Aspirasi rakyat pun sering diabaikan, seakan-akan sentuhan di layar tidak mendapat respon.

Pemilik Handphone Ibarat Rakyat Indonesia

Pada akhirnya, rakyat sebagai pemilik handphone terjebak dalam siklus melelahkan: bekerja keras, membayar pajak, melihat hasilnya bocor, lalu negara menutup kekurangan dengan utang baru.

Ketimpangan ekonomi tetap tinggi, tercermin dari rasio Gini 0,375 pada 2025, yang menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan merata. Siklus ini berulang tanpa henti. Rakyat tidak pernah benar-benar menikmati manfaat dari negara yang seharusnya mereka miliki.

Inilah gambaran Indonesia hari ini. Sebuah sistem yang seharusnya hadir untuk melayani rakyat, justru berubah menjadi perangkat yang menguras energi tanpa memberi manfaat nyata.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Handphone



SCAN ME

Gambar 55. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Handphone

Handphone yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan cara dibiarkan, ditambal seadanya, atau hanya diganti casing. Begitu pula Indonesia. Untuk menghidupkan kembali sistem yang sudah lama bermasalah, dibutuhkan perbaikan menyeluruh pada setiap komponennya, sehingga rakyat benar-benar merasakan manfaat dari negara yang mereka miliki.

Presiden yang diibaratkan sebagai prosesor harus kembali berfungsi sebagai mesin eksekusi yang cepat, efisien, dan fokus pada program nyata. Ia tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau kebijakan yang tidak terukur. Presiden ideal adalah presiden yang menjalankan keputusan MPR dan aspirasi rakyat secara konsisten dan tanpa distorsi kepentingan pribadi maupun kelompok.

MPR sebagai sistem operasi perlu direstorasi menjadi fondasi yang stabil bagi bangsa. Lembaga ini harus benar-benar menjalankan perannya sebagai pemegang kedaulatan rakyat, penentu arah besar negara, sekaligus penjaga konstitusi. Bila MPR kembali pada peran hakikinya, maka semua komponen lain akan bekerja secara harmonis di atas pijakan yang kokoh.

Pajak rakyat yang menjadi baterai utama negara perlu dikelola dengan efisien dan transparan. Dana yang dikumpulkan dari rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik nyata seperti pendidikan gratis, kesehatan terjangkau, dan infrastruktur merata. Kebocoran pajak harus ditutup dengan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh, bukan sekadar jargon politik.

Utang luar negeri yang dianalogikan sebagai power bank juga perlu dikembalikan pada fungsinya semula sebagai cadangan. Indonesia tidak boleh hidup bergantung pada utang. Utang sebaiknya hanya digunakan untuk kebutuhan darurat atau proyek besar yang produktif seperti riset teknologi dan

pembangunan strategis, bukan untuk belanja rutin apalagi pembayaran bunga lama.

DPR sebagai RAM dan penyimpanan harus dibersihkan dari cache dan file sampah berupa korupsi dan politik transaksional. Fungsi pengawasan perlu ditegakkan kembali agar alokasi sumber daya berjalan efektif dan tidak tersendat. Dengan RAM yang bersih dan penyimpanan yang rapi, program negara akan berjalan lancar dan tidak sering macet.

TNI dan Polri yang berperan sebagai antivirus harus dikembalikan pada fungsi utamanya, yaitu melindungi rakyat. TNI fokus menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sedangkan Polri melindungi masyarakat dari kejahatan nyata di dalam negeri. Mereka tidak boleh menjadi spyware yang mengawasi rakyat, melainkan pelindung yang menumbuhkan rasa aman.

Hukum dan lembaga negara sebagai aplikasi juga perlu dibersihkan dari bug dan iklan. Proses hukum harus dibuat sederhana, cepat, transparan, dan bebas pungli. Dengan aplikasi yang sehat, rakyat akan merasa terbantu dalam setiap urusan administratif maupun hukum.

Media dan aspirasi rakyat sebagai layar perlu dijernihkan kembali. Media harus berfungsi menyampaikan informasi apa adanya, bebas dari manipulasi kepentingan politik atau bisnis. Aspirasi rakyat juga harus direspons dengan cepat, sehingga layar yang disentuh benar-benar memberi tanggapan nyata.

Akhirnya, rakyat sebagai pemilik handphone perlu diberdayakan. Pendidikan politik, kesadaran hak, dan partisipasi aktif harus terus dibangun agar rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi pemilik yang mampu mengganti aplikasi atau komponen yang bermasalah.

Seluruh proses perbaikan ini hanya dapat terwujud bila ada teknisi yang tepat. Teknisi spesialis handphone negara harus memiliki empat keahlian utama.

Pertama, keahlian intelektual dari para cendekiawan yang mampu menganalisis masalah secara rasional dan berbasis ilmu pengetahuan sehingga software dan hardware negara bisa dioptimalkan.

Kedua, kekuatan moral dan etika dari para ulama atau pemimpin spiritual yang memastikan perbaikan tidak sekadar teknis, tetapi juga bermartabat dan berkeadilan.

Ketiga, peran budayawan yang menjaga agar perbaikan tetap sesuai identitas bangsa, tidak menyalin mentah sistem luar, tetapi selaras dengan akar budaya sendiri.

Keempat, kedisiplinan dan ketegasan dari militer serta kepolisian profesional yang mampu mengamankan proses perbaikan, menjaga sistem tetap bersih, dan tidak menjadi ancaman bagi rakyat.

Dengan hadirnya teknisi spesialis yang memiliki empat pilar keahlian ini, handphone Indonesia yang rusak dapat diperbaiki. Setiap komponen akan kembali pada fungsi aslinya dan rakyat sebagai pemilik

akhirnya bisa menggunakan perangkatnya dengan puas.

Inilah jalan menuju Indonesia yang normal kembali, sebuah negara yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 56. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak?

Pertanyaan ini selalu muncul di tengah rakyat, terutama menjelang pemilu. Banyak orang menaruh harapan besar pada figur presiden baru, seolah-olah semua persoalan bangsa bisa selesai hanya dengan pergantian kursi di istana. Wacana ini begitu kuat hingga seakan nasib ratusan juta rakyat Indonesia hanya ditentukan oleh satu orang di pucuk kekuasaan.

Namun, mari kita kembali pada analogi handphone yang dipakai sebelumnya. Presiden hanyalah prosesor. Tugasnya mengeksekusi arahan, menjalankan perintah, dan menggerakkan sistem. Akan

tetapi, sebuah handphone tidak akan berfungsi normal hanya dengan mengganti prosesornya. Bayangkan prosesor baru dipasang di perangkat dengan layar yang retak, baterai yang bocor, RAM yang penuh cache, aplikasi yang bug, dan sistem operasi yang error. Apa yang terjadi? Handphone tetap saja lemot, tetap boros daya, dan tetap tidak bisa dipakai dengan baik.

Begitulah kondisi Indonesia. Masalah bangsa ini bukan hanya siapa presidennya. Akar persoalan ada pada sistem yang lebih luas. MPR yang seharusnya menjadi fondasi stabil kehilangan perannya. DPR yang semestinya menjadi pengendali justru tersumbat kasus korupsi.

Pajak rakyat sebagai sumber energi bocor karena penyalahgunaan dan salah kelola. Utang luar negeri berubah menjadi sumber utama, membuat kita bergantung pada pinjaman hingga lebih Rp 7.038 triliun.

Hukum dan lembaga negara penuh celah dan pungli, media retak oleh kepentingan politik dan bisnis, sementara TNI–Polri kadang lebih sibuk mengawasi rakyat daripada melindungi mereka.

Dengan kondisi seperti ini, mengganti presiden tidak lebih dari sekadar mengganti kaki dalam tubuh yang matanya tetap tertutup. Kaki boleh baru, tetapi arah tetap salah.

Presiden baru bisa saja memberi harapan sesaat, namun jika MPR tidak direstorasi, DPR tetap korup, pajak tetap bocor, hukum tetap rapuh, dan media tetap buram, maka rakyat akan kembali kecewa.

Jalan keluarnya bukan sekadar menunggu pergantian orang di kursi presiden, melainkan membongkar penutup mata sistem dan memperbaiki seluruh pilar negara. Perubahan sejati lahir ketika rakyat sadar bahwa kedaulatan tidak bisa didelegasikan hanya pada satu figur, tetapi harus dijaga bersama. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat berjalan lurus, melihat jelas ke depan, dan benar-benar melayani rakyatnya.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 57. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak

Dalam setiap kehidupan negara, selalu muncul pandangan bahwa cukup dengan mengganti presiden maka semua masalah bangsa akan selesai.

Pandangan ini begitu populer karena tampak sederhana, mudah dipahami, dan seolah memberi jalan pintas bagi rakyat yang sudah lelah dengan kondisi negara.

Namun, pola pikir seperti ini berbahaya, sebab mengabaikan kenyataan bahwa kerusakan sistem tidak bisa diperbaiki hanya dengan mengganti satu orang di pucuk kekuasaan.

Ada beberapa tipe pola pikir yang hanya mengandalkan presiden.

- **Si Pemuja Tokoh (The Idolizer):** Mereka menganggap presiden baru sebagai penyelamat tunggal. Tokoh idolanya dipuja sedemikian rupa seakan-akan mampu mengatasi segala masalah bangsa. Pandangan ini menutup mata dari fakta bahwa presiden hanyalah prosesor dalam sistem yang jauh lebih luas.
- **Si Penonton Pasif (The Passive Spectator):** Tipe ini tidak mau repot terlibat dalam perbaikan sistem. Mereka cukup menunggu pemilu lima tahunan, mengganti presiden, lalu berharap perubahan otomatis terjadi. Sikap ini menempatkan rakyat dalam posisi pasif, seakan nasib bangsa hanya ditentukan oleh satu figur.
- **Si Korban Abadi (The Eternal Victim):** Mereka selalu merasa hidup sengsara karena salah presiden. Segala persoalan, mulai dari harga beras hingga lapangan kerja, dianggap sebagai akibat langsung dari kepemimpinan presiden. Mereka lupa bahwa akar masalah sering kali bersumber dari lembaga lain dan sistem yang rusak.
- **Si Penjaga Status Quo (The Status Quo Keeper):** Figur dari pilar negara ini sengaja membiarkan rakyat sibuk dengan isu pergantian presiden.

Baginya, cukup ada wajah baru di puncak kekuasaan untuk menutupi rapuhnya sistem. Dengan begitu, kepentingannya tetap aman, meskipun kerusakan yang mendasar tidak pernah diperbaiki.

- **Si Pemalas Berpikir (The Lazy Thinker):** Mereka tidak mau mendalami persoalan bangsa yang kompleks. Menyalahkan presiden dan menaruh semua harapan pada figur baru dianggap jalan termudah, tanpa upaya untuk memahami atau memperjuangkan perubahan sistemik.

Kelima tipe ini terlihat berbeda, tetapi ujungnya sama. Mereka menaruh harapan berlebihan pada presiden, seakan-akan satu orang mampu memikul beban seluruh bangsa.

Padahal, tanpa perbaikan pada MPR, DPR, hukum, lembaga negara, media, dan aparat keamanan, maka siapapun presidennya akan tetap tersandung dalam sistem yang rusak.

Inilah bahaya dari pola pikir yang hanya mengandalkan presiden. Ia membuat rakyat lengah, lupa bahwa kedaulatan ada di tangan mereka, bukan di tangan satu orang. Perubahan sejati tidak lahir dari pergantian tokoh semata, tetapi dari keberanian kolektif untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 58. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak?

Bagi sebagian orang, pemilu dianggap sebagai satu-satunya momen perubahan. Mereka beranggapan bahwa cukup menunggu lima tahun sekali, lalu mengganti presiden atau wakil rakyat, maka keadaan akan berubah dengan sendirinya. Pandangan ini tampak masuk akal, karena pemilu memang menjadi simbol demokrasi. Namun, pada kenyataannya, menunggu pemilu lima tahunan saja tidak cukup untuk memperbaiki bangsa yang sistemnya sudah lama rusak.

Jika kembali pada analogi handphone, menunggu pemilu lima tahunan sama saja dengan menunggu teknisi toko ponsel mengganti casing atau mengganti baterai sekali-sekali, sementara prosesor, RAM, dan sistem operasinya tetap rusak. Handphone mungkin tampak baru dari luar, tetapi performanya tidak pernah membaik. Begitu pula Indonesia. Setiap

lima tahun, wajah-wajah baru muncul, tetapi sistem yang menopang mereka tetap dibiarkan penuh bug, cache, dan kebocoran.

Realitas menunjukkan bahwa banyak masalah bangsa bersifat sistemik, bukan periodik. Korupsi misalnya, tidak pernah benar-benar hilang meski presiden dan anggota DPR silih berganti. Sejak 2004 hingga 2024, tercatat 358 anggota DPR/DPRD terjerat korupsi. Ini bukti bahwa pemilu tidak otomatis membersihkan lembaga legislatif dari praktik kotor. Hal serupa juga terlihat dari ketergantungan pada utang luar negeri. Utang luar negeri per April 2025 adalah Rp 7.038 triliun, sebuah angka yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pergantian rezim lima tahunan.

Menunggu pemilu juga berarti menyerahkan sepenuhnya kendali perubahan pada segelintir orang. Padahal, kedaulatan sejati ada di tangan rakyat. Tanpa partisipasi aktif, pengawasan terus-menerus, dan keberanian menuntut perubahan di luar momen lima tahunan, maka rakyat hanya akan menjadi penonton yang pasif. Sementara itu, sistem tetap dijalankan oleh kepentingan sempit yang tidak berpihak kepada mereka.

Karena itu, jawaban atas pertanyaan ini jelas: tidak cukup hanya menunggu pemilu lima tahunan. Pemilu memang penting, tetapi bukan satu-satunya jalan. Perubahan sejati lahir dari kesadaran kolektif rakyat untuk memperbaiki sistem setiap hari, bukan hanya sekali dalam lima tahun. Dengan begitu, pemilu bukan lagi sekadar ritual politik, melainkan bagian dari

perjalanan panjang bangsa menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 59. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan HP Rusak

Selain pola pikir yang hanya mengandalkan presiden, ada pula pola pikir lain yang tidak kalah berbahaya. Pola ini percaya bahwa cukup menunggu pemilu lima tahunan, maka semua persoalan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Mereka memandang pemilu sebagai satu-satunya sarana perubahan, sehingga di luar momen lima tahunan itu, rakyat boleh pasif dan menyerahkan segalanya pada segelintir orang.

Ada beberapa tipe yang sering terjebak dalam pola pikir ini.

- **Si Penonton Pasif (The Passive Spectator):** Mereka puas dengan rutinitas lima tahunan. Di

luar pemilu, mereka tidak peduli pada arah bangsa. Saat pemilu tiba, mereka sekadar mencoblos lalu berharap keadaan otomatis berubah, tanpa ikut mengawasi atau menuntut perbaikan sistem.

- **Si Korban Abadi (The Eternal Victim):** Mereka selalu merasa sengsara, tetapi tidak pernah berbuat apa pun selain menunggu pemilu berikutnya. Harapan digantungkan pada figur baru, padahal sistem tetap rapuh. Akibatnya, mereka kecewa dari periode ke periode, namun tetap mengulang pola yang sama
- **Penjaga Status Quo (The Status Quo Keeper):** Figur dari pilar negara yang sengaja membiarkan rakyat sibuk menunggu pemilu. Bagi mereka, cukup ada pergantian wajah setiap lima tahun untuk menutupi kerusakan mendasar. Dengan begitu, sistem yang rusak tetap bertahan dan kepentingan mereka tidak terganggu.

Ketiga tipe ini terlihat berbeda, tetapi ujungnya sama yaitu menjadikan pemilu satu-satunya obat, padahal pemilu hanyalah pintu kecil dari perjalanan panjang perubahan bangsa.

Bab 10: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Skincare

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Skincare yang Aman



SCAN ME

Gambar 60. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Skincare yang Aman

Indonesia yang sehat dapat dianalogikan seperti kulit wajah yang terawat dengan baik. Kulit yang bersih, lembap, sehat, dan bercahaya bukanlah hasil dari satu produk saja, melainkan dari rangkaian skincare yang tepat, teratur, dan saling melengkapi.

Begitu juga dengan negara. Indonesia hanya bisa menjadi sehat, adil, dan sejahtera apabila semua komponennya berfungsi sesuai perannya dan bekerja secara harmonis.

Facial Cleanser Ibarat Pendidikan Politik

Pendidikan politik berperan layaknya facial cleanser. Ia membersihkan wajah masyarakat dari kotoran berupa hoaks, disinformasi, propaganda, dan praktik suap. Dengan wajah yang bersih, masyarakat

menjadi cerdas, jernih dalam menilai kebijakan, dan siap menerima perawatan berikutnya.

Toner Ibarat MPR

MPR hadir seperti toner yang menyeimbangkan pH kulit setelah pembersihan. Ia memastikan arah negara tetap stabil dan siap menyerap kebijakan berikutnya. Dengan MPR yang sehat, sistem akan terjaga dalam keseimbangan, tidak terlalu condong ke satu kepentingan sempit.

Exfoliating Serum Ibarat DPR

DPR berfungsi seperti exfoliating serum. Ia mengangkat sel kulit mati dan membersihkan pori-pori, sebagaimana DPR seharusnya mengangkat masalah rakyat dari akar dan membuka ruang regenerasi kebijakan. Bila DPR bekerja benar, maka sistem dapat bernapas lega dan mempercepat peremajaan kepemimpinan.

Active Serum Ibarat Presiden

Presiden ibarat active serum yang dipilih sesuai diagnosis kebutuhan bangsa. Serum berkualitas tinggi mampu memperbaiki, mencerahkan, dan menyehatkan kulit. Begitu pula presiden yang tepat akan membawa energi baru, menyegarkan bangsa, dan memperkuat sistem.

Acne Spot Treatment Ibarat Hukum dan Lembaga

Hukum dan lembaga negara dapat dianalogikan sebagai acne spot treatment. Obat jerawat hanya bekerja

pada titik masalah, bukan di seluruh wajah. Demikian pula hukum, harus menindak kasus korupsi dan penyimpangan dengan presisi, tidak tebang pilih, dan tidak digunakan secara berlebihan.

Hydrating Toner Ibarat Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sama seperti hydrating toner atau essence. Ia memberikan hidrasi yang merata ke seluruh lapisan kulit. Pajak yang sehat adalah pajak yang benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang merata.

Moisturizer Ibarat DJP/Kemenkeu

DJP dan Kementerian Keuangan adalah moisturizer. Sebagaimana pelembab menjaga agar kulit tetap lembab dan tidak kehilangan nutrisi, keduanya memastikan pajak dan anggaran negara terkunci dalam distribusi yang merata, memperkuat pertahanan ekonomi, dan menjaga skin barrier bangsa dari ancaman krisis.

Sunscreen Ibarat TNI-Polri

TNI dan Polri dapat dipahami sebagai sunscreen broad spectrum. Sunscreen melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB tanpa menimbulkan whitecast dan rasa berat. Begitu pula TNI melindungi negara dari agresi militer eksternal, sedangkan Polri menjaga masyarakat dari kejahatan internal. Keduanya harus memberi rasa aman, bukan rasa takut.

Hydrating Sheet Mask Ibarat Utang Luar Negeri

Utang luar negeri berfungsi seperti hydrating sheet mask. Masker ini dipakai sesekali ketika kulit membutuhkan dorongan ekstra. Utang seharusnya digunakan hanya pada saat darurat atau untuk proyek produktif jangka panjang, bukan sebagai rutinitas harian. Jika digunakan terus-menerus, kulit justru iritasi, dan negara kehilangan daya tahannya.

Kulit Wajah Ibarat Rakyat Indonesia

Akhirnya, rakyat adalah kulit wajah itu sendiri. Jika semua perawatan dilakukan dengan baik, maka kulit akan sehat, cerah, dan bercahaya. Begitu pula rakyat, mereka akan sejahtera, adil, dan bersatu apabila seluruh pilar negara menjalankan perannya dengan benar.

Indonesia ideal bukanlah wajah yang ditutup make up tebal untuk menutupi jerawat dan noda. Indonesia ideal adalah wajah yang dirawat dengan skincare yang aman, sehingga kecantikan sejati terpancar dari dalam.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Skincare Abal-Abal



SCAN ME

Gambar 61. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Skincare Abal-Abal

Jika Indonesia ideal diibaratkan wajah sehat yang dirawat dengan benar, maka sekarang wajah bangsa kita justru rusak karena skincare yang salah, pengabaian, dan performa yang buruk.

Bukannya berseri, bangsa ini terlihat meradang, iritasi, dan penuh ketidaknyamanan akibat praktik yang salah dan kebijakan yang tidak efektif.

Facial Cleanser Ibarat Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang seharusnya menjadi facial cleanser nyaris tidak pernah dijalankan secara menyeluruh. Wajah negara dibiarkan kotor bertahun-tahun, pori-pori tersumbat oleh apatisme dan pragmatisme.

Akibatnya muncul peradangan berupa konflik sosial dan ketidakpercayaan sistemik terhadap lembaga negara.

Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2024 tercatat turun ke angka 3,85 dari skala 0-5,

tanda bahwa masyarakat semakin permisif terhadap praktik korupsi.

Kasus seperti suap dalam Pilkada 2024 di berbagai daerah memperlihatkan bahwa pendidikan politik gagal membersihkan wajah demokrasi, sehingga kotoran terus menumpuk.

Toner Ibarat MPR

MPR sebagai toner pun sering tak berfungsi. Misalnya ketika MPR menggelar sidang tahunan, banyak rakyat merasa hasilnya tidak memberi dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.

Bagi mereka, itu sekadar ritual formal, seperti toner yang diaplikasikan pada kulit kotor: terasa perih, tidak menyeimbangkan, bahkan membuang waktu.

Exfoliating Serum Ibarat DPR

DPR yang diibaratkan exfoliating serum justru menambah iritasi. Banyak undang-undang dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai, seperti revisi UU KPK atau UU Cipta Kerja yang kontroversial.

Seharusnya membersihkan pori-pori masalah rakyat, DPR malah menutupnya dengan lapisan aturan yang justru menimbulkan protes luas.

Active Serum Ibarat Presiden

Presiden, sebagai active serum, sering diletakkan di atas wajah yang belum dibersihkan. Program ambisius seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi contoh.

Proyek ini menelan biaya besar, sementara masih banyak rakyat yang kesulitan membeli beras atau membayar sekolah. Seperti serum mahal yang tidak menyerap, manfaatnya tidak terasa oleh kulit wajah utama, yaitu rakyat.

Acne Spot Treatment Ibarat Hukum dan Lembaga

Hukum dan lembaga pengawasan, yang seharusnya seperti acne spot treatment, kebingungan menindak kasus besar. Skandal korupsi BTS Kominfo senilai Rp 8,03 triliun menjadi contoh nyata.

Wajah bangsa sudah meradang di banyak titik, sehingga penindakan hukum terasa tidak cukup dan justru menambah rasa frustasi rakyat.

Hydrating Toner Ibarat Pajak

Pajak yang seharusnya menjadi hydrating essence justru menambah ketidaknyamanan. Rakyat mengeluh karena pajak terus naik, dari PPN 10% menjadi 11% sejak 2022, dengan rencana menuju 12%.

Namun pelayanan publik masih jauh dari harapan. Banyak desa masih kekurangan akses air bersih, sekolah roboh, dan layanan kesehatan tidak merata. Pajak yang dituangkan ke wajah kotor ini tidak pernah benar-benar menyerap.

Moisturizer Ibarat DJP/Kemenkeu

DJP dan Kementerian Keuangan sebagai moisturizer kerap mengunci kotoran di dalam. Subsidi energi, misalnya, lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas.

Sementara itu, rakyat miskin tetap harus antre panjang untuk LPG 3 kg atau membayar tarif listrik yang terus naik. Alih-alih memperkuat skin barrier bangsa, kebijakan ini justru memperkuat ketimpangan.

Sunscreen Ibarat TNI-Polri

TNI dan Polri yang seharusnya jadi sunscreen sering dinilai proteksinya tidak merata. Kasus penembakan di Rempang, Batam pada 2023.

Di mana, pada kedua kasus itu terjadi bentrok antara aparat dengan warga yang menolak penggusuran, memperlihatkan bagaimana "perlindungan" bisa berubah menjadi represi. Sunscreen abal-abal yang seharusnya melindungi kulit malah membuat kulit terbakar.

Hydrating Sheet Mask Ibarat Utang Luar Negeri

Utang luar negeri, yang seharusnya hanya sheet mask darurat, kini menjadi ketergantungan kronis. Per April 2025, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 7.038 triliun.

Pemerintah harus membayar bunga dan cicilan yang besar setiap tahun, mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan publik. Seperti masker sekali pakai yang dipakai terus menerus, manfaatnya semakin berkurang, sementara biayanya semakin besar.

Kulit Wajah Ibarat Rakyat Indonesia

Akhirnya, rakyat sebagai kulit wajahlah yang menanggung semua dampak. Di Papua, masih ada

desa-desa yang kesulitan akses pendidikan dan kesehatan.

Di Jawa, harga beras sempat melonjak hingga Rp 18.000 per kilogram pada awal 2024, membuat keluarga miskin semakin terbebani.

Di kota-kota besar, pengangguran muda terus meningkat, dengan angka pengangguran terbuka mencapai 7,89 juta orang pada Februari 2024. Semua ini adalah jerawat dan breakout yang mencerminkan wajah bangsa yang tidak sehat.

Indonesia hari ini lebih mirip wajah yang lelah, kusam, dan penuh luka karena salah urus. Wajah yang seharusnya bercahaya justru memerah karena iritasi kebijakan dan kotoran sistemik yang tidak pernah dibersihkan.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Skincare yang Abal-Abal

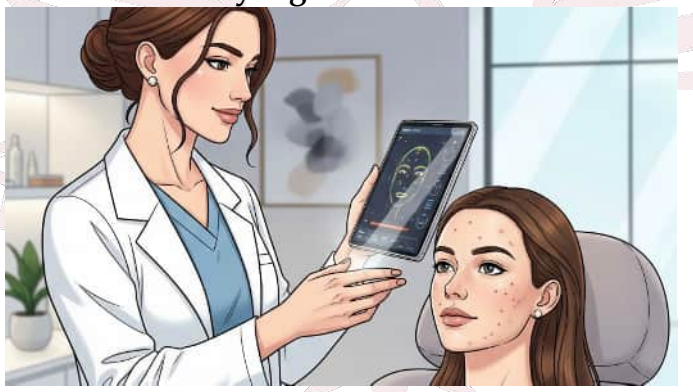

SCAN ME

Gambar 62. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Skincare yang Abal-Abal

Wajah negara saat ini meradang, iritasi, dan breakout parah. Selama bertahun-tahun, facial cleanser tidak pernah dilakukan. Pori-pori tersumbat oleh apatisme dan pragmatisme, memicu konflik sosial dan

ketidakpercayaan sistemik. Toner sering dilewati, serum dan moisturizer diaplikasikan di atas wajah kotor, sunscreen kadang justru represif, dan ketergantungan pada sheet mask hanya menambah ilusi sementara.

Tim dokter kecantikan yang terdiri dari tokoh intelektual, budayawan dan ahli adat istiadat, rohaniawan, serta TNI-POLRI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap wajah pasien, yaitu rakyat. Mereka menilai kondisi kulit, mengenali area bermasalah, dan menentukan langkah perawatan yang tepat. Rekomendasi pertama adalah memastikan facial cleanser dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendidikan politik menjadi langkah utama untuk membersihkan pori-pori dari kotoran informasi palsu, apatisme, dan pragmatisme, agar kulit bisa bernapas dan perawatan berikutnya bisa bekerja efektif.

Setelah wajah dibersihkan, toner yang diberikan melalui MPR menyeimbangkan kulit dan menyiapkan lapisan sehat agar serum berikutnya bisa terserap dengan baik. Exfoliating serum dari DPR diterapkan setelah wajah bersih, memungkinkan regenerasi kulit tanpa menimbulkan iritasi. Active serum yang diberikan Presiden menutrisi kulit dengan tepat, menembus lapisan yang sudah siap menerima manfaat.

Acne spot treatment dari hukum dan lembaga pengawasan menargetkan masalah spesifik, menyembuhkan jerawat lama, dan mencegah infeksi menyebar. Hydrating essence dari pajak menutrisi kulit, sementara moisturizer dari DJP dan Kemenkeu menjaga kelembapan tanpa memerangkap kotoran, memperkuat

sistem kulit, dan mengurangi risiko jerawat kistik. Sunscreen yang diterapkan TNI dan Polri melindungi kulit secara merata tanpa menimbulkan represifitas. Utang luar negeri sebagai sheet mask digunakan secara bijak, bukan menjadi ketergantungan atau ilusi semata.

Langkah demi langkah, wajah rakyat mulai pulih. Kulit yang meradang tenang, pori-pori terbuka, jerawat berkurang, dan keseimbangan kembali tercipta. Perbaikan dimulai dari dasar dengan pendidikan politik sebagai facial cleanser, baru kemudian perawatan lanjutan diterapkan. Dengan begitu, wajah negara tidak hanya tampak sehat secara visual, tetapi benar-benar mampu menanggung semua tantangan tanpa iritasi atau breakout baru.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 63. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal

Mengganti Presiden saja tidak akan cukup untuk memperbaiki wajah negara. Presiden dalam analogi

skincare adalah serum aktif, produk mahal yang seharusnya menutrisi dan memperbaiki kulit. Namun serum apapun tidak akan bekerja jika skincare yang digunakan sebelumnya abal-abal dan tidak benar.

Selama bertahun-tahun, langkah dasar berupa facial cleanser, yaitu pendidikan politik, tidak pernah dilakukan. Tanpa membersihkan dan menyiapkan kulit, serum mahal dari Presiden hanya menumpuk di atas lapisan skincare yang salah, tidak terserap, bahkan bisa memperparah kondisi wajah.

Selain serum Presiden, semua tahapan skincare lainnya seperti toner dari MPR, exfoliating serum dari DPR, moisturizer dari DJP dan Kemenkeu, sunscreen dari TNI dan Polri, maupun sheet mask utang luar negeri, harus diterapkan dengan formula yang tepat. Jika produk-produk ini abal-abal atau salah dosis, wajah rakyat tetap berjerawat dan meradang.

Perbaikan wajah negara membutuhkan pendekatan menyeluruh dan berurutan. Facial cleanser atau pendidikan politik harus menjadi langkah pertama untuk menyiapkan kulit.

Setelah itu, toner, serum institusi, moisturizer, essence, dan sunscreen bisa bekerja efektif. Hanya kombinasi skincare yang tepat dan berurutan yang mampu membuat wajah rakyat kembali sehat.

Singkatnya, mengganti serum saja, yaitu Presiden, tanpa memastikan skincare sebelumnya aman dan facial cleanser dilakukan, tidak akan menyelesaikan masalah. Wajah rakyat akan tetap berjerawat, iritasi, dan breakout baru akan terus muncul.

Perubahan yang berarti harus menyeluruh, dari dasar hingga lapisan paling atas, bukan sekadar mengganti serum mahal di wajah yang masih ditimpa skincare abal-abal.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 64. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal

Ada pola pikir yang percaya bahwa mengganti Presiden otomatis akan memperbaiki wajah negara. Dalam analogi skincare, ini seperti berpikir serum mahal saja bisa menyembuhkan jerawat, padahal skincare sebelumnya abal-abal dan facial cleanser tidak pernah dilakukan. Pola pikir seperti ini tidak hanya keliru, tapi juga berpotensi membuat Indonesia semakin rusak. Berikut tipe-tipe pola pikir tersebut:

- **Pola Pikir Linier dan Sederhana:** Orang dengan pola pikir ini melihat sebab dan akibat secara langsung: mengganti Presiden berarti masalah selesai. Mereka mengabaikan fakta bahwa wajah

negara memiliki banyak lapisan masalah, dari lembaga, hukum, hingga perilaku masyarakat. Fokus hanya pada satu elemen membuat perbaikan yang dilakukan tidak pernah tuntas.

- **Pola Pikir Solusi Tunggal:** Percaya bahwa satu tindakan besar cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Sama seperti serum tidak akan bekerja jika skincare sebelumnya salah, pergantian Presiden saja tidak menyelesaikan sistem yang korup, budaya politik yang salah, atau ketimpangan sosial.
- **Pola Pikir Optimistik tapi Simplistik:** Didorong oleh harapan tinggi untuk perubahan cepat, tetapi kurang realistis dalam menghadapi kompleksitas masalah. Akibatnya, langkah yang diambil sering terburu-buru, tidak terencana, dan akhirnya memperparah kondisi wajah negara yang sudah rusak.
- **Pola Pikir Non-Sistemik:** Tidak melihat masalah sebagai jaringan kompleks yang saling terkait. Mereka mengabaikan peran lembaga lain seperti DPR, MPR, hukum, pajak, TNI-Polri, dan pendidikan politik. Fokus hanya pada Presiden ibarat menaruh serum di wajah yang penuh lapisan skincare abal-abal, sehingga hasilnya sia-sia dan bisa menimbulkan iritasi baru.

Pola pikir seperti ini tidak hanya gagal memperbaiki wajah negara, tetapi hanya membuat Indonesia semakin rusak. Jerawat lama tidak hilang, pori-pori tetap tersumbat, dan breakout baru terus

muncul. Perbaikan yang berarti membutuhkan pola pikir sistemik, bertahap, dan menyeluruh, di mana semua elemen skincare diterapkan dengan urutan yang benar. Hanya dengan begitu wajah rakyat bisa kembali sehat dan negara mampu menghadapi tantangan masa depan.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 65. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal

Beberapa orang percaya bahwa menunggu pemilu lima tahunan akan otomatis memperbaiki wajah negara. Dalam analogi skincare, ini seperti berharap kulit yang berjerawat dan meradang akan membaik hanya karena serum diganti setiap beberapa tahun sekali, tanpa memperbaiki dasar skincare atau melakukan facial cleanser.

Menunggu pemilu saja adalah pola pikir pasif. Tidak ada perbaikan yang dilakukan selama periode itu,

sehingga jerawat lama tetap ada, breakout baru bisa muncul, dan kulit terus meradang. Bahkan serum terbaik pun tidak akan bekerja jika facial cleanser, toner, dan perawatan dasar lainnya diabaikan.

Selain itu, menunggu pemilu tanpa tindakan perbaikan sistemik membuat masalah semakin menumpuk. Ketimpangan sosial, korupsi, lemahnya pengawasan hukum, dan rendahnya pendidikan politik tetap tidak tersentuh. Wajah rakyat tetap meradang, dan ketika serum baru akhirnya diterapkan setelah pemilu, hasilnya tidak maksimal karena lapisan skincare sebelumnya masih salah.

Perbaikan yang berarti membutuhkan aksi berkelanjutan, bukan menunggu jadwal tertentu. Pendidikan politik, reformasi lembaga, pengawasan hukum, dan perbaikan sistem harus dilakukan secara konsisten, bukan sekadar berharap pada pergantian Presiden atau wakil rakyat setiap lima tahun.

Singkatnya, menunggu pemilu Lima Tahunan tidak cukup untuk memperbaiki wajah negara. Sama seperti skincare, perubahan yang nyata membutuhkan perawatan yang teratur, langkah yang berurutan, dan kombinasi semua elemen yang tepat. Tanpa itu, jerawat lama tetap ada, breakout baru muncul, dan wajah rakyat tidak akan pernah benar-benar sehat.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 66. Tipe Pola Pikir Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Skincare Abal-Abal

Orang yang percaya menunggu pemilu lima tahunan sudah cukup untuk memperbaiki negara memiliki pola pikir tertentu yang berisiko membuat Indonesia semakin rusak. Berikut tipe-tipe pola pikir mereka:

- **Pola Pikir Pasif:** Mereka tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki kondisi. Sama seperti membiarkan wajah berjerawat tetap tanpa membersihkan atau memperbaiki skincare yang salah, mereka hanya menunggu perubahan datang sendiri.
- **Pola Pikir Tertunda (Deferred Thinking):** Segala tindakan perbaikan dianggap bisa ditunda hingga momen pemilu tiba. Akibatnya, masalah menumpuk, pori-pori tersumbat, dan

lapisan skincare abal-abal terus memperparah iritasi.

- **Pola Pikir Reliance on Timing / Authority:** Mereka bergantung sepenuhnya pada jadwal atau figur tertentu, misalnya Presiden atau pemilu lima tahunan, sebagai satu-satunya sumber perbaikan. Sama seperti berharap serum tunggal bisa menyembuhkan wajah yang penuh lapisan skincare yang salah, hasilnya sia-sia.
- **Pola Pikir Linear dan Sederhana:** Menganggap satu tindakan tunggal di waktu tertentu akan memperbaiki semua masalah. Mereka mengabaikan kompleksitas sistem politik, lembaga, pendidikan politik, dan perilaku masyarakat.

Singkatnya, golongan yang hanya menunggu pemilu memiliki pola pikir pasif, menunda tindakan, bergantung pada figur tunggal, dan berpikir linear. Jika pola pikir ini dominan, wajah negara tetap berjerawat, breakout baru muncul, dan perbaikan yang sejati tidak akan terjadi. Menunggu saja tidak cukup sehingga perubahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Bab 11: Memahami Sistem Negara Lewat Analogi Organ Tubuh

I. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Organ Tubuh Sehat Wal Afiat

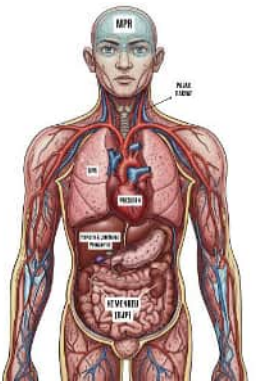

SCAN ME

Gambar 67. Kondisi Ideal Negara Indonesia Seperti Organ Tubuh Sehat Wal Afiat

Indonesia yang ideal seperti tubuh manusia yang sehat. Setiap organ bekerja selaras dan saling mendukung, sehingga seluruh sistem berjalan dengan lancar. Rakyat sebagai sel-sel tubuh dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera, sementara negara mampu menghadapi tantangan tanpa terguncang.

Kepala Ibarat MPR

Kepala yang diwakili oleh MPR adalah pusat kedaulatan. Mata dan telinganya selalu terbuka, mampu mendengar dan melihat aspirasi rakyat dengan jernih. Kepala yang sehat memberikan arah dan panduan, sehingga seluruh tubuh bergerak dengan terkoordinasi dan selaras.

Jantung Ibarat Presiden

Jantung, yang diwakili oleh Presiden, adalah pemompa utama. Energi yang dihasilkannya mengalir ke seluruh tubuh bangsa, memastikan setiap organ mendapatkan dorongan untuk berfungsi optimal. Jantung yang stabil membuat tubuh tetap bertenaga dan tangguh.

Paru-Paru Ibarat DPR

Paru-paru yang diwakili oleh DPR bekerja sebagai pengawas vital. Mereka menyalurkan oksigen berupa kebijakan yang sehat dan menyehatkan demokrasi. Paru-paru yang berfungsi dengan baik menjaga tubuh tetap vital, responsif terhadap tantangan, dan mampu membersihkan racun yang muncul dari kebijakan yang tidak tepat.

Ginjal Ibarat Kemenkeu dan DJP

Ginjal yang diwakili oleh Kemenkeu dan DJP menjaga aliran darah tetap bersih dan seimbang. Mereka menyaring racun yang bisa membebani rakyat dan mengatur distribusi sumber daya secara adil. Ginjal yang sehat memastikan setiap bagian tubuh menerima nutrisi yang cukup dan bekerja dalam kondisi optimal.

Hati dan Limpa Ibarat Hukum dan Lembaga

Hati dan limpa yang diwakili oleh hukum dan lembaga pengawas menetralkan racun penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi tubuh negara dari penyakit korupsi. Organ ini menjaga integritas sistem dan

memastikan tubuh mampu menghadapi ancaman internal tanpa melemah.

Darah Ibarat Pajak Rakyat

Darah yang berasal dari pajak rakyat mengalir dengan lancar dan adil. Darah ini menopang pembangunan dan menutrisi seluruh tubuh bangsa. Aliran darah yang sehat memastikan energi dari jantung sampai ke ujung kaki tersedia merata dan seluruh organ mendapat dukungan yang sama.

Pelawan dan Sistem Imun Ibarat TNI-Polri

Pelawan dan sistem imun yang diwakili oleh TNI dan Polri bekerja melindungi tubuh dari ancaman luar maupun dalam. Sistem imun yang sigap menjaga tubuh rakyat tetap sehat dan tangguh. Tanpa sistem imun yang baik, tubuh akan rentan terhadap serangan dan gangguan yang membahayakan.

Parasit Ibarat Elite Parpol

Parasit yang diibaratkan elit partai politik yang korup tidak ada. Partai politik yang sehat justru menjadi sel-sel imunitas tambahan, memperkuat tubuh negara dan menjaga agar seluruh organ bekerja harmonis.

Tranfusi Darah Ibarat Utang Luar Negeri

Transfusi eksternal seperti utang luar negeri tidak diperlukan. Tubuh negara mampu mandiri dan cukup dengan sumber daya sendiri. Ketergantungan pada pihak luar hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan dan risiko baru.

Mesin Pencuci Darah Ibarat Alat Bantu

Mesin pencuci darah atau dialisis juga tidak dibutuhkan karena ginjal berfungsi normal. Aliran darah tetap bersih dan seimbang, semua organ bekerja sesuai perannya, dan tidak ada sistem yang dipaksa menutupi kelemahan.

Dengan kondisi ini, seluruh sel tubuh bekerja harmonis. Kepala memberikan arahan, jantung memompa energi, paru-paru menyediakan oksigen, ginjal menjaga keseimbangan, hati dan limpa menetralkan racun, darah menyalurkan nutrisi, sistem imun melindungi, dan politik berfungsi sebagai sel imunitas tambahan. Semua organ bekerja tanpa hambatan dan saling melengkapi.

Indonesia yang ideal bukan sekadar soal satu organ atau figur tertentu. Negara yang sehat adalah negara di mana seluruh organ dan sistemnya bekerja selaras, dari kepala hingga kaki, dari aliran darah hingga sistem imun. Dengan begitu rakyat dapat hidup sehat walafiat dan bangsa dapat berkembang dengan kuat dan berkelanjutan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

II. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Sakit Kronis

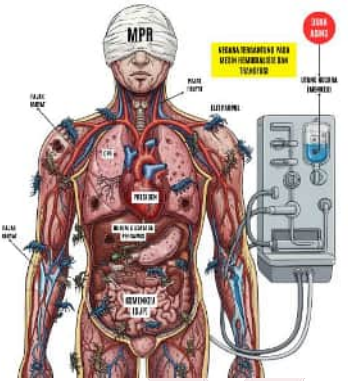

SCAN ME

Gambar 68. Kondisi Negara Indonesia Saat Ini Seperti Tubuh Sakit Kronis

Indonesia saat ini seperti tubuh manusia yang sakit kronis parah. Setiap organ yang seharusnya bekerja selaras justru terganggu, saling melemahkan, dan membuat seluruh sistem hampir lumpuh.

Rakyat sebagai sel-sel tubuh tidak mampu beraktivitas dengan lancar. Hidup terasa berat, penuh tekanan, dan produktivitas menurun drastis. Kondisi ini bukan sakit biasa; ini adalah penyakit yang sudah menahun, yang terus merusak dari dalam.

SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Kepala Ibarat MPR

Kepala yang diwakili oleh MPR seharusnya menjadi pusat kedaulatan, mata dan telinga yang terbuka untuk mendengar aspirasi rakyat.

Saat ini kepala tertutup rapat. Aspirasi rakyat tidak terdengar, arah bangsa kabur, dan keputusan yang diambil sering jauh dari kebutuhan tubuh secara keseluruhan. Tanpa kepala yang waspada, seluruh organ lain kehilangan koordinasi dan stabilitas.

Jantung Ibarat Presiden

Jantung yang diwakili oleh Presiden seharusnya menjadi pemompa utama energi kepemimpinan. Saat ini jantung malfungsi. Energi yang seharusnya mengalir ke seluruh tubuh tersumbat dan tidak merata.

Organ lain bekerja keras menutupi kekurangan jantung, tetapi tubuh tetap lemah dan rentan, seperti seseorang yang terus mencoba berlari dengan jantung yang tidak sehat.

Paru-Paru Ibarat DPR

Paru-paru yang diwakili oleh DPR ikut sakit. Mereka tidak mampu menyalurkan oksigen segar berupa kebijakan sehat. Demokrasi tersumbat, organ lain kekurangan energi vital, dan seluruh tubuh semakin lemah. Setiap tarikan napas terasa berat, seolah tubuh sedang menahan sesak yang berkepanjangan.

Ginjal Ibarat Kemenkeu dan DJP

Ginjal yang diwakili oleh Kemenkeu dan DJP gagal menyaring dan menyeimbangkan aliran darah. Darah penuh racun dan ketidakadilan, sebagian organ kekurangan nutrisi, sementara sebagian lainnya dibebani terlalu berat.

Tubuh tergantung pada transfusi eksternal berupa utang luar negeri karena ginjal dan jantung sudah tidak mampu bekerja normal.

Hati dan Limpa Ibarat Hukum dan Lembaga

Hati dan limpa yang diwakili oleh hukum dan lembaga pengawas keropos. Mereka tidak mampu menetralkan racun dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Organ yang seharusnya menjaga tubuh tetap sehat justru melemah, meninggalkan tubuh rentan terhadap serangan penyakit internal yang terus berkembang.

Darah Ibarat Pajak Rakyat

Darah yang berasal dari pajak rakyat diperas habis untuk menopang tubuh yang sakit. Aliran darah tidak adil dan tidak seimbang. Beberapa organ kelaparan, beberapa terlalu banyak beban. Seluruh tubuh bekerja dalam kondisi stres kronis, dan energi yang tersisa semakin menipis setiap hari.

Pelawan dan Sistem Imun Ibarat TNI-Polri

Pelawan dan sistem imun yang diwakili oleh TNI dan Polri tidak lagi melindungi tubuh. Imunitas melemah dan dalam beberapa kasus malah menyerang tubuh sendiri, menambah kerusakan dan membuat seluruh sistem semakin rentan.

Ancaman internal dan eksternal membahayakan setiap organ, sementara pertahanan yang tersisa terlalu lemah untuk melawan.

Parasit Ibarat Elite Parpol

Parasit yang diwakili oleh elite parpol yang korup menggerogoti seluruh tubuh. Mereka mengambil

energi dan sumber daya untuk kepentingan pribadi, memperburuk kondisi organ lain, dan menahan tubuh agar tidak bisa pulih.

Tranfusi Darah Ibarat Utang Luar Negeri

Transfusi eksternal berupa utang luar negeri dipasang karena ginjal dan jantung sudah gagal. Ketergantungan ini membuat tubuh tidak mandiri, semakin rentan, dan berisiko menimbulkan ketidakseimbangan lebih parah.

Mesin Pencuci Darah Ibarat Alat Bantu

Mesin pencuci darah atau dialisis digunakan karena ginjal sudah tidak berfungsi. Tubuh bergantung pada alat eksternal untuk bertahan hidup, sementara organ lain bekerja dalam kondisi stres kronis yang melelahkan dan merusak.

Seluruh kondisi ini menunjukkan Indonesia dalam keadaan sakit kronis yang sangat parah. Rakyat sebagai sel-sel tubuh menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Aktivitas sehari-hari terasa berat, potensi bangsa terhambat, dan setiap hari tubuh berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Perbaikan yang nyata hanya bisa terjadi jika seluruh organ diperbaiki secara menyeluruh, sistemik, dan berkelanjutan. Tanpa tindakan drastis dan konsisten, tubuh negara akan terus melemah, bahkan berisiko runtuh.

III. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Sakit Kronis



SCAN ME

Gambar 69. Solusi Perbaikan Negara Jika Dianalogikan Tubuh Sakit Kronis

Setelah kita memahami bahwa "Indonesia adalah tubuh" yang kini sedang sakit parah, maka langkah berikutnya bukan sekadar mengeluh atau menuding. Tubuh yang sakit harus disembuhkan.

Kuncinya ada pada kesadaran jiwa rakyat, kesadaran kolektif bahwa tubuh ini memang sedang sekarat. Tanpa kesadaran, tubuh bisa mati perlahan tanpa pernah berusaha mencari obat.

Kesadaran Jiwa Rakyat: Pusat Kehidupan Bangsa

Jiwa adalah inti dari kehidupan. Kalau jiwa sadar bahwa tubuh sakit, maka ia akan mencari pertolongan, pergi ke dokter, dan bersedia diobati. Tetapi bila jiwa mati rasa atau tertutup, tubuh akan hancur tanpa tahu apa yang terjadi. Di sinilah rakyat harus bangun, menyadari bahwa Indonesia sedang kritis. Kesadaran kolektif rakyat adalah syarat pertama untuk sembuh.

Kesadaran ini tidak berdiri sendiri. Ia berhubungan dengan empat pilar bangsa yang bisa

diibaratkan sebagai bagian penting dari sistem kesadaran tubuh:

- Intelektual sebagai Otak (Kesadaran Rasional): Memberi arah, strategi, dan nalar sehat bangsa. Tanpa otak, tubuh berjalan tanpa arah.
- Kaum Agama/Rohaniawan sebagai Ruh (Kesadaran Spiritual): Memberi makna, tujuan, dan akhlak. Tanpa ruh, tubuh hanya hidup biologis tanpa nilai moral.
- Budayawan sebagai Saraf (Kesadaran Sosial): Menyambungkan semua organ, memberi rasa malu, empati, dan identitas bangsa. Tanpa saraf, tubuh mati rasa.
- TNI/Polri sebagai Tulang (Penopang Fisik): Menjaga kerangka berdiri tegak. Jika tulang justru menindih organ, tubuh akan lumpuh.

Jika keempat pilar ini berjalan selaras, tubuh Indonesia akan sadar dirinya sakit, lalu mencari pengobatan. Tetapi bila otak bodoh, ruh mati, saraf mati rasa, dan tulang menindih, tubuh ini berubah menjadi zombie yang hidup secara biologis, tetapi tanpa jiwa.

Dokter Spesialis untuk Tubuh Indonesia

Karena penyakitnya kompleks, tubuh Indonesia tidak cukup ditangani satu dokter umum. Dibutuhkan tim multidisiplin, seperti pasien dengan gagal multi-organ.

- Spesialis Bedah Konstitusi (Ahli Tata Negara) untuk membedah kepala (MPR) agar kembali menjadi pemegang kedaulatan rakyat.

- Spesialis Jantung (Eksekutif/Presiden) agar jantung yang malfungsi bisa kembali memompa darah untuk rakyat, bukan mengurasnya.
- Spesialis Paru-paru (Legislatif/DPR) agar saluran oksigen rakyat benar-benar mengalir, bukan tersumbat oleh kepentingan segelintir orang.
- Spesialis Ginjal (Kemenkeu/Pajak) agar darah rakyat disaring dengan adil, tidak lagi bergantung pada transfusi utang.
- Spesialis Hati/Limpa (Hukum & Lembaga Pengawas) untuk menetralisir racun korupsi yang selama ini menumpuk.
- Spesialis Tulang (TNI/Polri) yang menata ulang peran agar kembali menopang rakyat, bukan menindihnya.
- Spesialis Saraf (Budaya & Kesadaran Sosial) guna membangkitkan rasa malu, rasa adab, dan gotong royong.
- Spesialis Jiwa (Psikiater Bangsa) agar mengatasi penyakit terbesar berupa apatisme rakyat.

Hanya dengan kerja tim ini, tubuh Indonesia bisa disembuhkan.

Strategi Pengobatan Bertahap

Seperti pasien kritis di rumah sakit, operasi tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada prioritas dan tahapan:

1. Tahap Darurat (IGD)
    - Hentikan kebocoran darah (korupsi & pajak bocor).

- Buka saluran oksigen (dialog publik, DPR transparan).
- Bangunkan kesadaran rakyat (budaya & saraf).

2. Operasi Tahap Pertama – Kepala & Ginjal
    - Bedah konstitusi (MPR kembali pemegang kedaulatan rakyat).
    - Reformasi fiskal (ginjal/pajak kembali sehat).
3. Operasi Tahap Kedua – Jantung & Hati
    - Presiden tunduk pada rakyat melalui MPR, bukan partai.
    - Hukum independen, racun korupsi disaring.
4. Operasi Tahap Ketiga – Paru-paru & Tulang
    - DPR kembali menyalurkan aspirasi rakyat.
    - TNI/Polri jadi penopang, bukan penindas.
5. Rehabilitasi Saraf & Jiwa
    - Budaya & gotong royong jadi sensor sakit-sehat bangsa.
    - Rakyat diberi "vaksin politik": pendidikan politik agar tidak lagi terjebak parasit partai.

Parasit Politik: Cacing dalam Tubuh Bangsa

Partai politik dalam analogi ini adalah parasit. Mereka menempel di organ-organ vital, menyedot darah rakyat melalui suap, korupsi, dan rente anggaran. Tidak ada organ yang bisa sembuh jika parasit ini dibiarkan.

Karena itu, terapi antiparasit harus berjalan paralel dengan operasi besar, mulai dari aturan ketat, pembubaran partai busuk, hingga pendidikan politik rakyat.

Solusi pengobatan Indonesia bukanlah mitos atau utopia. Ia membutuhkan kesadaran jiwa rakyat, kerja tim multidisiplin dokter bangsa, dan strategi operasi bertahap yang konsisten.

Kalau hanya mengganti presiden (jantung), tubuh mungkin bertahan hidup, tetapi tetap sakit kronis.

Namun bila semua organ diobati, parasit dibersihkan, dan jiwa rakyat dijaga agar sadar, tubuh Indonesia bisa benar-benar sehat walafiat.

IV. Apakah Cukup Mengganti Presiden?



SCAN ME

Gambar 70. Apakah Cukup Mengganti Presiden Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis?

Pertanyaan ini selalu muncul setiap kali bangsa berada dalam krisis: "Kalau presidennya diganti, apakah semua masalah Indonesia akan selesai?" Banyak orang menaruh harapan besar pada satu figur pemimpin, seolah-olah tubuh Indonesia bisa sembuh total hanya dengan mengobati jantungnya saja.

Namun, berdasarkan analogi tubuh bangsa yang kita gunakan, jawaban itu jelas tidak cukup. Mari kita uraikan dengan runtut.

Presiden dalam tubuh bangsa adalah jantung. Ia berfungsi memompa darah ke seluruh organ, memastikan kehidupan tetap berjalan. Jika jantung lemah atau rusak, seluruh tubuh memang bisa kolaps. Karena itu wajar jika rakyat menaruh perhatian besar pada jabatan ini.

Tetapi, apakah cukup dengan mengganti jantung saja? Mari kita lihat gambaran singkat:

- Kepala/MPR tetap tertutup. Presiden baru tidak bisa membongkar kebuntuan konstitusi jika MPR tidak direformasi.
- Paru-paru/DPR tetap sakit. Aspirasi rakyat tidak mengalir, meski jantung baru bekerja keras.
- Ginjal (Kemenkeu) tetap gagal menyaring. Pajak bocor, utang luar negeri bertambah, darah rakyat tetap kotor.
- Hati/Limpa (hukum) tetap keropos. Racun korupsi akan kembali menyebar.
- Tulang (TNI/Polri) tetap salah peran. Rakyat bisa tetap tertekan meski presiden berganti.
- Saraf (budaya) tetap mati rasa. Rakyat tidak sadar tubuhnya sakit, apatisme berlanjut.
- Jiwa (kesadaran kolektif) tetap tertidur. Rakyat hanya menunggu sosok penyelamat tunggal, tanpa bergerak bersama.

Hasil akhirnya? Tubuh mungkin bertahan hidup, tetapi tetap sakit kronis. Presiden baru hanya

memperpanjang umur pasien, bukan menyembuhkannya.

Jika bangsa benar-benar ingin sembuh, tidak ada pilihan lain kecuali menjalani terapi lengkap dengan delapan spesialis. Artinya:

- Kepala/MPR dibedah ulang, dikembalikan sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
- Jantung/Presiden dipulihkan fungsinya, agar benar-benar melayani rakyat.
- Paru-paru/DPR direformasi, supaya oksigen aspirasi rakyat mengalir.
- Ginjal (Kemenkeu) dibersihkan, supaya darah ekonomi tidak lagi kotor dan tergantung utang.
- Hati/Limpa (hukum) ditransplantasi, agar korupsi bisa disaring.
- Tulang (TNI/Polri) direkonstruksi, agar kembali jadi penopang, bukan penindas.
- Saraf (budaya) dihidupkan kembali, supaya bangsa punya rasa malu, adab, dan identitas.
- Jiwa rakyat disembuhkan, agar kesadaran kolektif tidak lagi apatis.

Dengan terapi komprehensif ini, tubuh Indonesia bukan sekadar bertahan hidup, tetapi bisa sehat wal afiat. Mengganti presiden memang bisa jadi bagian dari solusi. Jantung yang sehat jelas lebih baik daripada jantung yang sakit. Namun, tanpa reformasi menyeluruh pada organ-organ lain, tubuh Indonesia hanya berpindah dari satu pasien kritis ke pasien kritis berikutnya.

Jadi, jawabannya tegas: tidak cukup hanya mengganti presiden. Bangsa ini membutuhkan terapi komprehensif, delapan spesialis yang bekerja bersama, serta kesadaran jiwa rakyat agar tidak lagi menyerahkan nasib hanya pada satu figur.

Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup



SCAN ME

Gambar 71. Tipe Pola Pikir Ganti Presiden Sudah Cukup Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis

Dalam situasi bangsa yang sakit parah, sebagian orang beranggapan bahwa cukup mengganti presiden saja untuk menyelesaikan masalah. Mereka percaya jantung adalah pusat kehidupan tubuh, sehingga bila jantung diganti otomatis tubuh akan kembali sehat. Pandangan ini terdengar praktis, tetapi sesungguhnya menyesatkan

- **Tipe Emosional-Praktis:** Mereka hanya melihat yang paling kelihatan, yaitu presiden. Maka solusinya dianggap sederhana: ganti presiden, selesai masalah.

- **Tipe Konsumen Media:** Mereka terpengaruh oleh berita televisi atau media sosial yang selalu menyorot presiden. Akibatnya, mereka lupa bahwa masalah bangsa jauh lebih besar dari sekadar siapa yang duduk di kursi presiden.
- **Tipe Partisan (Kejahatan) Politik:** Kelompok ini biasanya pendukung oposisi. Fokus mereka adalah menjatuhkan presiden yang sedang berkuasa lalu menggantinya dengan tokoh pilihan mereka, tanpa peduli pada masalah struktural yang lebih mendasar.
- **Tipe Apatis Simpel:** Mereka tidak mau repot memikirkan sistem. Cukup ada wajah baru di pucuk kekuasaan, sudah dianggap sebagai tanda perubahan.
- **Tipe Pengalihan Isu:** Tipe ini biasanya berasal dari elite status quo. Mereka sengaja membuat rakyat sibuk membicarakan presiden, agar lembaga lain seperti DPR, MPR, dan partai politik tetap aman dari sorotan.

Pada akhirnya, pandangan "cukup obati jantung" membuat bangsa terjebak dalam lingkaran semu. Tubuh mungkin tampak hidup, tetapi seperti zombie. Perubahan sejati tidak akan lahir hanya dari satu operasi jantung, melainkan dari penyembuhan seluruh organ bangsa.

V. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan?



SCAN ME

Gambar 72. Apakah Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis?

Banyak orang di negeri ini percaya bahwa pemilu adalah obat mujarab untuk segala penyakit bangsa. Setiap lima tahun sekali rakyat datang ke bilik suara dengan harapan besar. Mereka percaya bahwa mengganti presiden atau wakil rakyat cukup untuk membawa perubahan. Namun kenyataannya tubuh Indonesia tidak bisa sembuh hanya dengan menunggu lima tahunan.

Jika kita kembali ke analogi tubuh, pemilu hanyalah sebuah alat bukan terapi menyeluruh. Menunggu pemilu lima tahunan ibarat pasien kritis yang dibiarkan tergeletak di ruang IGD sambil menunggu jadwal operasi. Darah terus keluar, paru-paru makin lemah, ginjal semakin rusak, dan racun korupsi menumpuk. Waktu lima tahun terlalu lama

untuk sekadar menunggu ketika kondisi pasien sudah sekarat.

Alasan pertama mengapa pemilu saja tidak cukup adalah karena sistemnya sudah rusak. Pemilu berjalan di atas kerangka konstitusi yang tidak sehat sejak amandemen. Kepala yang seharusnya menjadi pusat kedaulatan rakyat tetap tertutup, DPR masih dikuasai kepentingan partai, dan hukum tetap keropos. Dalam kondisi seperti ini siapa pun yang terpilih tetap akan terjebak dalam kerangka yang sakit.

Alasan kedua adalah karena partai politik bertindak seperti parasit dalam tubuh bangsa. Mereka menguasai jalur pencalonan presiden, menyedot darah rakyat melalui mahar politik, rente jabatan, dan korupsi anggaran. Mengganti presiden lewat pemilu tanpa membersihkan parasit hanya berarti mengganti inang baru bagi cacing yang sama.

Alasan ketiga adalah soal waktu yang terbuang. Lima tahun terlalu lama jika tubuh sudah kritis. Bayangkan pasien gagal ginjal menunggu lima tahun baru mendapat cangkok, tentu ia tidak akan bertahan hidup. Begitu pula bangsa ini, utang terus menumpuk, sumber daya terkuras, dan rakyat makin apatis jika hanya menunggu momentum pemilu.

Alasan keempat adalah karena rakyat tetap pasif. Menunggu pemilu tanpa gerakan kolektif berarti menyerahkan nasib hanya pada satu momen. Jiwa rakyat seharusnya tidak tidur selama lima tahun lalu bangun hanya sebentar ketika mencoblos. Kesadaran rakyat harus hadir setiap hari, karena demokrasi bukan

hanya lima menit di bilik suara tetapi kontrol yang berlangsung terus menerus.

Yang dibutuhkan bukan sekadar menunggu tetapi melakukan operasi darurat secara paralel. Reformasi konstitusi, pembenahan keuangan negara, pemberantasan korupsi, dan reposisi TNI Polri harus mulai digerakkan sekarang. Rakyat juga harus diberi pendidikan politik agar sadar bahwa partai politik bisa menjadi parasit yang melemahkan tubuh bangsa. Kesadaran kolektif ini akan menjadi energi moral yang menjaga tubuh Indonesia tetap bertahan sampai operasi besar dilakukan.

Demokrasi sejati menuntut adanya mekanisme kontrol harian, bukan hanya lima tahunan. Rakyat perlu mengawasi kebijakan, menekan penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga agar pemimpin tetap berada di jalur yang benar.

Kesimpulannya, menunggu pemilu lima tahunan jelas tidak cukup. Pemilu hanyalah salah satu instrumen dalam terapi bangsa, bukan solusi tunggal. Jika tubuh Indonesia sudah kritis, ia membutuhkan tindakan darurat, operasi mendasar, serta terapi jangka panjang.

Pemilu memang penting tetapi perubahan struktural dan kebangkitan kesadaran rakyat harus berjalan sebelum, saat, dan sesudah pemilu. Tanpa itu semua, setiap lima tahun hanya akan menghasilkan siklus sakit yang sama.

Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan



SCAN ME

Gambar 73. Tipe Pola Pikir Cukup Menunggu Pemilu Lima Tahunan Jika Negara Diibaratkan dengan Tubuh Sakit Kronis

Ketika tubuh Indonesia sedang sakit parah, ada sekelompok orang yang masih beranggapan bahwa cukup menunggu pemilu lima tahunan untuk sembuh. Mereka meyakini bahwa semua kerusakan bangsa bisa diperbaiki hanya dengan mengganti presiden atau wakil rakyat melalui kotak suara. Cara pandang ini lahir dari berbagai latar belakang, motif, dan psikologi yang berbeda. Secara garis besar, mereka dapat digolongkan menjadi lima tipe.

- **Tipe Legalistik-Prosedural:** Mereka percaya satu-satunya jalan perubahan adalah lewat pemilu lima tahunan. Bagi mereka, asal prosedur dijalankan berarti demokrasi sehat, meski faktanya sistem pemilu dikuasai partai lama yang justru jadi sumber masalah.

- **Tipe Optimis-Naif:** Mereka yakin rakyat bisa menghukum partai busuk lewat kotak suara. Padahal, sejak proses verifikasi, pencalonan, hingga pengawasan pemilu, semua dikendalikan partai lama. Harapan ini sering berakhir dengan kekecewaan.
- **Tipe Apatis-Pasif:** Mereka tahu sistem rusak, tetapi memilih diam dan ikut arus. Bagi mereka, lebih baik menunggu lima tahun berlalu daripada repot ikut mendorong perubahan.
- **Tipe Status Quo Terselubung:** Mereka adalah pihak yang diuntungkan sistem. Dengan alasan "sabar tunggu pemilu", mereka sebenarnya hanya ingin menjaga keadaan agar tidak berubah.
- **Tipe Pengalihan Emosional:** Biasanya rakyat biasa yang ingin menenangkan diri. Mereka memberi harapan palsu bahwa pemilu akan menyelesaikan masalah, padahal siklus rusak hanya berulang.

Mereka ibarat pasien yang sedang sakit parah tetapi meyakinkan diri bahwa cukup minum air hangat dan tidur panjang agar sembuh. Harapan semacam ini memang bisa membuat hati lebih tenang, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, rasa tenang palsu itu hanya menunda kenyataan bahwa penyakit makin parah.

Lima tipe orang ini menunjukkan mengapa bangsa sering terjebak dalam siklus menunggu pemilu lima tahunan tanpa perubahan berarti. Ada yang

legalistik, ada yang naif, ada yang pasif, ada yang sengaja mempertahankan status quo, dan ada pula yang sekadar mencari pelarian emosional. Semua sama-sama mengabaikan fakta bahwa tubuh Indonesia butuh operasi besar, bukan sekadar mengganti jantung setiap lima tahun.

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 12: Berdoa Dulu atau Usaha Dulu?

I. Menimbang Spiritualitas dan Aksi

Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat adalah: *"Kalau bangsa kita sedang sakit, lebih baik kita berdoa dulu atau usaha dulu?"* Ada yang langsung menjawab, "Tentu doa dulu, karena Tuhan Maha Penolong." Ada juga yang dengan tegas berkata, "Tidak, kita harus usaha dulu, baru berdoa." Perdebatan seperti ini sering membuat orang bingung seakan-akan keduanya tidak bisa berjalan bersamaan.

Padahal, jika kita menimbang dengan jernih, doa dan usaha tidak pernah bertentangan. Doa adalah energi batin, sebuah ikrar dari hati. Sedangkan usaha adalah wujud nyata dari doa itu sendiri.

Bayangkan seseorang yang berkata ingin sembuh dari penyakit, tetapi tidak pernah mau minum obat atau periksa ke dokter.

Doanya menjadi kosong karena tidak dibarengi ikhtiar. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang berusaha keras tapi tidak pernah berdoa akan kehilangan kesadaran bahwa ada kekuatan lebih besar yang mengatur hasil akhirnya.

Dalam sunnatullah (hukum Allah yang mengatur kehidupan), prosesnya jelas: **Niat → Ikhtiar → Doa Kontinu → Hasil.**

Di sinilah pentingnya memahami sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Allah menempatkan doa, usaha, dan hasil dalam satu rangkaian. Pertama, ada niat. Begitu niat terbit dari hati, itu sudah doa pertama. Kedua, niat itu harus

diterjemahkan menjadi ikhtiar nyata. Tanpa kerja, niat hanya berhenti di angan-angan. Ketiga, doa tidak berhenti di awal, tapi hadir terus di sepanjang perjalanan. Saat bekerja pun, hati kita terus berdoa: "Ya Allah, luruskan niatku, jaga langkahku." Keempat, hasilnya akan datang sesuai dengan hukum sebab-akibat yang dikehendaki Allah. Inilah jalan sunnatullah yang tidak pernah salah.

Karena itu, pertanyaan "berdoa dulu atau usaha dulu" sesungguhnya keliru. Keduanya bukan urutan yang dipertentangkan, melainkan satu kesatuan yang saling menguatkan. Doa melahirkan semangat, usaha membuktikan kesungguhan, dan hasilnya kita serahkan sepenuhnya pada Allah.

II. Golongan yang Termasuk dalam Cara Pandang Ini

Namun dalam kenyataan, tidak semua orang memahami hubungan doa dan usaha secara utuh. Ada beberapa golongan yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama, tipe religius-pasrah atau fatalistik. Mereka punya keyakinan kuat pada Tuhan, tapi sikapnya pasif. Segala sesuatu dianggap sudah ditentukan sejak awal, sehingga manusia tidak perlu banyak bergerak. Jika bangsa sedang sakit, mereka hanya berkata, "Tuhan pasti akan menolong." Padahal, tanpa gerakan nyata, kata-kata itu hanya menjadi alasan untuk tetap diam.

Kedua, tipe pelarian psikologis. Orang-orang ini sebenarnya paham bahwa masalah bangsa sangat berat,

tetapi mereka tidak sanggup menghadapi kenyataan. Doa dijadikan pelarian untuk menenangkan diri, semacam penghiburan batin. Mereka merasa lega setelah berdoa, tetapi tidak melanjutkannya dengan langkah konkret.

Ketiga, tipe moral supporter. Maksud mereka baik. Mereka ingin memberi semangat dengan kata-kata religius, seperti, "Tenang saja, mari kita banyak berdoa, Tuhan pasti menolong." Kalimat itu memang bisa membuat orang lain merasa tenang sejenak. Tetapi jika berhenti di situ saja, tanpa ajakan untuk bergerak, maka doa itu hanya menjadi retorika.

Keempat, tipe status quo religius. Golongan ini kadang muncul dari kalangan elite atau tokoh agama yang ingin menjaga masyarakat tetap patuh. Mereka berkata, "Biarkan Tuhan yang urus, jangan ribut-ribut." Slogan ini terlihat seolah menenangkan, padahal sejatinya melanggengkan ketidakadilan. Dengan membius rakyat agar diam, para elite bisa tetap menikmati kenyamanan di tengah kerusakan sistem.

Kelima, tipe harapan kosong atau wishful thinking. Mereka menaruh harapan pada mujizat besar tanpa kerja nyata. Mereka yakin perubahan bisa datang begitu saja, padahal sejarah menunjukkan pertolongan Allah selalu hadir melalui tangan manusia yang berani bergerak. Mujizat terbesar justru lahir dari kesadaran, keberanian, dan pengorbanan manusia itu sendiri.

Di sisi lain, ada pula golongan yang mampu memadukan doa dengan usaha. Mereka tidak menafikan pentingnya doa, tapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab untuk bertindak. Doa

bagi mereka adalah energi yang menguatkan, bukan alasan untuk berhenti bergerak. Inilah golongan yang menjalankan hukum Allah dengan benar, golongan yang memahami bahwa doa tanpa usaha hanyalah angan-angan, dan usaha tanpa doa hanyalah kesombongan.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Bab 13: Pergerakan Harus Dimulai Dari Sekarang

Kita telah melakukan perjalanan panjang melalui sepuluh analogi untuk memahami kerusakan yang menggerogoti rumah besar bernama Indonesia. Kita telah melihatnya sebagai tubuh manusia yang berjalan dengan mata tertutup, sebuah keluarga yang retak dan kehilangan kehangatan, rumah yang fondasinya goyah dan atapnya bocor, hingga tubuh yang terbaring sakit kronis, bertahan hidup hanya dengan bantuan alat-alat eksternal.

Setelah semua diagnosis ini, satu pertanyaan tersisa: Lalu, apa yang kita tunggu?

Buku ini telah berulang kali menegaskan bahwa menunggu pemilu lima tahunan tidaklah cukup. Itu ibarat membiarkan pasien kritis terbaring di ruang gawat darurat sambil menunggu jadwal operasi rutin lima tahun sekali. Kerusakan tidak akan berhenti dengan sendirinya. Parasit politik akan terus menyedot darah rakyat, utang luar negeri akan terus menjadi candu yang mematikan, dan kedaulatan kita sebagai pemilik sah negeri ini akan semakin terkikis.

Menunggu datangnya seorang "juru selamat" atau "pahlawan tunggal" juga merupakan ilusi yang berbahaya. Mengganti presiden, sang kapten, atau mandor kebun, tidak akan mengubah apa pun jika strategi permainan tetap kacau, sistem irigasi masih tersumbat, dan para pengawas justru ikut berpesta dengan hama. Kerusakan yang kita hadapi bersifat sistemik, dan karena itu, solusinya pun harus sistemik.

Biaya Penundaan Jauh Lebih Besar daripada Risiko Perubahan

Setiap hari kita menunda, kerusakan semakin parah. Setiap hari kita diam, para perusak negara semakin leluasa menancapkan kukunya. Sikap pasif dan apatis adalah kemewahan yang tidak lagi kita miliki. Apatisme adalah tanda bahwa jiwa bangsa ini mulai mati rasa, membiarkan tubuhnya digerogoti tanpa perlawanan.

Kita tidak bisa lagi berkata, "Biarlah para elite yang mengurus." Sebab, terbukti merekalah sumber dari banyak masalah. Kita juga tidak bisa hanya berdoa tanpa ikhtiar, karena itu sama dengan meminta kesembuhan tanpa mau meminum obat.

Sunnatullah menuntut kita untuk bergerak. Niat, ikhtiar, dan doa harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Siapa yang Harus Memulai? Kita Semua.

Perubahan besar tidak pernah dimulai oleh jutaan orang secara serentak. Ia selalu diawali oleh segelintir orang yang sadar, berani, dan mau bergerak. Seperti yang telah diuraikan, harapan terbesar ada pada bersatunya empat pilar penjaga kedaulatan:

- Kaum Intelektual: Yang bertugas menyusun cetak biru perbaikan, bukan lagi sekadar menjadi komentator di menara gading.
- Kaum Rohaniawan: Yang menjaga kompas moral bangsa, memastikan perjuangan ini dilandasi niat suci untuk keadilan, bukan untuk kekuasaan.

- Kaum Budayawan: Yang membangkitkan kembali rasa malu, etika, dan jati diri bangsa agar kita tidak menjadi bangsa tanpa kepribadian.
- TNI dan Polri: Yang harus kembali pada hakikatnya sebagai pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan para elite.
- Namun, keempat pilar ini tidak akan bergerak jika tidak ada dorongan dari pemilik kedaulatan itu sendiri: Rakyat.

Rakyat adalah jiwa dari tubuh bangsa ini. Jika jiwa ini bangkit dan sadar, maka otak (intelektual), ruh (rohaniawan), saraf (budayawan), dan tulang (TNI/Polri) akan tergerak untuk menyembuhkan seluruh organ yang sakit.

Langkah Nyata yang Bisa Dimulai Hari Ini

Pergerakan ini tidak harus dimulai dengan turun ke jalan. Ia dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten:

- Hentikan Sikap Pasif: Mulailah dengan tidak lagi menjadi penonton pasif atau korban abadi. Sadari bahwa setiap masalah di negeri ini adalah urusan kita bersama.
- Bangun Lingkaran Diskusi: Jadikan buku ini atau gagasan serupa sebagai bahan diskusi di lingkungan terdekat Anda. Bangun kesadaran kolektif bahwa masalah kita bukan soal figur, melainkan sistem.
- Menuntut Pertanggungjawaban Empat Pilar: Secara aktif, baik melalui tulisan, petisi, maupun dialog, dorong para tokoh dari empat pilar di

lingkungan Anda untuk bersuara dan bersatu. Tanyakan pada mereka: "Di mana posisi Anda saat negara sedang sakit?"

- Fokus pada Tuntutan Mendasar: Arahkan energi pada satu tujuan utama: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat melalui restorasi konstitusi yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi, sebagai representasi sejati dari pemilik negara.

Ini bukan lagi saatnya untuk berdebat kusir atau saling menyalahkan. Ini adalah panggilan sejarah. Tubuh Indonesia sedang terbaring sakit, dan kita semua—sebagai sel-sel yang menghidupinya—memiliki tanggung jawab untuk bangkit dan menyembuhkannya.

Jangan menunggu esok, karena esok mungkin sudah terlambat. Pergerakan harus dimulai. Dari Anda, dari saya, dari kita semua. Sekarang.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

Daftar Pustaka

Antara Foto. (2024, 14 Maret). Laporan Tahunan Ombudsman 2023. Diakses dari antarafoto.com.

Antara News. (2025, 18 Agustus). Hukuman Duit Pengganti Setya Novanto Disebut Sudah Lunas, Berapa Totalnya? Diakses dari news.detik.com.

Badan Pusat Statistik. (2024). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2024). Berita Resmi Statistik: Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2024. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). Berita Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2025. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2025). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024. Jakarta: BPS.

Bank Indonesia. (2025). Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2025. Jakarta: Bank Indonesia.

CNBC Indonesia. (2025, 25 Juli). Jurang Si Miskin dan Si Kaya Masih Lebar, Ini Datanya. Diakses dari cnbcindonesia.com.

CNN Indonesia. (2024, 1 Juli). 25,22 Juta Penduduk RI Miskin per Maret 2024. Diakses dari cnnindonesia.com.

Detik News. (2020, 12 Maret). Perantara Suap Eks Ketua MK Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Penjara. Diakses dari news.detik.com.

Detik News. (2024, 8 Januari). Rafael Alun Divonis Terima Gratifikasi Rp 10 M, Begini Perhitungannya. Diakses dari news.detik.com.

Detik News. (2025, 3 Juli). KPK Tetapkan Mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Jadi Tersangka. Diakses dari news.detik.com.

GoodStats. (2025, 10 Desember). Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Menurun ke 3,85. Diakses dari data.goodstats.id.

Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023. Jakarta: ICW.

Indonesia Corruption Watch & Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. (2024). Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019-2024. Jakarta: ICW & PSHK.

Indonesia.go.id. (2025, 21 April). Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi USD427,2 Miliar di Februari 2025. Diakses dari indonesia.go.id.

KBR. (2023, 8 Agustus). Batalkan Hukuman Mati, Mahkamah Agung Vonis Ferdy Sambo Penjara Seumur Hidup. Diakses dari kbr.id.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kemenkeu.

Kompas.com. (2023, 22 September). Komnas HAM: Konflik PSN Rempang Eco City Terindikasi Kuat Terjadi Pelanggaran HAM. Diakses dari nasional.kompas.com.

Kompas.com. (2024, 19 Mei). Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya. Diakses dari nasional.kompas.com.

Kumparan. (2024, 8 April). Tugas dan Wewenang MPR setelah Amandemen UUD 1945. Diakses dari kumparan.com.
Kumparan Bisnis. (2024, 6 Mei). BPS: Masih Ada 7,2 Juta Orang Pengangguran di RI per Februari 2024. Diakses dari kumparan.com.
Kumparan News. (2024, 19 Mei). ICW Sebut Ada 791 Kasus Korupsi Sepanjang 2023, Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir. Diakses dari kumparan.com.
Kumparan News. (2024, 8 Oktober). Data ICW: 354 Anggota DPR 2024-2029 Terindikasi sebagai Politisi-Pebisnis. Diakses dari kumparan.com.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 813 K/Pid/2023.
Metro TV News. (2025, 4 Juni). Banjir Kritik Gegara Sunat Hukuman Setya Novanto, Ini Respons Mahkamah Agung. Diakses dari metrotvnews.com.
Najib, M. A., Sugandi, B., & Wekke, I. S. (n.d.). Konsep Negara dan Relevansi terhadap NKRI Perspektif Emha Ainun Nadjib. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 8(1).
Nadjib, E. A. (2016). Kekuasaan kepada Rakyat, Korban Sudah Cukup. Bentang Pustaka.
Nulhaqim, S. A., et al. (2024). Konflik Agraria di Pulau Rempang: Analisis Dampak dan Resolusi. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik.
Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023. Jakarta: Ombudsman RI.

Partai X. (n.d.). Cak Nun: Pemerintah Itu yang Miskin, Hidupnya Ditopang dari Keringat Rakyat. Diakses dari partaix.id.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2022). Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022, 22 Maret). Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-lebihan. Diakses dari setkab.go.id.
Sindo News. (2024, 20 November). 5 Fakta Teddy Minahasa, Eks Pati Polri Terjerat Kasus Narkoba Berujung Penjara Seumur Hidup. Diakses dari nasional.sindonews.com.
Tempo.co. (2021, 23 Agustus). Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat. Diakses dari tempo.co.
Tempo.co. (2023, 13 Februari). Banding Ferdy Sambo Ditolak, Berikut Kronologi Putusan Hukuman Mati Pembunuhan Brigadir Yosua. Diakses dari tempo.co.
Tempo.co. (2025, 21 Agustus). Kilas Balik Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto: Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun. Diakses dari tempo.co.
Transparency International. (2025). Corruption Perceptions Index 2024. Berlin: Transparency International.
Transparency International Indonesia. (2019, 6 September). Melawan Nalar Publik, Revisi UU KPK Harus Ditolak. Diakses dari ti.or.id.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
VOA Indonesia. (2023, 17 September). Solidaritas Rempang Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Peristiwa 7 September. Diakses dari voaindonesia.com.
Wikipedia. (n.d.). Corruption Perceptions Index. Diakses dari en.wikipedia.org.
Wikipedia. (n.d.). Emha Ainun Nadjib. Diakses dari id.wikipedia.org.
Wikipedia. (n.d.). Job Creation Act (Omnibus Law). Diakses dari en.wikipedia.org.
Wikipedia. (n.d.). Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses dari id.wikipedia.org.

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM